Skema Inovatif

Model Pengembangan Kampung Tematik

Sugiyanto

Skema Inovatif

MODEL PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK

Sugiyanto

deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life

SKEMA INOVATIF MODEL PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK

Sugiyanto

Tim Penyunting:
Mohammad Kus Yunanto, Daris Yulianto & Esa Septian

Desain Cover :
Herlambang Rahmadhani

Sumber :
https://www.shutterstock.com

Tata Letak :
Gofur Dyah Ayu

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xiv, 175 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-1130-0

Cetakan Pertama :
Juni 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki lebih dari 17.504 pulau dengan lokasi terbentang luas dari sabang sampai merauke. Sebagai Negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah sudah seharusnya menjadi kekayaan dan keunggulan Indonesia untuk menjadi peluang peningkatan sektor pariwisata guna pengembangan wilayah. Konsekuensi dari posisi Indonesia yang strategis yaitu bagaimana optimalisasi pemanfaatan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan bagi masyarakat.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi potensi yang sangat besar. Potensi ini dapat dilihat dari keindahan pulau yang terbentang dari ujung barat sampai ujung timur. Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan, khususnya wisata bahari Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Tantangannya adalah meningkatkan peran *stakeholders* yang ada di Indonesia untuk mengupayakan nilai tambah (*creating values*) dalam pengembangan sektor pariwisata.

Mayoritas masyarakat di kawasan pesisir berprofesi sebagai nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan laut, seperti ikan. Secara harfiah nelayan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yaitu orang yang melakukan aktivitas kesehariannya menangkap ikan. Sedangkan nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya hanya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kaum nelayan menghadapi sejumlah permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum dapat teratasi, salah satunya adalah problema kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi saat ini sebagai dampak adanya kesenjangan wilayah, khususnya di wilayah timur yang kerap dianggap sebagai daerah tertinggal. Contoh eksplisit yaitu, para nelayan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti halnya di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende karena rendahnya pendapatan yaitu berkisar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 dalam satu bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dengan satu rumah berisi 4-10

jiwa. Di samping itu, indikasi kemiskinan dapat dilihat secara nyata melalui kualitas permukiman yang tergolong rendah dan tidak layak huni.

Kehidupan masyarakat nelayan masih sangat bergantung pada alam dan lingkungan sekitar dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Citra kemiskinan nelayan sudah melekat erat di Kecamatan Ende Selatan. Secara nasional, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas daripada wilayah darat namun belum berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir timur. Implikasinya adalah sulitnya kaum nelayan untuk memutus rantai kemiskinan. Ironisnya wilayah laut memiliki berbagai sumberdaya yang potensial dalam nilai ekonomi. Semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir bersifat multidimensi dengan didasarkan atas kebutuhan terhadap pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang tidak terpenuhi. Dari sisi kepranataan, sebagai masyarakat yang diakui atas *equity* dalam hukum seharusnya mempunyai hak yang sama dengan masyarakat di wilayah lain. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam *Prembule* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NKRI Tahun1945 disebutkan pula bahwa salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi sangat diharapkan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Manfaatnya adalah perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat tentu optimis tercapai. Menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini sudah seharusnya dapat dipenuhi oleh Negara. Negara sebagai *public service* wajib memenuhi atau mengakomodir kebutuhan masyarakat tak terkecuali masyarakat pesisir khususnya Indonesia Wilayah Timur. Namun demikian kenyataan di lapangan acap kali berbanding terbalik dengan kondisi *das sollen*. Kondisi yang terjadi adalah potensi daerah belum dioptimalkan sehingga belum

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun telah bermodalkan peluang wisata bahari. Meskipun secara teoritis Negara harus melayani, menciptakan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kenyataan seperti di wilayah Kabupaten Ende, tepatnya di Kecamatan Ende Selatan banyak perihal yang masih diperlukan kegiatan stimulan untuk pembangunan daerah.

Permasalahan yang terjadi seperti kurangnya kesempatan berusaha masyarakat, rendahnya pendidikan, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi, budaya dan gaya hidup yang cenderung konsumtif menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Implikasinya terjadi kesenjangan wilayah daerah pesisir di Wilayah Timur. Keanekaragaman sumberdaya alam sebagai negara kepulauan merupakan potensi utama pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana sektor pariwisata akan berperan menjadi generator dalam peningkatan perekonomian masyarakatnya.

Dalam menanggapi peliknya permasalahan di wilayah pesisir timur, dengan memfokuskan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, maka melalui inovasi pengembangan kampung tematik dapat menjadi ide solutif. Strategi dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang ada di Kecamatan Ende Selatan seperti menguatkan kelembagaan pariwisata, penataan lingkungan, dan komponen pariwisata. Dengan kata lain, bahwa pariwisata akan dapat menghidupkan dan mendongkrak perkenomian masyarakat pesisir timur. Maka dalam buku ini berusaha untuk memberikan *win win solution* dengan memberikan masukan terhadap pemerintah daerah. Dengan berkembangnya sektor pariwisata maka berpeluang memajukan wilayah terkait, seperti menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, masyarakat juga akan terkena imbasnya yaitu menambah penghasilan dengan menciptakan kegiatan penunjang pariwisata.

Dengan segala kekurangan yang ada pada buku ini maka penulis mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada lembaga Nusa Bangun Institute (NBI), Pemerintah Kabupaten Ende, Pemerintah Kelurahan Tetandara, Paupanda, dan Rukun Lima, terkhusus keluarga (ibunda, istri, dan anakku), dan keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta. Demikian juga kepada asisten peneliti, Saudara Esa Septian yang telah memberikan dukungan besar dalam menyelesaikan penyusunan buku ini. Serta pihak-pihak yang telah memberikan *support* yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis sampaikan terima kasih.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi dunia akademisi dan pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga *non governmental* (NGO), serta pembaca. Besar harapan penulis bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan di Wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Ende Selatan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar viii

PROLOG 1
BAB 1 URGENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA KAWASAN PESISIR KAWASAN PESISIR TIMUR 7
A. Kawasan Pesisir: Berlimpah Potensi, Minim Perhatian 8
B. Hak Ruang Hidup Masyarakat Pesisi 14
C. Peran Negara di Tengah Masyarakat Pesisir 25
D. Pariwisata Sebagai Peluang Perubahan Kawasan Pesisir 29
E. *Lesson Learned* Pengembangan Pariwisata Kawasan Pesisir 32

BAB 2 KARAKTERISTIK KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN ENDE SELATAN 42
A. Tipologi Permukiman Di Kawasan Pesisir 44
B. Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir 50
C. Potensi Pariwisata Di Kecamatan Ende Selatan 59
D. Kondisi Tata Ruang Di Kawasan Pesisir 77

BAB 3 INOVASI MODEL PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK 82
A. Analisis SWOT Kawasan Pesisir Di Kecamatan Ende Selatan 83
B. Konsep Pengembangan Wisata Kampung Tematik 95
C. Strategi Pengembangan Wisata Kampung Nelayan 116
D. Rencana Penataan Ruang Kawasan Pesisir 126
E. Penguatan Lembaga Lokal Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Nelayan 143

EPILOG 157
Daftar Pustaka 161
Biografi Penulis 169

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil IPM Indonesia Menurut Kawasan Barat dan Timur Tahun 2018 13
Tabel 2. Kunjungan Wisatawan Domestik Ke Bali per Bulan Tahun 2015-2018 32
Tabel 3. Data kawasan Kumuh di Kabupaten Ende 48
Tabel 4. Penduduk Pendatang dan Penduduk Pindah Di Kelurahan Tetandara 56
Tabel 5. Penduduk Pendatang dan Penduduk Pindah di Kelurahan Rukun Lima 62
Tabel 6. Jumlah Penduduk Pendatang dan Pindah Di Kelurahan Paupanda 65
Tabel 7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende 67
Tabel 8. Indikasi Kawasan Permukiman Prioritas 77
Tabel 9. Matriks SWOT Kawasan Studi 91
Tabel 10. Strategi Pembangunan Lingkungan Wisata Kampung Nelayan 122
Tabel 11. Strategi Pembangunan Ekonomi Wisata Kampung Nelayan 124
Tabel 12. Strategi Pembangunan Komunitas Sosial Wisata Kampung Nelayan 126
Tabel 13. Pengembangan Wisata Kampung Nelayan Berbasis Tata Ruang 130
Tabel 14. Strategi Pengembangan Atraksi Alam Wisata Kampung Nelayan 132
Tabel 15. Strategi Pengembangan Atraksi Budaya Wisata Kampung Nelayan 134
Tabel 16. Strategi Pengembangan Atraksi Buatan Wisata Kampung Nelayan 136
Tabel 17. Strategi Pengembangan Amenitas Wisata Kampung Nelayan . 137
Tabel 18. Strategi Pengembangan Aksesibilitas Wisata Kampung Nelayan 139
Tabel 19. Strategi Pengembangan *Ancillaries* Wisata Kampung Nelayan 140
Tabel 20. Unsur Sapta Pesona 144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kondisi Kawasan Pesisir Di Indonesia Timur 11
Gambar 2. Prioritas Pembangunan 14
Gambar 3. Potret Kawasan Pesisir Timur 19
Gambar 4. Permukiman Nelayan Tepi Laut 28
Gambar 5. Pantai Pandawa 33
Gambar 6. Atraksi Buatan Di Hutan Mangrove Kabupaten Kulon Progo 36
Gambar 7. Pantai Pattaya Thailand 37
Gambar 8. Peta Wilayah Kecamatan Ende Selatan 43
Gambar 9. FGD Bersama Warga Kelurahan Paupanda 47
Gambar 10. Kawasan Prioritas 49
Gambar 11. Grafik Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Tetandara 54
Gambar 12. Grafik Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Tetandara 55
Gambar 13. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ende 58
Gambar 14. Grafik Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Rukun Lima Tahun 2014-2016 60
Gambar 15. Grafik Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Rukun Lima 61
Gambar 16. Perkembangan Pendapatan Pantai Ende 62
Gambar 17. Grafik Perkembangan Penduduk Di Kelurahan Paupanda Tahun 2014-2016 64
Gambar 18. Panorama Pantai Ana Ho'o 72
Gambar 19. Kondisi Pantai Ende 73
Gambar 20. Informasi Pendakian Gunung Meja 74
Gambar 21. Makam Ibu Amsi 75
Gambar 22. Panorama Pantai Paupanda 76
Gambar 23. Strategi Pariwisata 97
Gambar 24. Kampung Warna Warni Jodipan 98
Gambar 25. Ilustrasi Pemangku Kepentingan 101
Gambar 26. Modal Atraksi 107
Gambar 27. Konsep Pengembangan Wisata Kampung Tematik 115
Gambar 28. Peta Atraksi Wisata di Kecamatan Ende 118
Gambar 29. Rencana Pola Ruang di Kabupaten Ende 127

Gambar 30. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan..... 129
Gambar 31. Contoh Media Promosi Pariwisata..... 141
Gambar 32. Sapta Pesona 144
Gambar 33. Struktur Organisasi Pokdarwis..... 150
Gambar 34. Hubungan Kelembagaan Pariwisata..... 152
Gambar 35. Prinsip Penggunaan Dana Desa..... 154

PROLOG

Kawasan pesisir merupakan wilayah yang menjadi kekayaan alam Indonesia sebagai keunggulan dan simbol identik suatu Negara. Indonesia termasuk Negara Kepulauan terbesar memilik banyak pulau-pulau kecil dan garis pantai terpanjang di Dunia. Secara fisik, panjang garis pantai yang mencapai 95.181 km2, yang menempatkan Indonesia berada diurutan keempat setelah Rusia, Amerika dan Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Luas perairan laut Indonesia sendiri diperkirakan mencapai 5,8 juta km^2 yang terdiri atas wilayah perikanan 3,1 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km^2 (Djoko, 2013:41).

Wilayah Pesisir memiliki potensi sumber daya alam terutama pada sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Dengan kata lain, mayoritas masyarakat di kawasan pesisir berprofesi sebagai mata pencaharian nelayan yang bergantung pada hasil ikan. Secara pengertian nelayan menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang mengartikan bahwa nelayan melakukan aktivitas kesehariannya menangkap ikan. Sedangkan nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat nelayan meghadapi sejumlah permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum dapat teratasi sejauh ini adalah kemiskinan. Para nelayan termasuk masyarakat berpenghasilan yang rendah (MBR) seperti halnya di Wilayah Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende karena rendahnya pendapatan yaitu berkisar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 dalam satu bulan dengan satu rumah berisi 4-10 jiwa, dan kualitas permukiman yang tergolong rendah yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah.

Kehidupan masyarakat nelayan yang bergantung pada alam dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Citra kemiskinan nelayan sudah melekat. Mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dari pada wilayah darat namun belum dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dikawasan pesisir sehingga sulit untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami

nelayan tentunya sangat memprihatinkan karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadi peluang bahwa wilayah laut lebih dapat dimanfaatkan daripada wilayah daratan sehingga diharapkan dapat menjadi tumpuan harapan masa mendatang.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multidimensi didasarkan atas kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang tidak terpenuhi sebagai masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan wilayah lain. Pembangunan ekonomi sangat diharapkan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan SDM yang berkualitas. Dengan demikian, perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun disisi lain, kurangnya kesempatan berusaha masyarakat, rendahnya pendidikan, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung konsumtif menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah dan terjadinya kesenjangan wilayah khususnya daerah pesisir di wilayahTimur. Keanekaragaman sumberdaya alam sebagai negara kepulauan merupakan potensi utama pembangunan tanpa terkecuali Wilayah Indonesia Bagian Timur. Implikasinya adalah sektor pariwisata akan menjadi generator dalam peningkatan perekonomian masyarakatnya. Namun demikian, keadaan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan teoritisnya. Kondisi yang terjadi adalah potensi daerah belum dioptimalkan sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun telah bermodalkan potensi wisata bahari.

Salah satu tantangan kawasan pesisir adalah menentukan penataan ruang yang sinergi dengan struktur pengembangan kota ke arah pesisir perlu dilakukan secara terintegrasi. Tujuannya memperoleh batasan yang tepat dan dapat diterima berbagai pihak yang terkait. Pengelolaan kawasan pesisir sebagai upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan ekologi. Kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir. Berbagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir salah satunya di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten gorontalo dengan program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan program aksi lainnya, tetapi pada evaluasi akhir, hasilnya kurang sesuai dengan harapan dan jauh dari sasaran. Namun, pemerintah belum

memiliki konsep yang matang. Pada penanganan yang masih bersifat parsial dan tidak terpadu. Akibatnya angka kemiskinan belum dapat diturunkan secara signifikan. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya bersifat *top down* dan jarang yang bersifat *bottom up*. Oleh karena itu, perlu dirancang program yang bersifat *bottom up*. Masyarakat pesisir dilibatkan sebagai program pemberdayaan sehingga program yang tersusun benar-benar merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan program dengan melibatkan masyarakat memberikan konsekuensi agar masyarakat berupaya untuk mewujudkan program tersebut hal ini juga akan meningkatkan *sense of belonging* dari masyarakat. Semboyan gotong royong yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

> "Masyarakat pesisir dilibatkan sebagai program pemberdayaan sehingga program yang tersusun benar-benar merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat."

Pemberdayaan masyarakat lebih ditekankan pada meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam agar membangun wilayah dengan mandiri dan bukan pada pembangunan dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat yang tidak berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai pengelolaan sumberdaya alam dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat mulai dari perencanaan, implementasi serta evaluasi sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program.

Paradigma pembangunan sejak dulu lebih menekankan pada pembangunan di perkotaan, sementara wilayah pesisir seolah-olah terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari infrastruktur yang ada di perkotaan dan wilayah pesisir. Sudah saatnya paradigma tersebut diubah dengan memberikan perhatian yang sama

kepada masyarakat pesisir, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir.

Untuk mewujudkan wilayah pesisir yang dapat memberikan manfaat, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi menjadikan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. "Laut adalah masa depan bangsa". Untuk mewujudkan laut yang memberikan kemanfaatan bagi generasi saat ini dan masa depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan visi untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Visi ini yang kemudian diimplementasikan melalui tiga pilar utama, yaitu; kedaulatan (*sovereignity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*). Penerapan tiga pilar terkait dengan peranan dan dukungan pemerintah dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.

Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis untuk dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya alam pesisir dengan mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas menurut penulis adalah dengan mengembangkan wisata kampung tematik berdasarkan karakteristik lokal di kawasan pesisir. Pengembangan kampung adat nelayan sebagai kampung tematik untuk penguatan seni budaya dan berkontribusi terhadap peningkatan sektor pariwisata. Pengembangan kampung tematik tidak hanya menata dari sisi fisik hunian namun juga berkaitan dengan sumberdaya manusianya. Pengembangan kampung tematik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata, seperti kebersihan lingkungan. Di sisi lain, wisata kampung tematik akan berkontribusi terhadap arah pembangunan daerah melalui obyek wisata bahari.

Pariwisata menghasilkan dampak positif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun, pada kenyataannya pariwisata di wilayah pesisir belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Padahal pengembangan potensi wisata pesisir dapat berperan dalam menyelaraskan kehidupan masyarakat dalam menghidupkan perekonomian yang relaif masih termasuk wilayah tertinggal.

Pengembangan pariwisata di wilayah pesisir dapat memanfaatkan tempat atau objek wisata bahari obyek tersebut sebagai daya tarik wisatawan sehingga memotivasi untuk datang ke daerah tersebut. Manfaatnya adalah

menambah pemasukan bagi Pemerintah daerah dalam pengembangannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis sehingga wilayah pesisir memiliki manfaat pula bagi masyarakat di daerah tersebut. Selain strategi dalam pembangunan wilayah pesisir, diperlukan juga keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal. Implikasinya masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ekosistem yang ada. Hal ini sebenarnya menguntungkan bagi kehidupan ekonomi mereka dengan sistem pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah sangat penting dibutuhkan untuk membuat wilayah terus menjadi berkembang dan produktif. Hal ini sangat menjadi fokus utama dalam menjawab persoalan di daerah tertinggal. Pariwisata merupakan bentuk kegiatan pengembangan yang mampu berperan sebagai penggagas stimulant. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pariwisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut Methiesson dan Waill (dalam Ahmad Nawawi, 2013), pariwisata adalah pergerakan manusia yang bersifat sementara ke tujuan-tujuan wisata di luar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilaksanakan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pariwisata merupakan perjalanan ke tempat tertentu yang dilaksanakan untuk sementara waktu. Sebagaimana dapat dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi. Pengembangan wilayah melalui peran pariwisata dapat berimplikasi terhadap pembangunan dan sektor lainnya baik itu positif maupun negatif. Secara tidak langsung kehadiran pariwisata dapat menggerakan sektor perekonomian masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam yang menarik (Musanef, 1995).

Pengembangan industri di kawasan pesisir akan berdampak pada pembangunan sektor lainnya atau *multiplier effect,* baik dampak positif maupun negatif. Hal ini didukung oleh pernyataan Yoeti dalam Primadany & Riyanto (2013) bahwa pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri khas daerah menjadi modal dasar daya tarik pengembangan pariwisata seperti budaya masyarakat pesisir yang mengkombinasikan kehidupan masyarakat baik, di darat maupun di laut (Haryani, 2014).

Dalam prosesnya pariwisata berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Pedoman tersebut memuat konsep, strategi, tahapan progam dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, dalam rangka membangun kesadaraan masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku atau subyek diharapkan mampu menjadi program untuk menanggulangi kemiskinan melalui sektor pariwisata.

Pengembangan wisata akan menjadi tren menarik dimasa depan berdasarkan banyak alasan yang rasional, namun potensi yang bagus akan lebih berhasil jika dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik. Menurut Utama (dalam Rahmayanti dan Pinasti, 2013) minimal ada empat unsur yang harus diintegrasikan, yakni unsur atraksi atau daya tarik wisata, unsur amenitas atau infrastruktur dan fasilitas pendukung, unsur aksesibilitas berupa publik transpotasi yang baik, manajemen transpotasi yang efisien dan efektif. Selanjutnya I Nyoman Erawan (dalam Sholik, 2013) mengemukakan kepariwisataan ditinjau dari segi ekonomi, menurutnya pengaruh ekonomi akibat adanya industri pariwisata mendatangkan devisa serta terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan alternative kegiatan untuk membangkitkan bagi kegiatan lainnya untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian terdapat manfaat yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat mendapatkan pekerjaan yang baik (*good employment*) dan penghasilan meningkat serta produktif. Menghasilkan nilai-nilai (*values*) seperti kegotong-royongan kedalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

BAB 1
URGENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA KAWASAN PESISIR INDONESIA TIMUR

Pembangunan kawasan tertinggal menjadi salah satu prioritas kebijakan dari Pemerintah. Wilayah timur merupakan sasaran dari kebijakan tersebut sebagai bentuk pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus pada Pulau Jawa. Pembangunan sebagai fokus dalam tujuan mengedepankan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Prinsip keadilan sosial merupakan tujuan utama dari pembangunan, selain dari pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan berarti memberikan hak setiap warga masyarakat untuk mengambil peran berdasarkan hak yang sama.

Urgensi dalam membangun pariwisata kawasan pesisir Indonesia di wilayah timur sesuai dengan perwujudan Program Nawacita Pemerintah Presiden Joko Widodo periode 2014 -2019 terutama beberapa poin, yaitu: (1) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (2) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (3) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; dan (4) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir wilayah timur sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dan melimpahnya kekayaan sumberdaya alam.

A. KAWASAN PESISIR: BERLIMPAH POTENSI, MINIM PERHATIAN

Wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Menurut Bengen (2004) menyebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan tumpuan harapan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Oleh sebab itu pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut hendaknya merupakan suatu proses perubahan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan pesisir yang berimplikasi pada pemanfaatan sumberdaya alam perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Tujuannya mengurangi akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan secara menyeluruh.

> “Dalam perencanaan pembangunan pesisir yang berimplikasi pada pemanfaatan sumberdaya alam perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku.”

Regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Definisi dari wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah ini merupakan potensi pengembangan pariwisata. Oleh sebab itu, mayoritas masyarakat pesisir sangat bergantung pada pantai.

Menurut Leijzer & Denman (2013) kawasan pesisir tidak hanya berpotensi pada kegiatan penangkapan ikan saja, tetapi juga aktivitas kepariwisataannya dengan segala atraksi alam. Hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat yang bergantung pada pantai atau aktivitas nelayan, sementara aktivitas tersebut juga sangat tergantung terhadap cuaca (Haryani, 2014). Padahal wilayah pesisir seharusnya memiliki peranan strategis (Salman & Hasan, 2008 dalam Bachri, Stiadi, & Kadir, 2015), antara lain: (a) basis ekonomi wilayah; (b) memiliki kaitan ke belakang dan ke depan terhadap sektor ekonomi di daerah sekitarnya; (c) memiliki efek ganda atau *multiplier effect* dari sektor basis, sektor turunan, dan sektor penunjang; (d) keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah; dan (e) terjadinya *learning process* secara berkelanjutan terutama bagi masyarakat sekitar.

Wilayah pesisir di bagian timur memiliki peranan strategis sebagai basis ekonomi masyarakat. Pembangunan akan menjadi tantangan dalam mengelola potensi daerah. Dalam memaksimalkan potensi alam wilayah pesisir sebagai atraksi pariwisata merupakan model alternatif dalam meningkatkan perekoomian masyarakat. Adapun potensi tersebut, meliputi komponen manusia, biofisik alam, sumberdaya buatan (Infrastruktur), serta bentuk-bentuk kelembagaan termasuk hubungan antara *stakeholder* dengan masyarakat. Dengan demikian, wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Sumber daya manusia merupakan poros pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional, maupun lokal. Strategi pembangunan dengan basis ini dianggap sangat relevan dan cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sejak era 80-an. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat, akan dapat mendorong peningkatan produktifitas ekonomi sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi (Junaidi & Zulgani, 2011).

Pembangunan ekonomi dapat diterapkan melalui pembangunan berkelanjutan yang hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun mendatang. Serta didasari atas pembangunan nasional yang mempunyai tujuan antara lain memberdayakan masyarakat tertinggal dan berpenghasilan rendah,

memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. Kompleksitas dalam pembangunan tidak terlepas dari kemauan para pemangku kebijakan untuk menggerakkan potensi daerah.

Gambar 1 Kondisi Kawasan Pesisir Di Indonesia Timur
Sumber: mongabay.co.id, *diakses pada tanggal 9 Oktober 2019*

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan, yaitu: (1) Kawasan Barat Indonesia, terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Bali; (2) Kawasan Timur Indonesia, terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.Pembagian Indonesia menjadi dua kawasan juga menjadi objek penting dalam pembangunan manusia. Seperti halnya disparitas pembangunan manusia yang terjadi antara wilayah kota dengan kabupaten, disparitas pembangunan manusia juga terjadi antara kawasan barat dan kawasan timur.

Secara umum, capaian pembangunan manusia di kawasan barat lebih maju dibandingkan dengan capaian di kawasan timur. Pada tahun 2018, sebanyak 24 kabupaten/kota (8,5 persen) yang berada di kawasan barat telah mencapai status pembangungan manusia “sangat tinggi”, sedangkan

di kawasan timur baru mencapai 5 kabupaten/kota (2,1 persen). Selain itu, masih terdapat 26 kabupaten/kota (11,2 persen) di wilayah timur yang masih berstatus “rendah”, sementara hal ini tidak dijumpai di wilayah barat. Sebagian besar kelompok yang berstatus rendah berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

> “Pada tahun 2018, sebanyak 24 kabupaten/kota (8,5 persen) yang berada di kawasan barat telah mencapai status pembangungan manusia “sangat tinggi”, sedangkan di kawasan timur baru mencapai 5 kabupaten/kota (2,1 persen).”

Pada tahun 2018, IPM kabupaten/kota tertinggi di kawasan barat telah mencapai 86,11 dan IPM terendah 60,28. Sementara di kawasan timur, IPM kabupaten/kota tertinggi mencapai 82,22 dan IPM terendah adalah 29,42. Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan manusia di kawasan timur lebih tinggi dibandingkan kawasan barat.Disparitas yang cukup tinggi ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah hal yang sangat perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata, karena upaya pemerataan pembangunan sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mewujudkannya.Selama kurun waktu 2010 hingga 2018, terjadi kemajuan pembangunan manusia di kawasan barat dan timur. Meski dari sisi capaian kawasan barat lebih unggul, namun penurunan disparitas pembangunan manusia di kawasan ini cenderung lebih lambat. Selisih IPM tertinggi dan terendah di kawasan barat turun dari 28,23 pada tahun 2010 menjadi 25,83 pada tahun 2018. Sebaliknya. penurunan disparitas pembangunan manusia di kawasan pesisir.

Tabel 1. Profil IPM Indonesia Menurut Kawasan Barat dan Timur, 2018

NO.	KATEGORI IPM	KAWASAN	
		BARAT	TIMUR
1.	Sangat tinggi IPM ≥ 80	8,5% 24 Kabupaten/Kota	2,1% 5 Kabupaten/Kota
2.	Tinggi 70 ≤ IPM < 80	38,7% 109 Kabupaten/Kota	23,3% 54 Kabupaten/Kota
3.	Sedang 60 ≤ IPM < 70	52,8% 149 Kabupaten/Kota	63,4% 147 Kabupaten/Kota
4.	Rendah IPM < 60		11,2% 26 Kabupaten/Kota

Sumber: BPS, 2018

Wilayah timur cenderung lebih cepat meskipun disparitas di wilayah timur hampir dua kali lipat dibanding wilayah barat. Pada tahun 2010, perbedaan capaian IPM tertinggi dan terendah di kawasan timur mencapai 58,51. Sementara pada tahun 2018, perbedaan tersebut turun menjadi 52,80. Dimensi pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak juga mengalami perkembangan baik di kawasan barat maupun kawasan timur. Diantara ketiga dimensi, disparitas pendidikan dan pengeluaran tercatat semakin lebar dari tahun ke tahun, baik di kawasan barat maupun kawasan timur. Upaya pemerataan pencapaian pembangunan antar kawasan sebetulnya sudah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan berusaha menghilangkan/ memperkecil disparitas yang ada, baik disparitas antarkelompok pendapatan maupun disparitas antar wilayah dengan prioritas:

Gambar 2. Prioritas Pembangunan
Sumber: RPJMN Tahun 2015

Pada prioritas pembangunan kawasan timur menjadi prioritas yang semestinya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dalam hal ini, kawasan timur lebih cenderung terhadap wilayah tertinggal dalam wilayah pesisir. Orientasi pembangunan pada masa lalu lebih difokuskan pada wilayah daratan (*mainland*) dan belum diarahkan ke wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Masih rendahnya kesadaran, komitmen dan *political will* dari Pemerintah dalam mengelola pesisir inilah yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan potensi wilayah tersebut.

Adanya ketimpangan pembangunan antara daratan dengan daerah pesisir merupakan salah satu "momok" yang masih menghantui pemerintah Indonesia hingga saat ini. Ketimpangan pembangunan yang terjadi mengakibatkan roda perekonomian di daerah, termasuk desa pesisir, menjadi tidak berkembang dan berkelanjutan.

B. HAK RUANG HIDUP MASYARAKAT PESISIR

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai. Pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme

pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di satu sisi, dalam pelaksanaannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.

Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan. Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Sebagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana

Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan kepada Setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pembangunan pariwisata menjadi salah satu bentuk menjamin fungsi dan pemanfaatan dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang optimal dan berkelanjutan. Kegiatan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil harus ditekankan pada upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian wilayah tersebut. Rencana tata ruang merupakan dokumen rambu-rambu yang merupakan salah satu faktor yang dapat menghindarkan maupun mengantisipasi permasalahan permasalahan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diusahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir. Mencermati hal tersebut maka ada 2 (dua) konsep perumusan tentang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, yaitu: *pertama,* segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial hak-hak dan masyarakat di wilayah pesisir yang sesuai denga kepentingan dan hak-haknya. *Kedua,* segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk

pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

> "Pembangunan pariwisata menjadi salah satu bentuk menjamin fungsi dan pemanfaatan dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang optimal dan berkelanjutan. Kegiatan pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil harus ditekankan pada upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian wilayah tersebut."

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 17-19 (hak untuk memperoleh keadilan), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan). Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penulisan ini membatasi pemenuhan hak-hak tersebut dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, yaitu: hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Undang-undang sudah mengatur dengan jelas hak dasar manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya, dalam hal ini keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya dalam pengertian fisiologis saja tetapi juga terhadap harta benda. Faktor fisiologis mencakup lingkungan,

instrumental, dan individual. Lingkungan adalah tempat dimana masyarakat beradaptasi terhadap sekitarnya, tetapi banyak masyarakat yang tidak merasakan hidup yang lebih aman, karena adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu yang membuat kekacauan sehingga mengakibatkan tidak adanya rasa aman terhadap masyarakat sekitar.

Faktor instrumental ini adalah alat yang akan mengakibatkan ketidak-amanan dalam kehidupan sosial. Masyarakat dengan tanah yang didiaminya terdapat hubungan yang sangat erat. Bahkan demikian eratnya hubungan dengan tanah tak jarang memiliki sifat religio magis. Hubungan ini menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah. Mengingat pentingnya kedudukan tanah bagi masyarakat adat, maka setiap masyarakat adat sudah tentu mempunyai cara pengaturan tentang tanah. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hal ini kawasan pesisir termasuk ke dalam kawasan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan. Pada pasal 1 menerangkan bahwa kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan bencana. Kemudian lebih lanjut Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kawasan nelayan mencakup pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini dilakukan agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan *utilitas* umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Di samping itu, dilakukan pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga

negara untuk menempati, memiliki, dan/atau menikmati tempat tinggal, yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Gambar 3 Potret Kawasan Pesisir Timur
Sumber: news.kkp.go.id

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Perwujudan hak hidup bagi masyarakat pesisir juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi *(to protect),* menghormati *(to respect),* dan memenuhi *(to fulfil)* hak-hak dasar warga negaranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru masih menjadi isu dan masalah strategis. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agrarian dan sumber daya alam).

Indonesia sebagai Negara hukum, termasuk kategori Negara hukum modern. Konsepsi Negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan Negara yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Normalisasi tujuan Negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi *(to protect),* menghormati *(to respect),* dan memenuhi *(to fulfil)* hak-hak dasar warga negaranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru masih menjadi isu dan masalah strategis."

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial.

Atas dasar itu pula, tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterkaitan hak penguasaan Negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Abrar Saleng (2004: 17) akan mewujudkan kewajiban Negara:

(1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
(2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;
(3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Artinya secara *a contrario*, apabila hak penguasaan Negara diartikan sebagai *eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara untuk kondisi Indonesia dapat diterima dengan beberapa kajian kritis sebagai berikut (Abrar Saleng, 2004 : 18-19) :

Pertama, hak penguasaan Negara yang dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 memposisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi Negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumberdaya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus. Karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh Negara.

Kedua, hak penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD 1945, membenarkan Negara untuk mengusahakan sumberdaya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public service atas dasar pertimbangan: filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha

bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian Negara), ekonomi (efisien dan efektifitas) dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Khusus berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya laut maka dapat dijelaskan bahwa paling sedikit terdapat tiga ciri dari kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang dipraktekkan selama ini, yakni (1) sentralistik, (2) didasarkan pada dokrin *common property* dan (3) mengabaikan pluralism hukum. Sentralistik kebijakan menyangkut substansi sekaligus proses pembuatannya. Substansi kebijakan yang sentralistik tercermin pada kewenangan pengelolaan sumberdaya laut, setidak-tidaknya hak itu terjadi disektor perikanan. Disektor ini, proses perizinan maupun pejabat yang berwenang memberikan hampir seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kalaupun ada pendelegasian kewenangan kepada gubernur, hal itu semata-mata dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Proses penetapan sentralistik kebijakan, hampir semuanya melibatkan pemerintah pusat. Indikasinya, kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut pada umumnya dikemas dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden yang dalam proses penetapannya semata-mata melibatkan aparat pemerintah pusat. Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang diasarkan pada *common property* sebagai ciri kedua juga mengandung sejumlah kelemahan. Dengan mendasarkan kebijakan pada *doktrin common property* maka laut diposisikan sebagai sumberdaya milik bersama. Konsekuensinya, laut diperlakukan laksana harta tak betuan dimana setiap orang leluasa melakukan okupasi dan eksploitasi (*open access*). Karakteristik seperti ini sangat jelas dalam undang-undang perikanan dan kebijakan lainnya. Ini pula yang melatarbelakangi munculnya berbagai konflik dalam penggunaan sumberdaya terutama antara nelayan tradisonal dengan perusahaan penangkapan ikan.

Sebagai dasar pembentukan kebijakan pengelolaan laut, *dokrin common property* sesungguhnya mempunyai banyak kelemahan. Menurut Francois T Christy (dalam Jantje: 2013) mengungkapkan adanya empat akibat buruk dari suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang didasarkan pada *dokrin common property* yaitu (a) pemborosan sumberdaya secara fisik; (b) inefisiensi secara ekonomi; (c) kemiskinan

nelayan; dan (d) konflik antara pengguna sumberdaya. Sementara pengabaian pluralism hukum, yang merupakan ciri ketiga dari kebijakan pengelolaan laut selama ini, menjelama dalam bentuk ketiadaan pengakuan terhadap sistem pengeloaan sumberdaya laut berdasarkan hukum adat. Padahal secara faktual sistem pengelolaan semacam itu masih dipraktekkan di berbagai daerah.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam UUPA diatur mengenai hak menguasai oleh Negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga diatur hak ulayat, hak-hak atas tanah, dan hak atas air.

(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang nomor 15 Tahun 1990 tersebut lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumberdaya alam. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian

sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang ini terkesan lebih menitik beratkan perhatian pada eksploitasi dari pada kelestarian sumberdaya tambang. Di dalam undang-undang ini hanya terdapat satu pasal perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan.

(5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkunganhidup akibat pemanfaatan ruang.

Kaidah penataan ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap prosesperencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdayaguna, dan berkelanjutan.

Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan,keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi,sosial, budaya, dan

lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

> "Upaya mewujudkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat melalui kewenangan negara juga dilakukan dalam mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir."

Upaya dalam mewujudkan cita-cita besar yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Republik Indonesia, maka Negara sudah sepatutnya memanfaatkan sumber daya yang ada. Upaya mewujudkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat melalui kewenangan negara juga dilakukan dalam mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

C. PERAN NEGARA DI TENGAH MASYARAKAT PESISIR

Masyarakat Pesisir mendiami daerah perbatasan pulau di Indonesia pada hakikatnya mendapatkan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh Negara. Dalam hal ini Negara sebagai aktor pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam cita-cita Negara pada Pembukaan UUD Negara 1945 alenia ke-4 yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dalam bunyi UUD tersebut bahwa peran Negara melalui pemerintah sangat penting dalam memberikan kebijakan-kebijakan serta program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tanpa membuat masyarakat menderita.

Tujuan Negara sejatinya merupakan cita-cita leluhur yang diwariskan sampai saat ini untuk dijalankan dengan baik. Hal ini bahwa cita-cita tersebut merujuk pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa membedakan wilayah, suku ras dan agama. Maka, masyarakat yang

tinggal di kawasan pesisir juga selayaknya diperjuangkan untuk mendapatkan kesejahteraan. Masyarakat pesisir yang mayoritas tinggal dalam kondisi kemarjinalan, ironisnya kawasan ini sangat menentukan arah pembangunan Indonesia yang perlu menjadi prioritas utama.

Masyarakat pesisir saat ini banyak yang terancam akan kehilangan ruang penghidupannya di laut dalam mengelola sumber daya kelautan yang dimiliki. Agar masyarakat pesisir bisa tetap bertahan hidup dengan rasa aman dan nyaman, peran Negara semestinya dapat memberdayakan masyarakat, dan sekaligus menjamin hak-hak konstitusional masyarakat agar keluar dari rantai kemiskinan. Proses tersebut, diyakini bisa memberi kekuatan untuk masyarakat pesisir dalam menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Namun, pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah pesisir belum dapat dikelola dengan optimal. Berikut isu pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir:

1. Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, erosi/abrasi pantai yang merusak ekosistem pesisir dan laut
2. Reklamasi wilayah pesisir yang belum sesuai dengan aturan.
3. Rendahnya produksi dan kualitas garam rakyat;
4. Belum dilakukan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara optimal;
5. Kemiskinan masyarakat di wilayah Pesisir.

Untuk permasalahan status kawasan pesisir sebagai zona rawan bencana alam seperti banjir dan tsunami, maka selayaknya negara berupaya dalam memitigasi ketika terjadinya bencana tersebut. Salah satu upaya komprehensif yang bisa dilakukan oleh negara, antara lain: pembuatan prasarana, sarana pengendalian serta penciptaan dan penegakan peraturan yang memperhatikan kawasan pesisir (Pramudji, 2002). Untuk tindakan preventif, negara dapat pula memberikan instruksi kewajiban pembuatan sumur resapan, peningkatan dan pemeliharaan saluran buangan, penanganan sampah secara terpadu, reboisasi, serta penertiban tata ruang. Di sisi lain, perhatian pula terhadap mempertahankan *green belt* dengan cara penanaman dan menjaga kelestarian hutan mangrove.

Pada dasarnya ketidakhadiran Negara bisa dilihat saat proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang masih belum mempertimbangkan dan memasukan kepentingan masyarakat pesisirmandat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Permasalahan serius yang dihadapi masyarakat pesisir yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu permasalahan yang bersumber dari alam, permasalahan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, dan permasalahan sosial ekonomi politik.

Pembangunan Indonesia menjadi prioritas pemerintah dalam membangun wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah miskin dan tertinggal. Hal ini menjadi program agenda perioritas Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019 pada Program Nawacita yang salah satunya adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" (Nawacita ke-3). Hal ini jelas bahwa wilayah-wilayah pinggiran dan daerah terpencil yang salah satunya sebagai wilayah pesisir di bagian timur menjadi prioritas utama dalam membangun Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan di sektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Hal ini sebagai upaya dalam mengambil langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pesisir. Selain itu, terdapat pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perpres ini menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur. Namun demikian, kondisi di lapangan khususnya di daerah Timur acap kali belum sesuai dengan tujuan dilahirkannya instruksi presiden maupun peraturan presiden yang ada. Padahal kawasan pesisir merupakan salah satu bagian wilayah kedaulatan Indonesia.

Pada dasarnya masyarakat di kawasan pesisir mengharapkan perubahan, yaitu kehidupan yang nyaman, aman, damai, dan tenteram. Terlepas dari kehidupan serba keterbatasan menjadi impian semua orang termasuk masyarakat pesisir. Dalam hal ini perubahan yang

dimaksud lebih penekanan pada tatanan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, perlu perubahan paradigma, misalkan dari permukiman masyarakat di kawasan pesisir yang kerap dipandang dengan kekumuhan maka bergeser pandangan menjadi sebuah potensi dengan sedikit sentuhan. Pembangunan mutlak dilakukan untuk membuat segudang perubahan di kawasan pesisir. Secara harfiah, pembangunan sebagai bentuk progres tentu ke arah yang lebih baik. Pemanfaatan SDA di kawasan pesisir beserta kondisi tatanan permukiman masyarakat bisa menjadi modal perubahan melalui wadah kegiatan pariwisata yang dipandu oleh negara.

Gambar 4. Permukiman Nelayan Tepi Laut
Sumber: dokumentasi penulis, 2017

Berbagai penelitian menyatakan bahwa dengan meningkatkan kegiatan pariwisata di kawasan pesisir akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini juga diungkapkan oleh Kreishan (2010) dan Durbarry (2004) dalam Ekanayake & Long (2012) bahwa sektor pariwisata memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik skala kecil maupun besar. Meskipun dampak pariwisata tersebut akan dirasakan dalam jangka panjang maupun pendek, hal ini terlepas dari dampak pariwisata terhadap perekonomian. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana negara mendukung

kegiatan pariwisata sehingga kegiatan tersebut akan selalu mengundang minat kunjung wisatawan.

D. PARIWISATA SEBAGAI PELUANG PERUBAHAN KAWASAN PESISIR

Pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan ekonomi di dunia yang tumbuh paling cepat (Filion et al., 1994). Bahkan, menurut Kerr (2003) industri pariwisata merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di abad ini dan masih akan bertahan sampai abad mendatang. Pemerintah di beberapa negara berkembang seperti Indonesia menganggap pariwisata sebagai mesin untuk menciptakan modernisasi. Pariwisata diharapkan berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi (Dahles, 1998). Pembuat kebijakan meyakini bahwa pariwisata dapat menjaga keberlanjutan perekonomian regional, menarik minat investasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan untuk mengentaskan kemiskinan (Puppim de Oliveira, 2003).

Daya saing pariwisata Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara ASEAN lain. Indeks daya saing pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara di tahun 2015. Sementara itu, Singapura dan Malaysia jauh di atas, masing-masing menempati peringkat 11 dan 25. Dari 14 sub sektor yang dinilai dalam indeks daya saing pariwisata, Indonesia mencatat peringkat yang rendah dalam hal infrastruktur layanan wisata, kesehatan dan higienis serta keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Indeks daya saing pariwisata Indonesia dalam infrastruktur penerbangan, jalan dan pelabuhan masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Thailand dan Malaysia (World Economic Forum, 2015). Hal inilah yang mendasari perlunya peningkatan daya saing pariwisata di masing-masing daerah di Indonesia.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, daya saing sektor pariwisata dianggap penting bagi pembangunan ekonomi suatu daerah. Pariwisata di suatu daerah harus dipandang sebagai aset yang mampu meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) masyarakatnya. Mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Schafner, 2014). Dengan demikian, penting bagi pemerintah suatu daerah untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisatanya agar perekonomian daerah tersebut tumbuh dan

masyarakatnya sejahtera. Pengembangan sektor pariwisata selalu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Tidak hanya berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, namun demikian meningkatkan pendapatan untuk pemerintah lingkup desa dan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, pariwisata dikatakan efektif mampu meningkatkan dimensi ekonomi bagi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap literatur yang ada, sektor pariwisata selalu mampu meningkatkan ekonomi tetapi tidak seimbang dengan kondisi sosial dan lingkungan.

Salah satu contohnya dikatakan bahwa pengembangan pariwisata memberikan perubahan, berupa pergeseran kondisi sosial terutama berkaitan dengan mata pencaharian penduduk. Pada awalnya hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan sekarang masyarakat lebih fokus pada pelayanan jasa dan perdagangan sebagai pelayanan amenitas bagi wisatawan. Namun demikian, pengembangan pariwisata juga berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat, yaitu semakin harmonis dan eratnya kerukunan serta kerjasama dalam mengelola obyek wisata. Misalkan saja, dorongan untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sehingga masyarakat secara mandiri mampu menciptakan kreatifitas dalam pengelolaan obyek wisata.

Di samping itu, gencarnya pembangunan pariwisata tentu berdampak pula pada dimensi lainnya, yaitu keseimbangan lingkungan. Hal ini tentu berkaitan dengan strategi eksplorasi dari pengembangan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Perencanaan matang dan memitigasi terhadap dampak lingkungan merupakan tantangan dalam pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu, harus terjalin keharmonisan dan keterpaduan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk keberlanjutan dari eksistensi pariwisata itu sendiri.

Umumnya kawasan pesisir lebih cenderung dikembangkan pada kegiatan perdagangan yang mampu mensejahterakan nelayan. Pembangunan infrastruktur wilayah pesisir dapat berupa pelabuhan dan jalan dan sarana prasarana lainnya guna mendukung percepatan pembangunan dan lokomotif perekonomian, seperti pelabuhan-pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Hal ini ditujukan untuk memudahkan nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya sebagai antisipasi

adanya ketidakberdayaan nelayan terhadap kekuasaan tunggal dari tengkulak.

Di samping pengembangan kawasan pesisir yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan simpul perdagangan, kawasan tersebut juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Wilayah pesisir memiliki sejumlah potensi wisata lainnya yang dapat dikatakan cukup beragam dan dikembangkan sebagai wisata unggulan alternatif, antara lain: wisata keindahan alam pantai, *diving, snorkeling,* selancar, wisata pancing, wisata hutan bakau atau mangrove, dan wisata penangkaran ikan. Bahkan saat ini telah banyak pengembangan kawasan pesisir sebagai wisata kota pesisir baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi kesuksesan dalam penyelenggaraan kota pesisir (Iswandi, 2015), yaitu: (1) lokasi dan waktu; (2) aksesibilitas masyarakat; (3) kewajiban dan tanggungjawab; (4) isu-isu lingkungan; (5) fasilitas kota pesisir; (6) karakter kawasan kota pesisir; (7) perancangan/desain kawasan kota pesisir; (8) edukasi/interpretasi; dan (9) ruang publik.

Kawasan pesisir memiliki berbagai potensi alam yang mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan alam dan hasil kekayaan lautnya dapat menjadi sumber roda perekonomian bagi kehidupan masyarakat. Kawasan pesisir memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat pesisir, sekitarnya, bahkan skala nasional. Namun demikian, kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam di kawasan pesisir justru memberikan ancaman serius bagi, misalnya naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global (Iswandi, 2015). Oleh sebab itu, pengembangan kawasan pesisir yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya.

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap pengembangan wisata pesisir, maka pendekatan ekowisata menjadi salah satu solusinya. Menurut Sudiarta (2006), ekowisata merupakan salah satu produk pariwisata alternatif yang mempunyai tujuan seiring dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pembangunan pariwisata yang secara ekologis memberikan manfaat yang layak secara ekonomi dan adil secara etika, memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian kehidupan

sosial budaya, dan memberi peluang bagi generasi muda sekarang dan yang akan datang untuk memanfaatkan dan mengembangkannya. Dengan demikian konsep ekowisata ini tidak hanya memprioritaskan pemanfaatan potensi wisata untuk kegiatan ekonomi saja namun juga melihat keberlanjutan dari sisi lingkungan dan pemanfaatan di kemudian hari.

E. *LESSON LEARNED* PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN PESISIR

Penerapan konsep pengembangan pariwisata sebagai model percontohan yang kemungkinan dapat diterapkan di Indonesia. Namun hal ini tentu disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah Indonesia dengan negara-negara yang berhasil mengelola sektor pariwisata dengan baik. Pariwisata sebagai ikon yang dapat memperkenalkan suatu negara pada negara lain untuk mendatangkan turis mancanegara sehingga menyumbang devisa untuk Negara dan Penghasilan Asli Daerah (PAD) setempat. Sejauh ini, negara lain mengenal salah satu pariwisata terbaik di Indonesia adalah Bali. Bali dengan memiliki kekayaan alamnya berhasil mendatangkan wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri.

Pulau Bali sangat dikenal di dunai internasional sebagai citra pariwisata yang sangat indah. Mayoritas ekonomi diwilayah tersebut digerakkan oleh pariwisata sehingga di daerah tersebut perekonomian meningkat akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung. Berikut data Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali per Bulan, 2015-2018:

Tabel 2 Kunjungan Wisatawan Domestik ke Bali per Bulan

	2015	2016	2017	2018
Januari	528 506	597 558	658 308	743 456
Februari	483 221	513 852	520 462	655 719
Maret	503 311	576 438	618 834	762 622
April	528 668	534 395	705 710	777 287
Mei	651 089	647 790	646 467	682 521
Juni	571 646	1 035 563	659 718	1 156 151

Juli	799 765	1 084 950	890 368	906 347
Agustus	641 684	704 662	790 323	770 364
September	557 081	725 240	832 026	774 144
Oktober	619 599	685 244	732 720	762 124
November	529 381	655 962	741 649	806 397
Desember	733 149	882 026	939 048	960 859
	7 147 100	**8 643 680**	**8 735 633**	**9 757 991**
	11.77	**20.94**	**1.06**	**11.70**

Sumber: BPS, 2018

Dari data di atas bahwa dalam 4 tahun terakhir di tahun 2018 jumlah wisatawan tiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup baik. Data terakhir ditahun 2018 sebanyak 9.757.991 wisatawan berkunjung ke pariwisata yang ada di Bali. Dengan ini bahwa berhasilnya fokus pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang bermodalkan potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Bali mengembangkan Pariwisata dengan mengangkat budaya kearifan lokal suatu Daerah. Contoh pembelajaran pariwisata yang ada di Bali adalah Pantai Pandawa.

Gambar 5 Pantai Pandawa
Sumber: simphortour.com, *diakses pada tanggal 23 Oktober 2019*

Pariwisata memiliki kekuatan dalam pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan *Community-Based Tourism* desa adat kutuh pantai pandawa mendirikan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) sebagai payung besar manajemen aktivitas bisnis desa dengan membawahi beberapa unit bisnis, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Manajemen Pantai Pandawa, Unit Barang dan Jasa, Unit Transportasi, Piranti Yadnya, Pengamanan Terpadu, Pelayanan Kesehatan, dan lainnya. Unit-unit bisnis ini merupakan strategi integrasi yang saling berkoordinasi atas segala aktivitas perekonomian dalam rangka menekan angka kebocoran akibat aktivitas pariwisata di Pantai Pandawa. Unit-unit bisnis inipun menjadi sebuah serapan tenaga kerja untuk menempati pos-pos kolaborasi unit bisnis tersebut. (Sindhu, 2017).

Potensi dan peluang dalam mengembangkan pariwisata harusnya dapat menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini telah menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yaitu pariwisata pesisir selatan di Yogyakarta. Salah satu pantai yang diminati banyak pengunjung adalah Pantai Depok. Sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Aktivitas pariwisata, perikanan dan kegiatan lainnya dikendalikan oleh Koperasi Wisata Mina Bahari 45 (Nawawi A, 2013). Koperasi ini menjadi pengendali dan pengontrol seluruh aktivitas yang ada di Pantai Depok. Anggota koperasi ini terdiri dari nelayan dan pedagang–pedagang yang ada di Pantai Depok. Selain tergabung dalam koperasi tersebut terdapat juga masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina bahari 45. KUB Mina Bahari 45 terdiri dari pengusaha-pengusaha pengolah ikan, pengusaha warung makan, penjual ikan dan usaha-usaha lainnya.

> “Pariwisata pada saat ini menjadi tren yang menarik untuk dikembangkan. Perannya sangat penting dalam mendongkrak perekonomian suatu wilayah, terutama berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.”

Deretan pantai yang ada di sepanjang pesisir selatan DIY menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk datang ke sana. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ramainya kunjungan wisatawan ke Pantai Depok. Deretan pantai yang ada di sekitar Pantai Depok antara lain Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo dan Pantai Pelangi. Dukungan pemerintah setempat juga sangat tinggi dalam pengembangan obyek wisata di Pantai Depok. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya festival tahunan yang diselenggarakan di Pantai Depok antara lain *Jogja International Air Show* dan Festival Perahu Naga. Penyelenggaraan *event* tahunan tersebut mampu menarik banyak wisatawan untuk datang ke Pantai Depok.

Cerita keberhasilan pengelolaan wisata pesisir dapat dilihat dari Kawasan Pesisir Pantai Trisik-Pantai Glagah-Pantai Congot-Hutan Mangrove di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan analisis sistem pariwisata, pangsa pasar wisatawan di kawasan wisata tersebut adalah para pecinta alam, pecinta masakan *seafood,* penggemar foto *selfie,* dan pemancing. Untuk aspek perjalanannya sangat mudah diakses dari arah Kota Yogyakarta melalui jalur selatan maupun Jalan Yogyakarta-Wates/Purworejo, sementara dari arah Kabupaten Purworejo dapat diakses melalui jalur Jalan Yogyakarta-Purworejo. Kondisi akses menuju daerah tujuan wisata juga terbilang baik meskipun untuk hutan mangrove dari jalan utama, kapasitas jalan hanya bisa diakses untuk 1 mobil. Namun demikian, untuk mempermudah wisatawan terdapat usaha ojek yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Untuk destinasi atau tujuan wisata terdapat beberapa atraksi, yaitu potensi wisata unggulannya pantai, wisata kuliner *seafood,* Pelabuhan Tanjung Adikarto, wisata hutan mangrove yang dipenuhi dengan berbagai spot berfoto ria, perahu/kapal wisata, kolam renang untuk anak-anak, penginapan, pos keamanan, dan warung-warung penjual cinderamata atau oleh-oleh. Sementara untuk pemasaran, obyek wisata pesisir di Kabupaten Kulon Progo melalui media massa, baik koran, majalah, televisi, radio, internet (web Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, web blogger, web obyek wisata yang dikelola oleh pengurus/pengelola oleh komunitas, dan review dari wisatawan dalam berbagai media sosial, seperti instagram, facebook, twitter, path, dan sebagainya). Anggapan dari wisatawan yang dilansir dalam berbagai artikel, banyak ditemukan sambutan positif

terhadap berbagai atraksi dan fasilitas di kawasan pesisir wisata di Kabupaten Kulon Progo tersebut. Namun demikian, tak sedikit pula yang memberikan masukan untuk mengadakan penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanannya.

Untuk pembiayaan dalam pembangunan wisata pesisir di Kabupaten Kulon Progo dapat bersumber dari berbagai aktor, seperti APBN Kabupaten Kulon Progo, CSR perbankan (BRI), swadaya masyarakat atau komunitas, masukan retribusi bagi para pelaku usaha di daerah obyek wisata, dan retribusi masuk obyek wisata oleh wisatawan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor yang akan menanamkan sahamnya ke obyek wisata.

Gambar 6. Atraksi Buatan Di Hutan Mangrove Kabupaten Kulon Progo
Sumber: dokumentasi penulis, 2017

Pariwisata pada saat ini menjadi tren yang menarik untuk dikembangkan. Perannya sangat penting dalam mendongkrak perekonomian suatu wilayah, terutama berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pariwisata dalam mata dunia sangat menguntungkan bagi suatu negara untuk dapat mendatangkan turis-turis berkunjung ke negaranya sebagai sumbangsih devisa negara.

Berbeda lagi sektor pariwisata di Negara Thailand yang memiliki potensi alam yang cukup menarik. Adapun potensi alam yang dimaksud diantaranya: 1) memiliki variasi bentang alam yang seragam; 2) wilayahnya relatif subur karena banyak terdapat gunung api dan lembah-lembah sungai; 3) kaya akan hasil pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil hutan, seperti padi, jagung, tebu, umbi-umbian, buah-buahan tropis, karet, cengkih, kopra, dan berbagai jenis kayu (terutama kayu jati dan kayu besi); 4) memiliki potensi peternakan yang besar, terutama ternak babi dan kerbau; dan 5) memiliki pantai yang indah dan perairan di kawasan teluk yang tenang.

Otoritas Pariwisata di Thailand adalah *Tourism Authority of Thailand* (TAT) strategi TAT untuk menarik wisatawan keluarga dengan membuat atraksi baru yang cocok untuk keluarga, insentif untuk paket wisata keluarga, kemudian mengembangkan pasar wisatawan muslim dengan memperbanyak fasilitas dan informasi yang ramah terhadap wisatawan.

Gambar 7. Pantai Pattaya Thailand
Sumber: klook.com, *diakses pada tanggal 10 Oktober 2019*

Salah satu langkah yang bisa ditempuh dalam rangka pengembangan objek wisata di Kawasan Pattaya adalah dengan analisis SWOT, yakni mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki masing-masing objek. Hasil analisis SWOT pada akhirnya dapat dirumuskan strategi perencanaannya. Analisis SWOT dapat disesuaikan dengan kebijakan perencanaan pengembangan kepariwisataan di Kawasan Pattaya yang mencakup beberapa aspek diantaranya adalah aspek objek

wisata, sistem transportasi, tata ruang, sarana penunjang wisata (akomodasi), pemasaran wisata, industri penunjang wisjata, kelembagaan/pengelolaan, investasi, dan kebijakan. Menurut Maneewit (2017) strategi dalam pengembangan pariwisata sebagai berikut:

a. Strategi Umum Pengembangan Pariwisata:
    1) Peningkatan kualitas obyek, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
    2) Peningkatan upaya promosi wisata di Kawasan Pattaya dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta serta instansi terkait, sehingga pemasaran wisata yang ada akan lebih terpadu dan terarah.
    3) Peningkatan intensitas event wisata yang atraktif sehingga wisatawan lebih tertarik berkunjung.
    4) Pembentukan perwilayahan dengan tujuan wisata guna mengintensifkan pembangunan di sektor kepariwisataan yang akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
b. Strategi pengembangan sarana wisata:
    1) Pemerataan sarana wisata ke seluruh wilayah Kawasan Pattaya sesuai dengan hierarki kota.
    2) Peningkatan kualitas sarana wisata karena pada dasarnya kegiatan wisata mengutamakan kenyamanan, diharapkan dengan peningkatan kualitas, wisatawan akan lebih lama tinggal di Kawasan Pattaya.
    3) Menjalin kerja sama dengan biro perjalanan wisata untuk menjaring wisatawan agar dapat memanfaatkan sarana wisata yang ada.
c. Strategi Pengembangan Pemasaran Wisata:
    1) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperpanjang lama kunjungan, antara lain meliputi: peningkatan sarana berbelanja, atraksi wisata dan peningkatan industri kerajinan tangan.
    2) Menggunakan lokasi-lokasi yang sudah ada dan mapan sebagai poros pembangunan paket-paket wisata yang baru.
    3) Mendukung berbagai pola perjalanan melalui promosi yang menarik.
    4) Bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait.

5) Mengembangkan potensi wisata desa melalui pemanfaatan potensi Lembaga Kerajinan Tangan Swasta.
6) Mengupayakan usaha-usaha pemasaran ke luar negeri melalui kerjasama dengan instansi terkait.

Untuk mendukung strategi pemasaran di atas, perlu upaya-upaya yang meliputi:

a. Pengembangan Perjalanan Wisata

Pengembangan ini dilakukan dengan paket wisata dan memanfaatkan poros-poros yang berpotensi dan obyek-obyek wisata utama. Paket tersebut tidak dibedakan antara wisama dan wisnus, tetapi ditawarkan paa semua wisatawan. Prioritas tawaran, alternatif rangkaian perjalanan dan pembiayaan yang berbeda akan menambah daya tarik.

b. Pengembangan Wisata Desa Pesisir

Agar pariwisata dapat berperan dalam meningkatkan dan memeratakan manfaat ekonomis, maka sumber daya pesisirperlu dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang bertumpu pada kemungkinan kunjungan, pembelanjaan dan pengembangan kerajinan pedesaandi pesisir pantai.

c. Pengembangan Pasaran Seminar dan Konferensi

Saat ini terdapat kecenderungan untuk mengadakan seminar atau konferensi pada obyek-obyek wisata. Para wisatawan seminar dan konferensi ini cenderung untuk berbelanja dengan angka pengeluaran yang cukup tinggi, oleh karena itu perlu untuk mempertimbangkan pengadaan atraksi yang menarik.

d. Pengembangan Event Tertentu sebagai Atraksi Wisata

Aset wisata yang tersedia sangat beragam dan banyak yang saling berulang. Oleh karena itu perlu untuk mengorganisasikan peristiwa-peristiwa penting tersebut dan merangkum dalam perencanaan atraksi budaya. Dalam perencanaan tersebut perlu untuk mengatur tingkat promosi sesuai dengan kepentingan peristiwa tersebut. Pemasaran untuk pengembangan wisata tersebut adalah mengatur paket promosi secara komprehensif jauh sebelum peristiwa berlangsung.

e. Peningkatan Pendukung Pemasaran Obyek Wisata

Strategi pemasaran bertujuan untuk memanfaatkan obyek wisata sehingga manfaat ekonomisnya dapat dimanfaatkan dengan cepat dan terdistribusi secara merata. Untuk menjamin strategi tersebut dapat dipertahankan, perlu pembenahan kelembagaan. Lembaga ini berperan secara sentral dalam mempelopori, mengelola dan melestarikan perkembangan pariwisata. Peran lembaga tersebut dalam pemasaran adalah melestarikan mutu pengalaman pengunjung, menjamin keaslian produk dan peristiwa, memantau perkembangan untuk mencegah terjadinya

Berbeda dengan negara Afrika Selatan yang memiliki dokumen strategis dalam pengembangan pariwisata bernama *blue economy.* Pada dasarnya, dokumen ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan manfaat bidang sosial dan ekonomi. Dokumen tersebut dibuat atas kesepakatan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta. Tujuan dari kebijakan *blue economy* adalah mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Adapun fokusnya terdapat enam, yaitu: transportasi laut dan manufaktur, eksplorasi minyak dan gas, *aquaculture,* tata kelola dan pelayanan perlindungan laut, pelabuhan kecil, serta wisata pesisir dan laut. Pergulatan terjadi karena perencanaan wisata pesisir di negara tersebut seharusnya dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasikan dengan perencanaan spasial melalui *ocean based industries.* Namun demikian justru mendapatkan kritikan karena ketidakmerataan pengembangan spasial. Beberapa daerah pesisir diolah seperti tradisional tanpa ada pengembangan infrastruktur dasar dan pariwisata, seperti resor wisata laut internasional. Menurut Rogerson & Rogerson (2019), secara keseluruhan pantai panjang Afrika Selatan dan lingkungannya masih asli sehingga menawarkan sejumlah peluang yang belum dimanfaatkan untuk menumbuhkan basis pariwisata dan ekonomi lokal. Belum terdapat inovasi basis produk yang dapat menjadi energi di kawasan tersebut.

“Kaidah penataan ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdayaguna, dan berkelanjutan sehingga menciptakan pariwisata yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat”

BAB 2
KARAKTERISTIK KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN ENDE SELATAN

Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata bahari di wilayah Timur adalah Kecamatan Ende Selatan di Pulau Flores, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kecamatan Ende Selatan memiliki luas wilayah 12,65 km² yang terbagi menjadi 5 kelurahan, antara lain: Kelurahan Paupanda, Rukun lima, Mbongawani, Tetandara, dan Tanjung. Kelima daerah tersebut tergolong dalam karakteristik wilayah perkotaan yang berada dalam kawasan pesisir dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut (dpl) yaitu 30 dpl. Bahkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende (RKPD) Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kecamatan Ende Selatan tergolong ke dalam **Wilayah Pengembangan I** (WPI) dengan potensi pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri.

. Berikut Peta wilayah tempat penelitian penulis sebagai berikut:

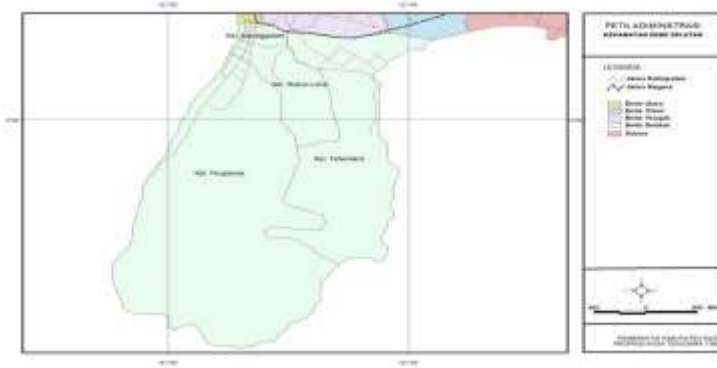

Gambar 8 Peta Wilayah Kecamatan Ende Selatan
Sumber: Bappeda, 2019

Wilayah ini berada di sebelah Laut Sawu. Potensi wisata yang dapat dikembangkan di wilayah ini meliputi: (1) daya tarik wisata alam: gunung dan gunung api, rekreasi pantai, sunset; (2) daya tarik wisata budaya: pertunjukan seni budaya; (3) daya tarik wisata buatan: pasar tradisional/ikan, wisata ziarah, kuliner lokal, (5) perdagangan dan jasa penunjang atraksi wisata.

Dalam perencanaan wilayah ditekankan pula bila pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan

untuk wilayah perairan pantai selatan. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Ende Selatan jumlah produksinya di tahun 2013 sebanyak 798.820 ton yang tergolong produksi terbanyak ketiga di Kabupaten Ende, setelah Kecamatan Pulau Ende dan Kecamatan Nangapanda. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ende No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, Kecamatan Ende Selatan dikembangkan sebagai kawasan industri perikanan, industri rumah tangga souvenir, industri air minum kemasan, dan kawasan wisata.

A. TIPOLOGI PERMUKIMAN DI KAWASAN PESISIR

Kekayaan aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut dikarenakan sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalihfungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Oleh karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Argumen lain tentang nelayan yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya *opportunity cost* mereka. *Opportunity cost* nelayan menurut definisi adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Berbagai opini mengatakan bahwa *opportunity cost* nelayan sangat kecil dan hanya sebatas menutup beban biaya hidup semata. Dengan kata lain nelayan tidak memiliki banyak alternatif lain sebagai mata pencahariannya. Keadaan yang sebenarnya terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan. Nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena *way of life* yang demikian maka apapun yang terjadi

dengan keadaannya. Hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. *Way of life* sangat sukar dirubah. Oleh sebab itu, meskipun menurut pandangan beberapa orang lain nelayan hidup dalam keterbatasan.

Secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani dalam pengelolaan atau dalam memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Nelayan menghadapi sumber daya yang tidak terkontrol dimana pada saat hasil tangkapan berkurang, maka nelayan tersebut harus mencari lahan baru.Nelayan bisa bertahan jika didorong semangat hidup yang kuat dengan motto kerja keras agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nelayan tradisional berjuang keras melawan terpaan gelombang laut yang dahsyat pada saat pasang naik untuk mendapatkan ikan. Dengan hanya mengandalkan kemampuan mesin dompeng misalnya, nelayan dapat berada pada radius 500 M dari pinggir pantai dan dengan cara seperti ini nelayan akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan bila menangkap ikan di bibir (tepi pantai) pada radius 200 meter, yang ikannya sudah langka.

Menurut Mubyarto (1984), berdasarkan stratifikasi yang ada pada masyarakat nelayan, dapat diketahui berbagai tipologi nelayan, yaitu:

1. Nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri harus ikut bekerja.
2. Nelayan kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal tetapi ia sendirimasih ikut bekerja sebagai awak kapal.
3. Nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekarjakan tenaga dari luar keluarga.
4. Nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain baik untuk ia sendiri atau untuk isteri dan anak-anaknya.
5. Nelayan pandega atau tukang kiteng.

Kondisi nelayan juga dapat dilihat dari sisi fisik permukimannya. Hal ini didasarkan atas besaran pendapatan nelayan tentu akan mempengaruhi tingkat huniannya. Berdasarkan karakteristik permukimannya, permukiman penduduk dapat dibedakan atas dua, yakni: permukiman perdesaaan dan permukiman perkotaan. Definisi permukiman perdesaan adalah satu

kawasan untuk permukiman yang lingkungan sekitarnya masih didominasi oleh tanah pertanian, tegalan, perkebunan dan tanah kosong serta mempunyai aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas. Sedangkan permukiman perkotaan adalah satu kawasan untuk permukiman dengan kapadatan bangunan yang tinggi dengan dukungan sarana dan parasarana transportasi yang memadai, fasilitas dan utilitas yang lengkap. Fungsi kawasan ini adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Berdasarkan lokasi di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende jenis permukimannya secara administratif tergolong permukiman perkotaan. Namun demikian, bila melihat dari tinjauan di lapangan, justru tergolong jauh dari kata perkotaan lebih pada karakteristik permukiman perdesaan. Hal ini didasarkan pada:

1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) di ketiga lokasi studi yaitu Kelurahan Tetandara, Rukun Lima, dan Paupanda dapat dikatakan terbatas berbeda dengan permukiman perkotaan pada umumnya;
2) Kondisi fisik dari bangunan hunian di permukiman ketiga lokasi studi lebih menunjukkan karakteristik permukiman perdesaan, dari sisi atap, dinding, dan lantai;
3) Dari sisi kepadatan bangunan huniannya cenderung tidak padat (Koefisien Dasar Bangunan/KDB tergolong besar), lokasinya cenderung *leap frog,* dan berkembang secara sporadis.
4) Dari sisi keteraturannya, permukiman di ketiga lokasi studi tergolong dengan permukiman kumuh karena tidak berpola huniannya dan minimnya fasilitas PSU, serta cenderung berkembang secara organik. Disisi lain, tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Bahkan tergolong daerah rawan bencana banjir.
5) Masih ditemukannya ikatan kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi sebagai modal sosial pembangunan daerah.

Salah satu contoh permukiman yang dianggap kurang layak huni ada di Kelurahan Paupanda. Dari sisi permukiman, area permukiman di kawasan pesisir tergolong padat. Berdasarkan hasil FGD, konstruksi dinding rumah berbahan tembok tetapi ada pula yang masih berupa bambu meskipun hanya 30-40% dari jumlah keseluruhan rumah warga sebanyak 1.311 unit. Sementara untuk lantai juga masih ditemukan berupa tanah dan atap masih

didominasi oleh seng. Untuk air bersih masih mengandalkan sumur dengan kedalaman 6 meter dan mata air sedangkan PDAM belum masuk. Dari data survei lapangan, hanya terdapat 40% rumah yang tergolong telah mendapatkan akses air bersih sisanya masih mengandalkan air payau. Sementara untuk air minum telah mencapai 60% penduduk yang bisa mengaksesnya.

Untuk kepemilikan toilet telah mencapai 75% rumah yang punya, sisanya masih mengandalkan pantai dan tanah sebagai pembuangannya. Jaringan drainase telah mencapai 75% di lingkungan permukiman warga namun beberapa titik tergolong tidak memadai. Jaringan listrik masih tergolong kurang menjangkau terbukti dari ketiadaan penerangan jalan. Fasilitas persampahan, tidak ada tempat pembuangan sampah sementara sehingga masih sering dijumpai sampah di tepi pantai maupun permukiman warga. Dari tingkat kerawanan bencana, Kelurahan Paupanda tergolong rawan terhadap bencana abrasi dan tanah longsor (akses menuju Pantai Paupanda).

Gambar 9. FGD Bersama Warga Kelurahan Paupanda
Sumber: Dokumentasi Penulis

Untuk meningkatkan kualitas permukiman, pemerintah daerah telah membantu dalam bentuk bantuan pembangunan rumah kurang lebih 8 unit tahun 2019. Penulis melihat bahwa ada upaya pemerintah daerah untuk mengubah hunian masyarakat meskipun disesuaikan dengan anggaran

yang ada dan prioritas. Meskipun demikian, diperlukan aksi percepatan dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak huni.

Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Ende ditetapkan melalui SK Bupati Ende No.341/KEP/HK/2016 seluas 44,84 HA, pada 5 lokasi. Kawasan ini dikategorikan sebagai kawasan kumuh kota/nelayan karena kondisi sarana dan prasara yang memprihatinkan, kepadatan yang tinggi, ketidakteraturan bangunan dan kondisi fisik bangunan yang sebagianbesar merupakan bangunan temporer.

Umumnya permukiman kumuh ini berada di wilayah bantaran sungai, pesisir pantai/nelayan dan pusat kota. Berikut ini disajikan data kawasan kumuh di Kabupaten Ende:

Tabel 3 Data kawasan Kumuh di Kabupaten Ende

No.	Nama Kawasan	Luas	Satuan
1.	Kawasan Klimutu	5,63	Ha
2.	Kawasan Kota Raja	5,86	Ha
3.	Kawasan Mautapaga	42,96	Ha
4.	Kawasan Paupire	2,28	Ha
5.	Kawasan Tetandara	14,11	Ha
	Total Ende	**70,84**	**Ha**

Sumber: RPKPKP Kabupaten Ende 2016

Sesuai SPPIP/RPKPP tahun 2016, terdata beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian yang akan mempengaruhi citra dari pada Kabupaten Ende. Kawasan yang menjadi perioritas sesuai arahan RP2KPKP adalah klasifikasi 5 kawasan dengan perioritas penanganan tinggi urutan perioritas sebagai berikut:

Gambar 10. Kawasan Prioritas
Sumber: RP2KPKP, 2016

Dari lima kawasan sesuai arahan RP2KPKP pengangannya baik dari Kabupaten maupun yang didanai dari anggaran APBD maupun APBN masih sangat minim.Sedangkan sesuai RP2KPKP tahun 2016tentang perencanaan 5 kawasan kumuh (termasuk kawasan Kelimutu, Kota Raja, Mautapaga, Paupire dan kawasan Tetandarayang merupakan kawasan prioritas dalam RP2KPKP) sementara di tangani dan akan terus ditangani hingga mencapai 0 % pada tahun 2019 sesuai gerakan 100-0-100.

Sektor penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan di Kabupaten Ende:

a. Masih tersebarnya permukiman-permukiman kumuh
b. Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional kecual bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata
c. Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota

d. Sarana lingkungan hijau, sarana olah raga, dan lain-lain kurang diperhatikan;
e. Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bangunan gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana;
f. Lemahnya pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayan publik;
g. Sampai saat ini pemberian perijinan dan pembangunan gedung belum sepenuhnya didasarkan pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
h. Belum melaksanakan pembangunan lingkungan permukiman berbasis konsep tridaya untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Permukiman yang sehat dan layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya menjadi tanggungjawab masyarakat itu sendiri, namun saat ini sebagian masyarakat dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk memiliki perumahan yang sehat dan layak dihuni seperti penggunaan dinding dari bambu, lantai yang masih menggunakan tanah serta letak perumahan yang tidak aman karena berada dilereng-lereng perbukitan. Pada sebagian besar kawasan pesisir di Kecamatan Ende Selatan, permukiman yang ada beberapa masih tergolong dalam rumah tidak layak huni, khususnya tepi pantai.

B. GAMBARAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap dalam kemiskinannya sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian,

posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.

Hal ini telah melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial pada masyarakat nelayan. Namun, dalam aktivitas perdagangan tersebut bukan merupakan satu-satunya factor yang menimbulkan persoalan sosial di kalangan nelayan, faktor-faktor lain yang sinergi, seperti semakin meningkatnya kelangkaan sumberdaya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, ketimpangan akses terhadap sumberdaya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan.

Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat dirasakan di desa-desa pesisir, terlebih yang perairannya mengalami *overfishing* (tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang di peroleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya; dan (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan.

Ketiga akses di atas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Dengan realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit merumuskan dan membangun kualitas sumberdaya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki kemampuan optimal dalam mengelola potensi sumber daya pesisir laut yang ada. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk mengatasi sosial ekonomi didaerahnya akan mendorong mereka masuk perangkat keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan

kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu, perlu dipikirkan solusi strategi alternatif untuk mengatasi persoalan kehidupan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Dalam hal ini, program jaminan sosial *(sosial security)* yang dirancang secara formal merupakan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan untuk mengatasi kemelut sosial ekonomi yang menimpa kehidupan dari masyarakat nelayan.

Sekalipun negara telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan membangun sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun hasil yang dicapai masih belum maksimal. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang selama ini diterapkan tidak menghasilkan perubahan terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah Pesisir. Kalau dianalogikan dengan orang memancing, kebijakan selama ini hanya memberi ikan kepada nelayan, tetapi tidak memberikan jaminan keberlanjutan bagaiamana seandainya alat pemancing itu rusak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan lemahnya dukungan kebijakan lembaga-lembaga perbankan resmi untuk penyaluran kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat nelayan secara berkesinambungan dan konsisten. Pada dasarnya, dukungan ini sangat dibutuhkan nelayan untuk menjaga kelanjutan usaha perikanannya. Bentuk dukungan lain yaitu dalam memberikan rasa aman bagi lembaga perbankan untuk bekerja sama dengan nelayan dalam transaksi bantuan kredit.

Disamping itu, tidak adanya pihak-pihak yang membantu secara total dan bersungguh-sungguh dalam membangun masyarakat nelayan, mendorong masyarakat nelayan mengembangkan strategi kemandirian berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemandirian ini membangkitkan sikap-sikap otonom di kalangan nelayan merupakan modal sosial yang sangat berharga sebagai basis kelangsungan hidup mereka. Manifestasi dari sikap-sikap otonom nelayan terwujud dalam konstruksi pranata sosial, seperti perkumpulan simpan pinjam, arisan, dan jaringan sosial. Hal ini berfungsi untuk menggalang kemampuan sumberdaya ekonomi kolektif dalam relasi timbal balik sehingga eksistensi masyarakat nelayan tetap terjamin.

Perhatian terhadap kawasan pesisir tidak hanya didasari oleh pertimbangan pemikiran bahwa kawasan tersebut tidak hanya menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat yang akan mengelola sumberdaya alam tersebut secara berkelanjutan. Potensi masyarakat ini sangat penting mengingat sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir dan hidup dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tergolong miskin. Kebijakan kebijakan pembangunan di bidang perikanan selama ini ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir.

Kecamatan Ende Selatan yang terletak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu di wilayah timur yang perlu diperhatikan. Bahkan dari segi kesejahteraan keluarga, kecamatan ini memiliki keluarga pra sejahtera dengan angka yang tergolong tinggi, yaitu 718 keluarga di tahun 2014 dan keluarga sejahtera (KS) I sebanyak 1.186 keluarga. Kelompok ini tergolong tinggi diantara kategori keluarga sejahtera lainnya. Dari mata pencaharian penduduk, sebanyak 1.475 jiwa berprofesi sebagai nelayan.

Hal ini dikarenakan potensi dari sumberdaya laut yang berdekatan dengan tempat tinggal penduduk. Meski demikian, wilayah ini juga berpotensi pada sektor pariwisata karena besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Ende Selatan atas dasar harga konstan 2000 tahun 2012 yang tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu 58.670.480.000 atau 39,09% dari total PDRB. Sektor kedua yang menjadi unggulan adalah jasa dengan kontribusi sebanyak 35.944.573.000 atau 23,95%. Bahkan angka ini melampaui dari sektor pertanian (perikanan masuk ke sektor ini) yang hanya sebanyak 15.194.787.000 atau 10,12%. Padahal sektor perikanan merupakan sektor potensial bila melihat karakteristik wilayah di Kecamatan Ende Selatan karena merupakan daerah pesisir. Oleh sebab itu, ini menjadi ironi dan tantangan dalam pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal..

Sebagai wilayah pesisir di Kecamatan Ende Selatan potensi yang dimliki sangat besar dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. namun, di kecamatan Ende Selatan terdidiri dari 4 Kelurahan dan yang menjadi fokus pembahasan penulis hanya 3 Kelurahan diantaranya Kelurahan Tetandara, Kelurahan Rukun Lima dan Kelurahan Paupanda. Potensi wilayah pada masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Tetandara

Berdasarkan buku Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017, luas wilayah Kelurahan Tetandara adalah 4,22 Km² atau sebesar 33,36% dari luas Kecamatan Ende Selatan. Luas wilayah kelurahan ini dapat dikatakan terluas dibandingkan kelurahan lainnya dalam satu kecamatan. Dengan wilayah terluas tentu saja memiliki potensi dalam hal daya tampung pertambahan penduduk per tahunnya. Untuk tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL), Kelurahan Tetandara memiliki tinggi 29 dpl dalam satuan meter. Berdasarkan ketinggian tersebut maka kelurahan ini tergolong dalam wilayah di sekitar pesisir.

Dari sisi kelembagaan internal di lingkungan masyarakat, Kelurahan Tetandara memiliki 7 lingkungan dengan 14 rukun warga (RW) dan 28 rukun tetangga (RT). Angka RT dan RW di kelurahan ini memiliki makna bahwa kelurahan ini tergolong dihuni oleh penduduk dalam jumlah yang banyak. Organisasi lokal lainnya adalah kelompok nelayan, kelompok tenun ikat, komunitas anak cinta lingkungan dari usia Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Pertama. Sementara itu, jumlah penduduk di Kelurahan Tetandara sebanyak 8.073 jiwa pada tahun 2016 dan 1.880 keluarga (sumber: Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017). Jumlah penduduk di Kelurahan Tetandara tergolong terbanyak dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Ende Selatan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk setiap tahunnya tergolong tidak signifikan. Berikut ini grafik pertumbuhan penduduk di Kelurahan Tetandara:

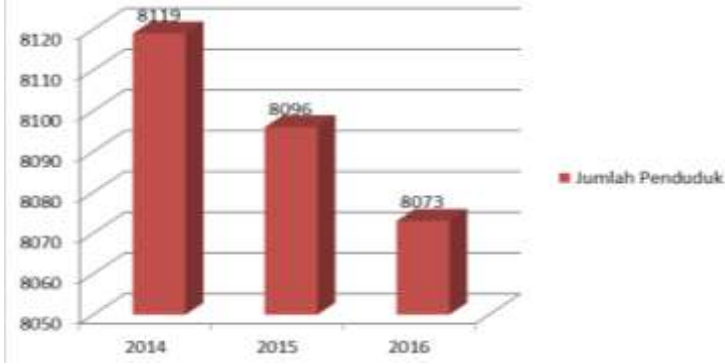

Gambar 11. Grafik Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Tetandara
Sumber: diolah Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan penduduk di Kelurahan Tetandara mengalami penurunan setiap tahunnya. Salah satu faktor penurunan jumlah penduduk adalah migrasi penduduk usia angkatan kerja ke luar daerah karena mencari dorongan sulitnya mencari pekerjaan dengan pendapatan yang besar. Tentu saja hal ini menjadi masalah karena semakin sulit mencari tenaga kerja generasi muda sebagai regenerasi penduduk saat ini. Menurunnya jumlah penduduk juga mengakibatkan menurunnya kepadatan penduduk dari 1.924 jiwa/km² (tahun 2014) menjadi 1.913 jiwa/km² (tahun 2016).

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan tergolong imbang. Selisihnya tidak terlalu signifikan. Namun demikian, dari tahun 2014 hingga tahun 2016 jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Secara perhitungan rasio jenis kelamin, tahun 2014 sebesar 95, tahun 2015 sebesar 95, dan tahun 2016 sebesar 96. Rasio yang di bawah angka 100 menandakan bahwa dalam populasi tersebut jumlah perempuan sebanyak 100 orang maka jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 95 sampai dengan 96 orang. Telah dikatakan bahwa meskipun selisih tetapi rentangnya tidak terlalu signifikan.

Gambar 12. Grafik Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Tetandara
Sumber: diolah dari Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Jumlah penduduk yang telah disebutkan di atas termasuk dengan penduduk pendatang. Dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang datang. Tahun 2014 sebanyak 6 orang dan meningkat secara berurutan tahun 2015 (61 orang) serta tahun 2016 (60 orang). Fenomena penduduk yang datang maka ada pula penduduk yang pindah, bahkan angkanya justru lebih tinggi dibandingkan dengan pendatang. Berikut ini tabel yang memperlihatkan perbedaan selisih penduduk pendatang dan pindah:

Tabel 4 Penduduk Pendatang dan Penduduk Pindah Di Kelurahan Tetandara

Tahun	Pendatang (jiwa)	Pindah (jiwa)
2014	6	34
2015	61	143
2016	60	141

Sumber: diolah dari Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Dengan melihat pada tabel di atas, maka menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Angka penduduk yang pindah justru lebih banyak dibandingkan penduduk yang datang. Penduduk yang pindah ini justru penduduk usia produktif sehingga menjadi kelemahan dalam proses pembangunan daerah nantinya. Tahun 2016 jumlah penduduk yang tergolong produktif sebanyak 5.337 jiwa sementara penduduk nonproduktif sebanyak 2.736 jiwa. Usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia nonproduktif menjadi modal pembangunan ke depannya.

Berdasarkan agama, jumlah penduduk dengan agama islam merupakan penduduk yang mendominasi di Kelurahan Tetandara sebanyak 3.832 jiwa, kemudian disusul oleh agama katolik (2.876 jiwa), protestan (1.401 jiwa), dan hindu/budha (10 jiwa). Dengan melihat mayoritas penduduk agama islam maka penyediaan fasilitas ibadah harus lebih banyak peruntukkannya berupa masjid dan mushola.

Secara ekonomi, sektor yang menjadi dominan di Kelurahan Tetandara adalah perikanan dengan aktivitas nelayan. Dengan mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan maka masyarakat sangat bergantung terhadap kondisi laut. Akan tetapi, mengandalkan laut sebagai roda kehidupan masyarakat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan mayarakat.

Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh oleh nelayan hanya berkisar kurang lebih Rp. 500.000,00 per bulan (sumber: hasil FGD dengan masyarakat Kelurahan Tetandara). Dengan rendahnya pendapatan inilah yang menjadi penyebab generasi muda memilih mencari pendapatan di luar daerah (Kalimantan), bahkan di luar negeri seperti Arab dan Malaysia. Faktor lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat hanya jenjang SMP dan SMA.

Untuk kondisi permukiman masih ditemukan hunian tidak layak. Masyarakat saling gotong-royong dalam membangun permukiman layak huni, baik dari rumah warga maupun prasarana sarana dan utilitas umum lainnya. Dari sisi atap didominasi oleh atap seng, sementara dinding sudah banyak yang berkontruksi tembok meskipun masih ada pula yang bambu, dan lantai mayoritas sudah diperkeras dan berupa tanah. Di Kelurahan Tetandara lebih mudah dikenali dengan permukiman kumuh di RT 05 Ipi dan RT 07 Ipi. Tidak hanya dari sisi kondisi rumah saja, tetapi juga memiliki masalah pada kondisi jalan yang belum diperkeras, sanitasi yang masih kurang layak karena beberapa masyarakat masih membuang tinja di tepi pantai, drainase yang rusak, minimnya tempat sampah sehingga masyarakat membuang sampah di tepi pantai, dan kekurangan air bersih. Untuk sumber mata air utamanya adalah sumur tetapi terkadang air dalam sumur tersebut kering dan kelemahannya masih banyak yang berdekatan dengan penampungan tinja.

> *"Lingkungan kumuh tidak layak huni di RT 05 Ipi dan RT 07 Ipi. Tidak layak huni lainnya tersebar di Kelurahan Tetandara. Sebagai pemerintah kelurahan tentu kami telah berusaha dengan berbagai program yang ada seperti bantuan perumahan untuk penataan permukiman. Namun perlu secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang kami peroleh."* (Kalsum, 45 tahun Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Tetandara).

Berdasarkan wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ende, prioritas pembangunan pariwisata di Kelurahan Tetandara saat ini masih di Gunung Meja. Oleh sebab itu, wajar jika Pantai Ana Ho'o belum mendapatkan sentuhan lebih dari pemerintah daerah kabupaten. Namun demikian, peneliti justru melihat bahwa dua atraksi alam tersebut justru saling menguatkan untuk menarik angka

kunjungan wisatawan. Hal ini dikarenakan dalam satu kelurahan terdapat dua potensi wisata langsung yaitu berupa pesisir dan gunung.

> *"Untuk Kecamatan Ende Selatan berpusat pada pengembangan Gunung Meja di Kelurahan Tetandara menjadi bukit toleransi. Itu yang paling utama. Sejak dua tahun lalu sudah dilakukan pengembangan kemudian kita buatkan trackingke Gunung Meja, di bukit toleransi akan dibuatkan 5 rumah ibadah. Sampai sekarang mungkin sudah dibuatkan tapi terkendala tanah."* (Lokadawa, 42 tahun Kepala Bidang Pariwisata Bappeda Kabupaten Ende).

Selain Pantai Ana Ho'o dan Gunung Meja sebagai atraksi alam di Kelurahan Tetandara, terdapat pula atraksi budaya yaitu tari tradisional dan alat-alat musik tradisional yang dapat dilestarikan melalui pariwisata dan acara festival kebudayaan tahunan untuk menarik minat wisatawan. Untuk kedepannya, inovasi akan terus muncul guna memberikan warna baru bagi perkembangan pariwisata demi meningkatkan daya saing dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jangkauan wisatawan sangat dipengaruhi oleh media sosial namun masyarakat belum dapat memaksimalkan manfaat kemajuan teknologi untuk mempromosikan pantai di Kelurahan Tetandara.

Gambar 13. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ende
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sebagai fasilitator pemangku kebijakan telah membuat perencanaan strategis untuk mendukung pariwisata di daerahnya untuk kemudian dapat menjadi sumber

penghasilan masyarakat Tetandara. Melalui dokumen perencanaan seperti Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Ende atau disingkat dengan Ripparda, Master Plan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, seluruh kegiatan pengembangan sektor pariwisata daerah telah ada. Namun demikian, tidak secara spesifik tertulis Pantai Ana Ho'o sehingga ada kemungkinan prioritas pantai lain yang lebih diunggulkan sebagai promosi destinasi wisata. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan salah satu kepala seksi di Kelurahan Tetandara di bawah ini:

Kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Ende terhadap pengembangan pariwisata di Kelurahan Tetandara menyebabkan lesunya kegiatan pariwisata di Pantai Ana Ho'o. Pemerintah Kelurahan Tetandara sendiri belum cukup dalam hal kapasitas finansial. Namun demikian, fakta bahwa masyarakat sekitar Pantai Ana Ho'o memiliki antusias dalam keikutsertaan mengembangkan obyek wisata. Dengan bermodalkan antusias dari masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Ana Ho'o maka mempermudah menerapkan pembangunan berbasis masyarakat sebagaimana keinginan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan *output* agar masyarakat dapat mandiri. Kemandirian ini dapat dengan mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Strateginya adalah mengoptimalkan berbagai upaya penguatan dan perluasan jaringan kerjasama, serta meningkatkan kemitraan kepariwisataan dengan *stakeholder*s lainnya yang sinergis dan bermanfaat. Di sisi lain, diperlukan pengembangan media promosi terkini dan terpopuler sehingga informasi menjangkau hingga ke luar negeri.

2. Kelurahan Rukun Lima

Kelurahan Rukun Lima merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ende Selatan. Luas wilayah Kelurahan Rukun Lima seluas $3{,}37\ km^2$ menjadikankelurahan ini sebagai kelurahan dengan luas wilayah terbesar nomor dua di Kecamatan Ende Selatan. Secara ketinggian

wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Kelurahan Rukun Lima berada di ketinggian 13 mdpl.Pariwisata menjadi peran yang sangat dibutuhkan bagi Kelurahan Rukun Lima, namun kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga lingkungan seperti tidak sadar untuk menjaga lingkungan. Selain itu, Kelurahan Rukun Lima belum memiliki lembaga BUMDesa dan lembaga lokal lain akibatnya kondisi pantai pesisir di Kelurahan Rukun Lima masih belum terkelola dengan maksimal.

Berdasarkan grafik data penduduk bahwa kelurahan rukun lima pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatakan penduduk. Pada Tahun 2014 Kelurahan Rukun Lima memiliki jumlah penduduk 6999 jiwa/km^2, dan pada tahun 2015 6984 tidak mengalami penurunan yang siginifikan namun pada tahun 2016 sebanyak 6984 jiwa/km^2 Kelurahan justru mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 7046 jiwa/km$^{2.}$.

Gambar 14. Grafik Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Rukun Lima Tahun 2014-2016

Sumber: diolah Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Dengan demikian, bertambahnya jumlah penduduk hal ini menjadi potensi bagi daerah yang tinggal diwilayah pesisir untuk memberdayakan SDM untuk diperlukannya penataan kawasan permukiman agar siap menjadi ikon pariwisata. Jogging track, rest area, kampung nelayan dan wisata kuliner akan menghidupkan perekonomian masyarakat pesisir.

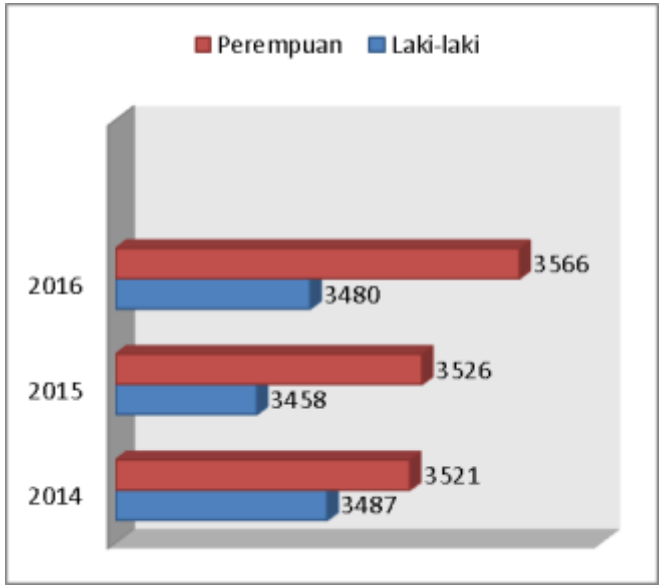

Gambar 15 Grafik Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Rukun Lima
Sumber: diolah dari Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Berdasarkan pada grafik di atas, menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dengan perempuan di Kelurahan Rukun Lima, dari tahun 2014-2016 perempuan mengalami kenaikan jumlah penduduk sedangkan laki-laki mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Dari data 2016 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebesar 3480 sedangkan perempuan berjumlah 3566 hal ini berarti populasi di Kelurahan Rukun Lima yang mendominasi adalah perempuan.

Melimpahnya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki bukan menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan wilayah tersebut sebab hal ini melimpahnya jumlah perempuan dapat menjadi potensi wilayah kelurahan rukun lima dalam mengembangkan pariwisata untuk memberadayakan keterampilan dalam mengembangkan usaha kain tenun yang sudah ada dan sektor lain seperti usaha dagang, kuliner dan oleh-oleh khas yang membantu menghidupkan perekonomian di kelurahan rukun lima.

Tabel 5 Penduduk Pendatang dan Penduduk Pindah di Kelurahan Rukun Lima

Tahun	Pendatang (jiwa)	Pindah (jiwa)
2014	0	31
2015	0	26
2016	3	30

Sumber: diolah dari Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa minimnya jumlah pendatang karena wilayah kelurahan rukun lima kurang menarik menjadi tempat tinggal dan pengunjung luar daerah. Hal ini melihat data pindah yang menunjukan bahwa masyarakat kelurahan rukun lima banyak yang merantau untuk mencari lapangan pekerjaan. Maka permasalahan yang terjadi perlu pemanfaaan potensi wilayah untuk menekan jumlah penduduk yang pindah.

Pantai Ende menjadi unggulan destinasi di Kecamatan Ende Selatan. Hal ini dapat dilihat pada penerimaan pendapatan per tahunnya. Bahkan pantai ini lebih dikenal wisatawan dibanding pantai lainnya di Kecamatan Ende Selatan. Berikut gambar grafik perkembangan pendapatan dari Pantai Ende:

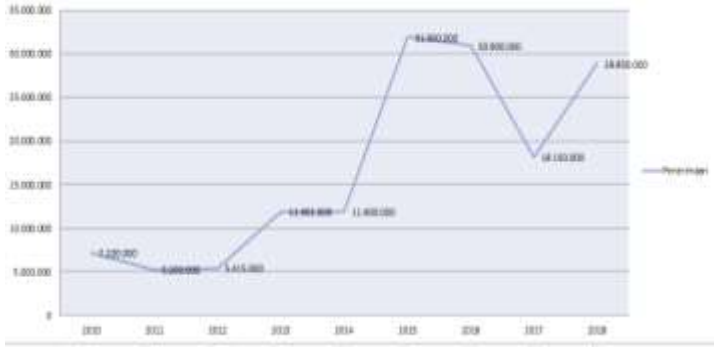

Gambar 16 Perkembangan Pendapatan Pantai Ende
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, 2019

Berdasarkan grafik di atas, tren pendapatan dari kegiatan Pantai Ende mengalami peningkatan dibandingkan sebelum tahun 2014. Meskipun

selama tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Akan tetapi, nominalnya bahkan dua kali lipat dibandingkan pendapatan sebelum tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa Pantai Ende sudah mendapatkan perhatian bagi wisatawan.

Masyarakat Kelurahan Rukun Lima saat ini adalah kemanusiaan dan gotong royong masih tinggi dalam setiap pekerjaan yang ada di kampung.Hal ini menjadi potensi tersendiri dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Kelurana Rukun Lima. Terkait dengan infrastruktur untuik Kelurahan Rukun Lima sangat mendukung karena dari segi aksesibilitas dinilai cukup untuk dapat mengakses lokasi yang akan dijadikan sebagai tujuan wisata. Sementara infrastruktur pendukung lainnya seperti perumahan, dan fasilitas umum seperti pasar tentu sangat mudah untuk dijangkau dan dapat mendukung sebagai sarana penunjang yang dapat digunakan untuk tujuan wisata.Namun demikian, di Kelurahan Rukun Lima masih banyak ditemukan hunian yang tidak layak. Hal ini akan mempengaruhi citra kawasan tersebut sebagai destinasi wisata. Disisi lain, faktor pendukung pengembangan pariwisata outbound, transportasi, dan sebagainya masih dianggap kurang.

Faktor masalah yang paling utama ialah masyarakat masih terkendala dengan SDM yang lemah, maka perlu pendampingan dalam meningkatkan SDM sehingga masyarakat dalam subyek pengembangan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya lulusan SD-SMA saja. Oleh sebab itu, isu strategis yang mendukung kegiatan pariwisata yaitu meningkatkan kualitas SDM. Partisipasi masyakarat sangat minim karena belum sadarnya untuk mengembangkan potensi pariwisata dan masih belum dapat memahami obyek wisata apa yang dapat mendapatkan penghasilan karena SDM yang terbatas sehingga pemikiran masyarakat sekitar belum memaksimalkan potensi wisata yang ada. Dalam beberapa wawancara dengan masyarakat kelurahan rukun lima. Jika wilayahnya dikembangkan menjadi kegiatan pariwisata banyak masyarakat yang tidak setuju karena terbatasnya lahan yang ada.

Edukasi kesadaran akan manfaat besar terkait kesadaran akan pentingnya pariwisata perlu diupayakan baik dari pemerintah maupun pihak lain yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan sangat diupayakan dalam rangka pemerataan pemangunan. Berguna dalam memajukan dan mensejahterakan

masyarakat yang masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.

3. Kelurahan Paupanda

Kelurahan Paupanda memiliki luas wilayah 2,18 Km² atau 17,23% dari total luas seluruh desa. Dari kelima kelurahan di Kecamatan Ende Selatan, Kelurahan Paupanda merupakan kelurahan keempat dari sisi luas wilayah. Dari sisi pemerintahan tingkat lokal, Kelurahan Paupanda terdiri dari 3 lingkungan, 6 rukun warga, dan 12 rukun tetangga. Jumlah ini tergolong terkecil baik dari jumlah lingkungan, rukun warga, maupun rukun tetangga bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Ende Selatan.

Jumlah penduduk di Kelurahan Paupanda tahun 2019 sebanyak 3.206 jiwa dengan 1.311 keluarga. Jumlah penduduk Kelurahan Paupanda dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dapat dikatakan terjadi peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Tahun 2014 jumlah penduduknya sebanyak 2.905 jiwa dan meningkat di tahun 2019 menjadi 3.206 jiwa. Berikut ini grafik perkembangan jumlah penduduk di Kelurahan Paupanda.

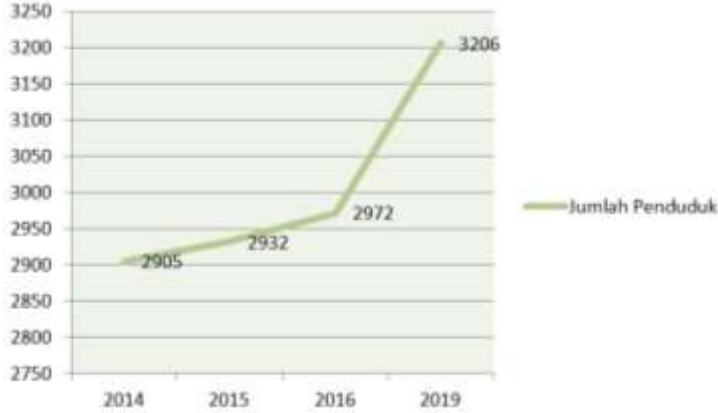

Gambar 17. Grafik Perkembangan Penduduk Di Kelurahan Paupanda Tahun 2014-2016

Sumber: diolah dari Kelurahan Paupanda Dalam Angka 2019

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kelurahan Paupanda tahun 2019 sebanyak 1.542 jiwa. Sementara penduduk perempuannya tahun yang sama sebanyak 1.664 jiwa. Selisih penduduk

laki-laki dan perempuan tergolong tidak signifikan. Secara rasio jenis kelamin tahun 2019 adalah 98. Dengan demikian, dalam satu populasi jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa maka jumlah laki-lakinya sebanyak 98 jiwa. Berikut grafik pertumbuhan jumlah penduduk di Kelurahan Paupanda dari tahun 2014 hingga 2019 berdasarkan jenis kelaminnya.

Dari sisi kepadatan penduduk, Kelurahan Paupanda tergolong tidak padat. Dengan luas wilayah 2,18 Km² dan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 3.206 jiwa maka angka kepadatan penduduknya sebanyak 1.471 jiwa/Km². Berdasarkan perkembangan angka kepadatan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan 2019 tergolong selalu naik. Tahun 2014 angka kepadatan penduduknya sebanyak 1.333 jiwa/Km² dan tahun 2016 sebanyak 1.363 jiwa/Km².

Menurut dokumen Kecamatan Ende Dalam Angka 2017, jumlah penduduk yang lahir dari tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan. Di satu sisi, jumlah penduduk yang meninggal juga mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah penduduk yang lahir sebanyak 80 jiwa sementara penduduk yang meninggal sebanyak 23 jiwa. Hal ini menandakan bahwa terdapat selisih angka kelahiran yang lebih banyak dibandingkan kematian sehingga dianggap nilai positif. Nilai positif ini juga dilihat dari daya tampung wilayah yang masih dianggap mumpuni karena angka kepadatan penduduknya masih tergolong rendah.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Pendatang dan Pindah Di Kelurahan Paupanda

Tahun	Pendatang (jiwa)	Pindah (jiwa)
2014	15	46
2015	17	34
2016	17	34

Sumber: diolah dari Kecamatan Ende Selatan Dalam Angka 2017

Tingginya angka perpindahan penduduk ke luar daerah tentu menjadi ancaman pembangunan terlebih penduduk usia produktif. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk produktif sebanyak 2.364 jiwa, sementara itu jumlah penduduk usia nonproduktif sebanyak 842 jiwa. Ada dua kondisi dilematis dalam sisi demografi di Kelurahan Paupanda, satu sisi usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia

nonproduktif. Namun demikian, penduduk produktif juga banyak yang keluar daerah untuk mencari pendapatan yang layak.

Dari sisi agama, penduduk agama islam sebanyak 3.180 jiwa mendominasi penduduk di Kelurahan Paupanda. Agama lainnya disusul oleh protestan sebanyak 19 jiwa dan katolik sebanyak 5 jiwa. Dengan melihat penduduknya mayoritas adalah agama islam maka selayaknya diberikan fasilitas ruang ibadah sesuai jumlah umatnya. Di satu sisi, juga harus menyediakan ruang ibadah bagi penduduk beragama lain.

Kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Paupanda tergantung dari pendidikan terakhirnya. Berdasarkan data dalam Kelurahan Paupanda Dalam Angka 2019 per Mei 2019, jumlah penduduk yang tidak sekolah sebanyak 467 jiwa, lulusan TK sebanyak 106 jiwa, lulusan SD sebanyak 1.109 jiwa, lulusan SMP sebanyak 390 jiwa, lulusan SMA sebanyak 490 jiwa, lulusan Diploma sebanyak 68 jiwa, dan lulusan jenjang strata sebanyak 18 jiwa. Dengan melihat data ini, kualitas SDM di Kelurahan Paupanda bila dilihat dari jenjang lulusannya mayoritas adalah SD, SMP, SMA, dan penduduk tidak sekolah.

Dari mata pencaharian, mayoritas penduduk di Kelurahan Paupanda adalah nelayan sebanyak 190 jiwa, usaha dagang sebanyak 168 jiwa, bertani sebanyak 167 jiwa, buruh sebanyak 92 jiwa, pegawai swasta sebanyak 82 jiwa, kerajinan sebanyak 64 jiwa, dan lain-lain. Di satu sisi, masih banyak pula yang belum atau tidak bekerja bahkan jumlah tergolong banyak yaitu 405 jiwa. Hal ini menandakan ada masalah terkait kemiskinan dan ada ancaman adanya migrasi penduduk asli ke daerah lainnya. Pekerjaan nelayan mendominasi dari mata pencaharian lainnya karena karakteristik wilayah pesisir. Namun demikian, rata-rata pendapatan masyarakat sebagai nelayan hanya berkisar Rp. 500.000,00 per bulan saja. Padahal satu rumah terdiri dari 5 sampai dengan 8 orang sehingga terjadi ketimpangan antara pendapatan dengan pengeluaran kebutuhan.

C. POTENSI PARIWISATA DI KECAMATAN ENDE SELATAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Secara umum meliputi kawasan lindung seluas 77.669,33 ha (37,95 %) dan kawasan budidaya seluas 126.990,72 ha

(62,05 %), dengan rincian tiap-tiap penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7 Penggunaan lahan di Kabupaten Ende

No.	Penggunaan Lahan		Luas (km^2)	%
I	**Kawasan lindung**		**77,669.33**	**37,95**
	1.	Kawasan hutan lindung	31,689.95	15.48
		Hutan lindung	24,193.95	11.82
		Cagar alam	1,958.24	0.96
		Taman nasional	5,538.37	2.71
	2.	Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya	33,295.46	16.27
		Kawasan resapan air	26,236.67	12.86
		Sempadan pantai	1,971.28	0.96
		Sempadan sungai	4,484.47	2.19
		Hutan bakau (mangrove)	603.04	0.29
	3.	Kawasan perlindungan setempat	12,683.01	6.20
		Kawasan rawan bencana gunung merapi	390.91	0.19
		Kawasan perlindungan setempat terhadap gerakan tanah	12,293.01	6.01
II	**Kawasan budidaya**		**126.990.72**	**62.05**
	1.	Daerah permukiman	12,935.72	6.32
	2.	Kawasan kebun campuran	14,365.98	7.02
	3.	Lahan penggembalaan	9,279.23	4.53
	4.	Pertanian lahan basah	1,935.55	0.95
	5.	Pertanian lahan kering	38,236.64	18.68
	6.	Hutan produksi	35,290.94	17.24
		Hutan produksi terbatas	6,150.63	3.01
		Hutan produksi konversi	1,186.03	0.58
	7.	pertambangan	7.610	3.72
TOTAL I = II			**204,668.05**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Penggunaan lahan di Kabupaten Ende total seluas 204.660.05 km^2 hal ini merupakan potensi bagi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende. Potensi pengembangan ini diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ende adalah untuk terwujudnya tata ruang Kabupaten Ende yang berdaya saing, berbasis pertanian yang didukung oleh potensi kelautan, perikanan, pariwisata, dan berwawasan lingkungan.

Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah di kabupaten ende kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi:

a. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang.
b. Penyediaan prasarana wilayah guna mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat.
c. Pemantapan fungsi kawasan lindung.
d. Pengembangan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan budidaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian yang didukung oleh sektor kelautan, perikanan, pariwisata;.
e. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah; dan
f. Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Ende dilakukan melalui pengembangan kawasan sesuai fungsi masing-masing kawasan yang lestari dan berdaya saing tinggi.

Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. **Wilayah Pengembangan I**

   Meliputi Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Ende Tengah. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner.

   Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupatenn Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil.

2. Wilayah Pengembangan II

Meliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur.

3. Wilayah Pengembangan III

Meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao.

4. Wilayah Pengembangan IV

Meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende.

Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi

padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.

5. Wilayah Pengembangan V

Meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores.

Dari uraian diatas bahwa potensi rencana yang menjadi fokus pada wilayah pengembangan wilayah kabupaten ende menempatkan potensi wilayah pengembangan di kecamatan ende selatan berada di **Wilayah Pengembangan I (WPI)** Hal ini potensi yang di kembangakan pada sektor pariwisata, perikanan dan industry.

Wilayah pesisir di Kelurahan Tetandara terkenal dengan keindahan Pantai Ana Ho'o. Keindahan pantai dan airnya yang jernih menjadikan fenomena tersendiri bagi pantai ini. Saat ini kunjungan wisata hanya terbatas masyarakat lokal dan sekitarnya yang mengetahui letak pantai tersebut. Potensi pantai yang berlatarbelakang pegunungan sangat indah dan panorama nuansa *sunset* untuk dinikmati pengunjung. Pantai Ana Ho'o dapat dimaksimalkan dalam pengembangannya sebagai obyek daya tarik wisata sebagai *trigger* menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun kelemahan wilayah ini yaitu mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang, maka diperlukan kebijakan yang mengantisipasi bencana tersebut.

Gambar 18. Panorama Pantai Ana Ho'o
Sumber: Dokumentasi Penulis

Potensi yang dimiliki Kelurahan Tetandara adalah keindahan Pantai Ana Ho'o. Namun demikian, diperlukan pengembangan pariwisata karena masih terdapat masalah di lapangan. Kelemahan dari lokasi pantai adalah sering terjadinya abrasi pantai. Kondisi yang terlihat di lapangan saat ini, tidak tertatanya kawasan pesisir di Pantai Ana Ho'o sehingga tampak kotor, serta kurangnya fasilitas penunjang yang mendukung sehingga masih kurang menarik untuk dikunjungi. Contohnya saja, penginapan di Kelurahan Tetandara yang mendukung kegiatan pariwisata hanya memiliki 1 buah di tahun 2016. Dengan demikian, diperlukan kegiatan insentif menggali investor. Pengembangan pariwisata menjadi isu strategis untuk menjadi fokus perhatian baik dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat luas. Sejauh ini masyarakat terlihat antusias untuk membangun obyek wisata pantai yang menjadi daya tarik wisata dan atraksi alam.

> *"Untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, masyarakatnya sangat mendukung dan juga nanti bisa sebagai tambahan penghasilan ekonomi. Tantangan yang kami hadapi sekarang ini adalah perilaku membuang kotoran di pesisir pantai oleh masyarakat yang ada disekitarnya."* (Kalsum, 45 tahun Kasi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Tetandara).

Dari asumsi masyarakat menyebutkan bahwa pemerintah belum optimal dalam pengelolaan obyek wisata. Bahkan masyarakat melihat

pemerintah baru fokus pada penataan permukiman. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya mengandalkan pada pantainya saja tetapi juga mengangkat adat istiadat masyarakat Kelurahan Tetandara.

Potensi wisata selain di kelurahan tetandara, terdapat juga pada kelurahan rukun lima yang mempesona. Berdasarkan potensi wilayah di kelurahan rukun lima memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan melalui Keindahan Pantai Ende di Kelurahan Rukun Lima yang persis berada di dalam Kabupaten Ende bagian kota menjadikan pantai ini sebagai destinasi yang menarik. Keindahan tersebut ditambah dengan pemandangan sunset yang sangat luar biasa bagi penikmat keindahan alam ini.

Gambar 19. Kondisi Pantai Ende
Sumber: Dokumentasi Penulis

Keindahan Pantai Ende dapat menjadikan pantai ini sebagai destinasi yang menarik hati bagi setiap pengunjung. Keindahan pantai saat ini dimanfaatkan masih hanya sebatas daerah kunjungan wisata kuliner dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Meski demikian, budaya membuang sampah masyarakat sekitar masih saja ditemui.

Destinasi wisata sangat bergantung pada keindahan dan kenyamanan wisatawan dalam menentukan tujuan wisatanya. Selain itu, faktor yang menjadi penentu yaitu atraksi atau ciri khas yang akan banyak mendatangkan para wisatawan dari seluruh daerah. Selain pantai wisata lain yang berpotensi untuk dikembangkan menjadin ikon dari kelurahan

rukun lima adalah Jalur pendakian menuju Gunung Meja. Potensi wisata ini dapat dikembangkan dengan optimal. Atraksi berupa Gunung Meja yang menjadi potensi pariwisata di Kelurahan Rukun Lima agar merawat gunung dan menata jalur pendakian dengan jelas sehingga para wisatawan dapat mendaki gunung dengan mudah dan diminati pengunjung.

Gambar 20. Informasi Pendakian Gunung Meja
Sumber: Dokumentasi Penulis

Tren masa kini memang menjadi sebuah daya tarik tersendiri dalam mengembangkan potensi daerah khususnya di Kelurahan Rukun Lima. Tren tersebut adalah petualangan bagi anak muda yang memiliki kegemaran menikmati keindahan alam dari puncak Gunung Meja yang ada di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.

Potensi wisata gunung semakin digemari oleh komunitas anak muda yang suka dengan tantangan akan keindahan alam dari ketinggian seperti dipuncak gunung. Pembangunan ITC (*information tourisme centre)* menuju pendakian di Gunung Meja memberikan peluang tersendiri bahwa akan ada potensi yang layak dan patut dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Rukun Lima melalui pemanfaatan potensi wisata tersebut secara berkelanjutan.

Mempromosikan puncak-puncak yang menyediakan keindahan di Gunung Meja dan *outbound spot* lain sangat dibutuhkan untuk masyarakat dapat berekreasi menjadi tempat favorit. Sehingga semakin banyaknya

pariwisata di Kelurahan Rukun Lima dapat semakin mendorong kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Selain wisata alam di kelurahan rukun lima memiliki wisata religi. Potensi wisata religi tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri karena merupakan sosok tokoh yang mendukung perjuangan sang Proklamator yaitu Ibu Amsi.

Gambar 21. Makam Ibu Amsi
Sumber: Dokumentasi Penulis

Ibu Amsi merupakan mertua dari proklamator Republik Indonesia (Ir. Soekarno) yang saat itu selalu mendukung perjuangan beliau saat pengasingan di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Dengan adanya makam ini, dapat menjadi potensi wisata religi/ziarah di kawasan ini selain wisata bahari. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Dengan potensi yang berbeda akan menjadi daya tarik wisata sendiri yang unik dan dikenal banyak masyarakat luas. Potensi yang dapat berkembang akibat adanya pariwisata adalah Wisata kuliner merupakan salah satu destinasi yang paling menarik di Kabupaten Ende termasuk yang ada di Kelurahan Rukun Lima. Salah satu yang menonjol kulinernya adalah *seafood* yang didapat langsung dari laut. Hal ini menjadi potensi dan mendukung kegiatan pariwisata di lokasi tersebut. Selain itu, Daya tarik wisata budaya seperti kerajinan tangan dan tenun ikat menjadi sebuah kekhassan yang ada diwilayah. Kelurahan Rukun Lima. Kekhasan tersebut, seperti atraksi budaya tenun ikat, zikir rebana khas pesisir, serta lantunan dari musik suling gendang dan gambus.

Pada dasarnya dengan melihat kondisi lapangan, selain kelurahan tetandara dan rukun lima banyak potensi-potensi yang menjadi peluang dalam memajukan wilayah nya. Selain itu maka di Kelurahan Paupanda juga memiliki potensi yang belum di optimalkan, wilayah ini memiliki potensi pariwisata dari segi atraksi alam maupun atraksi budaya. Untuk atraksi alam terdapat Pantai Paupanda meskipun akses menuju pantai tersebut tergolong rawan longsor. Akan tetapi, faktanya keindahan pantai ini juga menjadi potensi untuk menarik wisatawan. Di sisi lain, atraksi alam di kelurahan ini terdapat Gunung Iya. Panorama gunung ini sebagai andalan wisata alternatif dari pantai.

Gambar 22. Panorama Pantai Paupanda
Sumber: Dokumentasi Penulis

Untuk atraksi budaya, terdapat pawai ta'aruf di saat bulan ramadhan dan tarian Gawi yang dicetus oleh masyarakat Paupanda sendiri. Atraksi budaya di Kelurahan Paupanda yang juga bisa diandalkan sebagai faktor penarik adalah atraksi budaya kehidupan nelayan. Mulai dari mempersiapkan alat-alat tangkap kemudian menangkap ikan di laut dan menjualnya melalui proses pelelangan ikan. Hal ini hanya akan ditemukan di kawasan nelayan saja tidak akan ditemui di dalam area perkotaan atau desa di wilayah pegunungan.

Pada dasarnya, atraksi wisata di Kelurahan Paupanda memiliki banyak potensi, bahkan terdapat atraksi alam dan budaya. Namun demikian, potensi ini belum berkembang karena keterbatasan SDM di wilayah tersebut. Di satu sisi, pemerintah daerah belum mendukung maksimal terhadap pengembangan pariwisata di Kelurahan Paupanda.

D. KONDISI TATA RUANG DI KAWASAN PESISIR

Upaya pengembangan wilayah di Kecamatan Ende Selatan sangat bergantung pada kondisi alam, terutama karena daerah pesisir. Di samping itu, adanya beberapa masalah di Kecamatan Ende Selatan yaitu ancaman rawan bencana longsor, tsunami/gelombang pasang karena berkaitan dengan ancaman gempa bumi, ancaman letusan gunung berapi yaitu Gunung meja dan Gunung Iya. Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata, ancaman *debris flow*, ancaman kekeringan rendah terutama pasokan air bersih, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dari sisi pendidikan dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), kemiskinan karena rendahnya pendapatan yaitu berkisar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 dalam satu bulan dengan satu rumah berisi 4-10 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan kecil sebanyak 1.465 jiwa atau 86 kelompok dengan pendapatan di bawah UMK (sumber: Kabupaten Ende Dalam Angka 2014).

Dari sisi kualitas permukiman dapat tergolong rendah (rumah tidak layak huni beratap seng dan berdinding bambu, jalan yang tidak layak, masih banyak yang belum memiliki sanitasi sehingga buang air besar di pesisir pantai, dan sebagainya) menjadi sasaran agenda Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Bahkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kabupaten Ende Tahun 2014, Kecamatan Ende Selatan memiliki bobot 8,75 yang tegolong dalam kawasan permukiman penanganan prioritas tinggi atau urutan ketiga setelah Kecamatan Ende Timur (9,35) dan Kecamatan Ende Utara (9,25).

Tabel 8 Indikasi Kawasan Permukiman Prioritas

No	Klasifikasi Kawasan Prioritas	Nilai Bobot	Urutan Prioritas Kawasan Penanganan
1	Kawasan Permukiman Penanganan	9,35 9,25 8,75	i. Ende Timur ii. Ende Utara iii. Ende Selatan

No	Klasifikasi Kawasan Prioritas	Nilai Bobot	Urutan Prioritas Kawasan Penanganan
	Prioritas Tinggi (bobotnya 7,39%-9,35%)	8,45 7,95 7,45	iv. Kalimutu v. Ende Tengah vi. Detusoko
2	Kawasan Permukiman Penanganan Prioritas Sedang (bobotnya 5,43%-7,38%)	7,35 7,15 7,05 6,95 6,95 6,45 6,35 6,25 6,15 5,75 5,65	7. Nangaba 8. Ndori 9. Kota Baru 10. Wolowaru 11. Lio Timur 12. Ndona 13. Nangapanda 14. Detukeli 15. Maukaro 16. Muarole 17. Lepembusu Kelesoke
3	Kawasan Permukiman Penanganan Prioritas Rendah (bobotnya 3,45%-5,42%)	5,35 5,35 4,35 3,45	18. Demulaka 19. Pulau Ende 20. Wolojita 21. Welamosa

Sumber: RP2KP Kabupaten Ende 2014

Kecamatan Ende Selatan di Kabupaten Ende termasuk dalam kategori wilayah 3T yaitu Terdepan, Terpencil, dan Terbelakang. Dengan melihat latar belakang kondisi di Kecamatan Ende Selatan maka terdapat sejumlah kompleksitas permasalahan di lapangan. Salah satunya dari sisi tata ruang, terdapat ancaman bencana banjir akibat air pasang bahkan ke arah ancaman terjadinya tsunami di seluruh kelurahan di Kecamatan Ende Selatan. Selain ancaman tsunami, terdapat pula ancaman bencana letusan gunung berapi dan bencana kekeringan tingkat rendah karena faktor musim hujan yang lebih pendek yaitu 3-4 bulan dibandingkan musim kemarau.

Bila ditinjau di lapangan, Kecamatan Ende Selatan lebih mumpuni terhadap sektor pariwisata yang mengandalkan potensi laut utamanya, meskipun terdapat atraksi lainnya berupa gunung. Kawasan pesisir cenderung dikaitkan dengan potensi perikanan yang selalu menjadi andalan bagi pergerakan ekonomi masyarakat sekitar. Kecamatan Ende Selatan dalam produktifitas hasil lautnya, berupa ikan dapat dikatakan kegiatan unggulan. Hal ini dikarenakan kecamatan tersebut tergolong peringkat ketiga se-Kabupaten Ende dalam hal produktifitas hasil lautnya.

Pariwisata akan memanfaatkan potensi lokalitas yang ada menjadikan sumber daya alam menjadi modal potensial. Pengembangan ini ditujukan untuk pengangkatan kesejahteraan masyarakat terutama kaum nelayan di kawasan pesisir. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya pantai sebagai tulang punggungnya, namun perencanaannya harus melihat secara holistik, terpadu, dan terarah. Salah satunya, diperlukan penataan ruang di kawasan pesisir, terutama sinkronisasi antara penataan permukiman warga, aktivitas kenelayanan, dan potensi wisata pesisir. Kondisi kawasan permukiman yang masih perlu ditata memungkinkan adanya peluang untuk menciptakan kawasan wisata tematik.

Kegiatan pariwisata akan menjadi produk utama pembangunan daerah Kecamatan Ende Selatan. Hal ini juga didukung oleh tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ende dalam Pemerintah Kabupaten Ende Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 yaitu terwujudnya tata ruang Kabupaten Ende yang berdaya saing, berbasis pertanian yang didukung oleh potensi kelautan, perikanan, pariwisata, dan berwawasan lingkungan. Implikasinya adalah Kecamatan Ende Selatan akan menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Dalam kebijakan dan strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Ende, salah satunya adalah pengembangan kawasan pesisir selatan sebagai kawasan penangkapan yang meliputi Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ndona, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Ndori, dan Kecamatan Lio Timur.

Pariwisata juga harus didukung oleh infrastruktur pendukung lainnya. Salah satunya adalah sistem jaringan persampahan, meskipun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya terdapat satu yaitu di Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan. Selain itu, untuk memperluas jaringan persampahan maka terdapat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 7 unit yang menyebar di Kecamatan Ende Selatan. Dengan demikian, dari sisi sistem jaringan persampahan seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Ende Selatan. Di samping itu, ketersediaan TPS maupun TPA akan mendukung aktivitas sektor pariwisata di daerah tersebut.

Dalam sistem perwilayahan, Kecamatan Ende Selatan tergolong ke dalam wilayah pengembangan I meski bukan seperti Kecamatan Ende Tengah yang merupakan pusat wilayah pengembangan I. Namun demikian, peluang pembangunan juga akan meluas ke Kecamatan Ende Selatan. Salah satu aspek yang akan direncanakan pengembangannya adalah pengadaan Terminal tipe B sebagai terminal angkutan penumpang. Hal ini mempermudah akses bagi penduduk sekitar untuk bepergian jika menggunakan transportasi umum. Dari sisi prasarana transportasi laut akan dilakukan pengembangan pelabuhan perikanan di Kelurahan Paupanda. Adapun tujuannya adalah mendukung kegiatan agropolitan perikanan bagian selatan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa proses pengembangan harus tetap memperhatikan lingkungan. Hal ini mengingat bahwa Kecamatan Ende Selatan sebagai kawasan sempadan pantai yang tergolong dalam kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, kawasan pertanian lahan basah, kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya berupa rumput laut, pengembangan kawasan industri sedang seperti perikanan, pengembangan kawasan industri air minum kemasan, dan pengembangan kawasan industri rumah tangga souvenir. Di samping itu, merupakan kawasan wisata Gunung Meja dan kawasan permukiman perkotaan.

“Berbagai opini mengatakan bahwa *opportunity cost* nelayan sangat kecil dan hanya sebatas menutup beban biaya hidup semata. Dengan kata lain nelayan tidak memiliki banyak alternatif lain sebagai mata pencahariannya. Keadaan yang sebenarnya terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan”.

BAB 3
INOVASI MODEL PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK

Model strategi pengembangan sebagai daya tarik wisata dalam serangkaian usaha yang sistematis dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam usaha meningkatkan dan memperbaiki daya tarik wisata sehingga keberadaan daya tarik wisata itu lebih diminati oleh wisatawan.Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan.

Salah satu konsep pengembangan wisata di Indonesia adalah penyelenggaraan kampung tematik. Menurut Tamara & Rahdriawan (2018) dan Kloczko-Gajewska (2014), kampung tematik bertujuan untuk menciptakan ruang berciri khas, mengatasi kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong perekonomian lokal, menggali potensi kampung, peningkatan kualitas permukiman, serta menggali gagasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adopsi konsep kampung tematik tidak hanya strategis dalam pengembangan sektor pariwisata saja tetapi juga mampu mengurangi angka permukiman kumuh dengan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

A. ANALISIS SWOT KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN ENDE SELATAN

Fungsi dari analisis SWOT adalah untuk memberikan gambaran terkait kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal dapat diketahui melalui tinjauan potensi dan masalah, sementara kondisi eksternal diketahui dengan cara peninjauan dari sisi peluang dan ancaman. Tiap-tiap kelurahan akan ditampilkan analisis SWOT yang diharapkan mampu mengidentifikasikan karakteristik di setiap wilayahnya.

1. Kelurahan Tetandara

Kelurahan ini dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang melimpah dan alam yang indah, maka diperlukan keseriusan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri dalam mengelola

potensi Pantai Ana Hoo yang menjadi destinasi wisata yang menarik untuk di kunjungi.

a. Kekuatan

1) Adanya gotong royong sesama masyarakat yang tinggi. Hal ini tercermin ketika masyarakat bersama-sama menarik sampan/perahu ke laut.
2) Memilik organisasi masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok tenun ikat, komunitas anak cinta lingkungan (usia mulai dari TK – SMP sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi peran aktif dalam pengembangan pariwisata.
3) Kelurahan Tetandara memiliki potensi wisata yang indah untuk dikunjungi wisatawan dapat melihat matahari tenggelam hal ini menjadi daya tarik untuk kemudian dapat diunggulkan menjadi daya tarik wisata Pantai Ana Hoo di Kelurahan Tetandara.
4) Merupakan kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasana pantai identik dengan kelestarian ekosistem yang ada dipantai. Maka lingkungan sangat menjadi obyek yang sentral untuk dikembangkan menjadi kawasan yang strategis sektor pariwisata.

b. Kelemahan

1) Terbatasnya kualitas SDM, dalam pengelolaan diperlukan SDM yang mempunyai *skill* maupun pengetahuan dalam memberikan inovasi dan kreativitas yang mendukungpengembangan pariwisata.
2) Tidak mendukungnya sarana prasarana infrastruktur di pantai yang menjadi kekurangan pada pengembangan pariwisata berupa fasilitas seperti tempat persinggahan atau gardu pandang.
3) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan yang masih membuang sampah sembarangan. Beberapa bahkanmerusak fasilitas public sehingga kurang sadar terhadap pentingnya pariwisata.
4) Lingkungan kumuh menjadi problematika dalam upaya perbaikan, tampak lingkungan yang kotor dan menjadi faktor

tidak diminatinya pariwisata di Kelurahan Tetandara karena lingkungan yang tidak nyaman dan menarik.

c. Peluang

1) Membuka lapangan pekerjaan, peran pariwisata dapat memberikan manfaat untuk perekonomian masyarakat dalam memberantas kemiskinan melalui bekurangnya jumlah pengangguran akibat adanya pariwisata yang berkembang.
2) Dengan adanya kerjasama dengan investor/pihak swasta pengembangan dan pembangunan obyek wisata pantai dapat terrealisasikan dengan baik.Tujuannya adalah meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata.
3) Promosi obyek wisata pantai adalah memanfaatkan teknologi yang ada dan terus berkembang. Dengan melalui media sosial yang semua kalangan dapat terakses dengan mudah.
4) Revitalisasi kawasan kumuh dengan menjadikan kawasan lingkungan yang mempunyai ciri khas tertentu seperti mengembangkan rumah adat.

d. Ancaman

1) Dengan orientasi pembangunan sektor perekonomian, kelestarian lingkungan tidak diperhatikan sehingga terjadinya kerusakan ekosistem alam.
2) Kerusakan fasilitas penunjang pariwisata yang dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas.
3) Berkembangnya wisata lain yang berdampak kepada persaingan terutama wisata sekitarnya.Berkembang pesatnya pariwisata ditempat lain berakibat kepada persaingan antar daerah.
4) Bencana alam gempa yang mengancam masyarakat pesisir pantai yang harus diwaspadai sehingga jika terjadi tsunami dapat dipersiapkan.

2. Kelurahan Rukun Lima

Kelurahan Rukun Lima mempunyai banyak potensi wisata yang dapat menjadi obyek daya tarik. Dengan analisis swot dapat bermanfaat untuk bertindak dalam membuat strategi mendatang.

a. Kekuatan

1) Potensi pariwisata ziarah, sebagai tempat dimakamkannya Ibu Amsi yaitu mertua presiden pertama Indonesia dapat dijadikan wisata religi atau ziarah. Dari ketiga kelurahan lokasi studi, hanya di Kelurahan Rukun Lima yang memiliki atraksi wisata ziarah.
2) Pendakian Gunung Meja menjadi ciri khas yang menjadi salah satu keunggulan Kelurahan Rukun Lima agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.
3) Keindahan Pantai Ende identik dengan suasana yang memberikan kenyamanan wisatawan sehingga wisatawan ingin kembali berkunjung lagi.
4) Atraksi budaya tenun ikat, zikir rebana khas pesisir, serta alunan musik suling gendang dan gambus. Atraksi ini dapat melestarikan budaya tradisional yang juga menjadi daya tarik dalam mengembangkan pariwisata.

b. Kelemahan

1) Belum memiliki ciri khas atraksi pariwisata yang menampilkan keunggulan dari pariwisata Pantai Ende karena kondisi pantainya tergolong kotor.
2) Tidak adanya bantuan dana pariwisata dari pemerintah yang belum memfokuskan perekonomian ke sektor pariwisata.
3) Kurang perhatian sektor pariwisata dari pemerintah yang menjadi dukungan penting agar fokus pembangunan dapat tercapai namun pemerintah masih lebih memfokuskan ke sektor perikanan
4) Banyak para pemuda yang putus sekolahsehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan merantau ke luar daerah.

c. Peluang

1) Berkembangnya fasilitas pelayanan publik akomodasi seperti hotel dan rumah makan sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini tentu akan memberikan peluang banyak investor yang ingin bekerjasama.
2) Dengan cepatnya teknologi menyebar, pariwisata dapat dengan cepat terkenal hanya melalui perantara media sosial.
3) Target pasar yang lebih luas, bagi pengrajin tenun ikat menjadi pangsa pasar untuk menjual oleh-oleh khas ende.
4) Pemuda menjadi produktif akibat adanya pariwisata dapat memberikan inovasi anak muda yang meskipun tidak berpendidikan tinggi dan dapat melanjutkan kembali

d. Ancaman

1) Dengan berkembangnya wilayah, budaya negatif akibat modernisasi dapat merusak budaya tradisi kearifan lokal.
2) Rusaknya ekosistem pantai karena banyak bekas limbah yang mengalir ke pantai sehingga terancam mencemari lingkungan pesisir pantai.
3) Jika pengelolaan terhambat oleh pesaingan karena tidak menariknya wisata tersebut membuat pariwisata tersebut menjadi sepi pengunjung karaena kalah saing dengan wisata lain.
4) Abrasi pantai akibat pengikisan laut yang merusak pantai dan mengancam ekosistem.

3. Kelurahan Paupanda

Dalam proses pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Kelurahan Paupanda sangat strategis untuk dikembangkannya potensi wisata pantai pesisir. Oleh karena itu, dengan melihat beberapa kekuatan dan peluang dapat dimaksimalkan menjadi pariwisata yang banyak diminati oleh para pengunjung sehingga ancaman dan tantangan dapat teratasi.

a. Kekuatan

1) Antusias masyarakat dalam membangun pariwisata. Dorongan masyarakat sangat kuat ketika dihadapkan dengan persoalan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, semangat masyarakat untuk memfokuskan bidang pariwisata diharapkan akan memberikan manfaat ke depannya.
2) Daya tarik berupa pasar ikan.

   Masyarakat Kelurahan Paupanda memiliki pasar ikan yang dapat menjadi keunggulan dalam pengembangan pariwisata.Pasar tersebut menjual hasil tangkapan para nelayan.
3) Rasa gotong royong masyarakat Kelurahan Paupanda tergolong tinggi. Hal ini sangat menjadi kunci dalam membangun pariwisata yaitu antar masyarakat dapat saling bersinergi
4) Atraksi budaya yang masih melekat di masyarakat Kelurahan Paupanda menjadi upaya dalam mengagendakan kegiatan dalam pengembangaan pariwisata yaitu pawai ta'aruf disaat bulan Ramadhan, tarian Gawi yang dicetus oleh masyarakat sendiri.

b. Kelemahan

1) Lemahnya regulasi pariwisata

   Regulasi sebagai pondasi masyarakat akan kejelasan mengelola daerahnya dengan arah yang tepat dan sebagai wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan wisata. Namun demikian, permasalahannya masyarakat belum dapat berperan aktif karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur arah pembangunan ekonomi di Kelurahan Paupanda.
2) Tidak peduli kelestarian lingkungan

   Masyarakat masih membuang sampah bukan pada tempatnya dan merusak fasilitas yang ada.Kesadaran msyarakat yang rendah menjadi permasalahan dalam menghambat pembangunan pariwisata di Kelurahan Paupanda.

3) Pengelola wisatanya belum teregenerasi. Pengelola wisata didominasi orang-orang tua, generasi mudanya kebanyakan pergi merantau.
4) Tidak memiliki lembaga kepariwisataan yang mengelola sumber daya di Kelurahan Paupanda.

c. Peluang

1) Pengembangan sektor pariwisata memberikan peluang dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kelurahan Paupandauntuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi dalam membangun bersama potensi daerah.
2) Pariwisata ikut memajukan sektor lain. Dengan adanya peran pariwisata banyak memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat. Pariwisata ikut turut andil dalam memajukan sektor lain seperti perdagangan. Suatu wilayah yang memiliki pariwisata yang baru akan mendatangkan wisatawan baik itu dari dalam maupun daerah lain. Dengan adanya pariwisata akan mampu membuka peluang usaha dagang bagi masyarakat lain.
3) Para pemuda tidak merantau ke luar daerah. Dengan majunya pariwisata membuat para pemuda yang semula merantau akan kembali ke daerah sendiri membangun pariwisata.
4) Pangsa pasar kelompok ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kelompok ini merupakan kelompok ibu-ibu yang bekerja sebagai pengrajin tenun ikat. Dengan adanya pariwisata akan ada kesempatan membuka pangsa pasar yang luas sebagai oleh-oleh khas.

d. Ancaman

1) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kepadatan penduduk di wilayah Kelurahan Paupanda. Implikasinya adalah pertumbuhan permukiman yang sporadis dan organis.
2) Bencana alam berupa wilayah rawan longsor yang membuat tidak adanya akses jalur ke tempat tersebut.

3) Terjadinya perselisihan dalam pengelolaan lembaga pariwisata seperti lahan parkir, pemandu, dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang adil untuk kebersamaan masyarakat membangun wisata.
4) Hilangnya nilai-nilai budaya di Kelurahan Paupanda karena arah kebijakan yang tidak tepat akan membuat pariwisata akan tercampuri dengan budaya dari luar.

4. Garis Merah Analisis SWOT Di Kawasan Studi

Untuk mempermudah dalam melakukan rekomendasi terkait pengembangan kampung tematik di Kabupaten Ende, maka diperlukan sinkronisasi analisis SWOT pada lokasi studi. Hal ini memudahkan dalam melakukan generalisasi analisis SWOT di tiap-tiap lokasi studi. Harapannya dengan adanya sinkronisasi analisis SWOT maka didapatkan rekomendasi pemodelan pengembangan kampung tematik di Kabupaten Ende.

Garis merah sebagai tanda bahwa sejauh mana langkah dalam memanfaatkan potensi daerah. Fokus perbaikan dan peningkatan yang akan datang dapat terarah dan tercapai melalui analisis swot dari ketiga wiayah yang berada di Kecamatan Ende Selatan secara karateristik wilayah memiliki potensi yang mirip dan memiliki potensi pariwisata pantai yang belum dapat dimaksimalkan.Agar dapat mempermudah menyusun strategi pengembangan kawasan kedepan. Dapat di lihat dari matrik swot kawasan studi sebagai berikut:

Tabel 9 Matriks SWOT Kawasan Studi

Faktor Internal / Faktor Eksternal	***Strength*** **(Kekutan) S**	***Weakness*** **(Kelemahan) W**
	1. Antusias keinginan masyarakat dalam membangun pariwisata 2. Rasa Gotong royong masyarakat paupanda tinggi 3. Daya tarik budaya atraksi wisata lokal 4. Potensi alam sangat indah dengan pemandangan pegunungan dibalik pantai	1. Lemahnya regulasi pariwisata 2. Tidak peduli kelestarian permukiman dan lingkungan 3. Tidak memiliki lembaga kepariwisataan 4. Masyarakat usia muda banyak yang merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan
Opportunity **(Peluang) O**	**Strategi S - O**	**Strategi W - O**
1. Perekonomian masyarakat meningkat 2. Pariwisata ikut memajukan sektor lain 3. Para pemuda produktif sehingga membangun daerah sendiri	1. Pengembangan industri akomodasi berbasis arsitektur etnis lokal 2. Peningkatan penghasilan masyarakat sekitar 3. Peningkatan kapasitas SDM 4. Pengembangan industri destinasi pariwisata 5. Pengembangan industri	1. Peningkatan kualitas permukiman di Kecamatan Ende Selatan. 2. Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan pesisir Kecamatan Ende Selatan. 3. Penciptaan iklim

4. Pangsa Pasar Kelompok Kerajiinan tenun ikat.	kreatif berbasis potensi lokal.	investasi yang kondusif.
***Threats* (Ancaman)** **T**	**Strategi** **S-T**	**Strategi** **W - T**
1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kepadatan penduduk 2. Perubahan *mandset* masyarakat terhadap pariwisata hanya berfokus terhadap profit tidak mementingkan kelestarian alam. 3. Terjadinya perselisihan dalam pengelolaan lembaga pariwisata seperti lahan parkir, pemandu dan sebagainya. 4. Hilangnya nilai-nilai budaya lokal dan masuknnya budaya negatifkarena globalisasi	1. Mengembangkan industri transportasi 2. Peningkatan sadar wisata dan sapto wisata 3. Peningkatan kualitas permukiman masyarakat	1. Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu 2. Para pemangku kepentingan mendukung aktivitas pengembangan wisata kampung nelayan

Berdasarkan matriks analisis SWOT diatas. Terlihat garis besar potensi dan permasalahan dalam ketiga wilayah tersebut. Bahwa wilayah tersebut menjadi kriteria pengembangan wisata kampung tematik dengan strategi yang tepat. Namun beberapa hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Pemberdayaan Masyarakat

   Dari ketiga kelurahan tersebut terbatasnya SDM menjadi persoalan pokok yang perlu diatasi.Hal ini berupa pengembangan SDM agar dapat mengelola potensi pariwisata dengan baik.Sosialisasi, pelatihan dan kegiatan-kegiatan pendampingan dapat diterapkan agar potensi dari SDM dapat membawa perubahan positif untuk membangun pariwisata yang maju dengan berbasis lingkungan dan budaya.

   Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukanuntuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi pembangunan kedepan, sehingga berkontribusi positif untuk meningkatkan taraf perekonomian yang lebih baik. Dengan adanya pariwisata dapat berkembangnya banyak sektor seperti sektor perdagangan banyak masyarakat membuka usaha warung makan, sentra industri kreatif (oleh-oleh khas) tenun ikat dan souvenir lain dan banyak berdirinya hotel danpariwisata secara tidak langsung dapat berpengaruh besar bagi masyarakat.

2. Alokasi dana Pengembangan Pariwisata

   Alokasi dana pengembangan pariwisata sangat penting untuk membangun fasilitas, sarana prasarana agar dapat mencirikan pariwisata di masing-masing wilayah tersebut. Pengadaan alat outbound dan pembuatan spot-spot unik untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke pantai dan gunung di Kecamatan Ende Selatan.

   Masyarakat sebagai aktor pembangunan, maka kelembaagaan mempunyai peran dalam mewadahi segala bentuk usaha dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada.Kesadaran masyarakat masih rendah hal ini dengan adanya kelompok sadar wisata dapat meningkatkan partisipsi masyarakat agar dapat lebih menjaga lingkungan minimal tidak membuang sampah sembarangan.

3. Komitmen Bersama dalam Pengembangan Pariwisata

   Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat.Hal ini berkaitan dengan keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Para *stakeholders* baik melalui Pemerintah, pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, pemerintah kelurahan, dapat saling bersinergi membangun pariwisata.

   Penguatan regulasi yang jelas, serta rancangan-rancangan arah kebijakan kedepan seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Faktor penentu keberhasilan kebijakan yang membawa manfaat positif demi kemajuan pariwisata yang memposisikan masyarakat sebagai subyek/pengeola pariwisata.

4. Mitigasi Bencana dan kelestarian lingkungan

   Pengembangan pariwisata memperhatikan kepentingan dan keselamatan dalam mengelola kesiapan dalam menghadapi bencana yang tak terduga. Bencana di kawasan pantai seperti tsunami, rawan longsor, air pasang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, strategi mitigasi sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata kedepan.

   Pariwisata akan berdampak buruk jika tidak mempehatikan faktor-faktor kelestarian lingkungan ekosistem pantai yang seharusnya dapat dijaga, dirawat, dan dilindungi. Namun banyak yang rusak akibat masyarakat yang memiliki kesadaran rendah. Edukasi, pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan adanya sadar wisata dengan contoh melakukan kerja bakti membersihkan pantai dapat merawat pantai menjadi bersih dan indah.

5. Penataan Permukiman Kumuh

   Penataan permukiman kumuh menjadi urgensi agar penataan lingkungan dapat menunjang keindahan sebagai obyek wisata yang menjadi daya tarik.Keunikan suatu wilayah dapat dibentuk dari penataan perbaikan kembai dengan jiwa masyarakat yang masih menjunjung gotong royong.

   Pembuatan rumah adat ende dengan ciri khas warna warni akan menarik perhatian banyak orang dan akan menajdi salah satu

pariwisata berdaya saing di Indonesia dan mampu bersaing dengan mancanegara. Dengan adanya pembangunan rumah adat ini tidak hanya menjaga kelestarian dari budaya lokal tetapi juga memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin.

B. KONSEP PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG TEMATIK

Pengembangan wisata kampung tematik merupakan upaya alternatif dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah pesisir. Menurutnya Murphy dalam Hadiwijoyo (2012), produk wisata dan konsumennya harus *visible* bagi penduduk lokal yang seringkali sangat sadar terhadap dampak *tourism.* Sehubungan dengan hal tersebut, maka pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Karena masyarakat yang harus menanggung dampak kumulatif dari perkembangan wisata dan mereka butuh untuk memiliki input yang lebih besar, bagaimana masyarakat dikemas dan dijual sebagai produk pariwisata.

Menurut Inskeep (dalam Marceilla Hidayat, 2011) terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:

a. *Continous Incremental*, and *Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor *feed back* yang ada.
b. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan tehnik analisa sistem.
c. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
d. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
e. *Environmental and sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajemenkan dengan cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan

kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.

f. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
g. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.
h. *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas.

Menurut Godfrey & Clarke (dalam marceilla Hidayat, 2011) “Goals and Objectives” yang realistis adalah inti untuk pengembangan pariwisata yang bersukses.*Tourism Action Steps* menyangkut siapa, apa, dimana dan bagaimana yang menjelaskan bagaimana caranya *goals and objectives* akan dilaksanakan. Tindakan pariwisata menyatakan apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan dan oleh siapa. *Tourism Action Steps* harus jelas dan mempunyai jangka waktu yang ditentukan dan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tindakan itu dapat didelegasikan secara individu atau berkelompok.

TOURISM STRATEGY

Gambar 23. Strategi Pariwisata
Sumber : Godfrey & Clarke, 2000

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa *Goals* biasanya termasuk aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan pengunjung, diversifikasi pasar pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi local, dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Sementara *objectives* adalah lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aktual.*Objectives* bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu mencapai *goal-goal* pembangunan. Jadi *objectives* harus lebih realistis, dapat diukur dan mampu dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tindakan pariwisata dapat dilakukan melalui serangkaian perencanaan yang matang dan terarah untuk dapat tercapainya tujuan yang diharapkan.Perencanaan adalah proses kumpulan kebijakan dan bagaimana mengimplementasikannya. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Claire A. Gunn dalam Hidayat (2011) yang menegaskan bahwa ada beberapa hal penting di dalam fungsi kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang sangat penting di dalam kegiatan kepariwisataan yaitu:

1) Perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, membutuhkan perubahan-perubahan yang membangun, disamping pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas atraksi yang dapat dijual.
2) Kebijakan kepariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dari kegiatan promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian.
3) Perencanaan kepariwisataan memerlukan kerjasama publik dan privat agar segala harapan *stakeholders* bisa terpenuhi.
4) Perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat semua perencanaan, mendukung pembangunan pariwisata yang baik hingga pada tingkat destinasi.
5) Perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha (bisnis) untuk memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan daerah.
6) Kebijakan harus dapat menghubungkan bisnis dengan pemerintah dan *non-profit atraction*, seperti kebijakan perencanaan usaha atraksi (alam dan budaya) harus didukung oleh bisnis perjalanan dan akomodasi lainnya.

Wisata kampung tematik telah berhasil dan sukses diterapkan dengan memberdayakan masyarakat. Kesuksesan tersebut menggambarkan bahwa pariwisata dapat menjadi daya tarik wisata jika memiliki nilai ciri khas dari wisata lainnya.

Gambar 24. Kampung Warna Warni Jodipan
Sumber: merahputih.com, *diakses pada tanggal 11 September 2019*

Kampung warna warni jodipan yang berada di Kota Malang, Jawa Timur merupakan salah satu kampung tematik yang kreatif dan inovasi. Kampung ini mempunyai ciri khas yang menarik secara fisik mengubah wilayah kumuh menjadi nilai seni yang banyak diminati wisatawan. Objek wisata buatan di Kota Malang dan Batu jumlahnya cukup banyak dan semakin beragam. Kebanyakan objek wisata buatan ini bermodal besar dan didukung oleh teknologi dan tenaga-tenaga kreatif. Model pengembangan ini secara karakteristik dapat dikembangkan dan diadopsi ke dalam model pengembangan kampung tematik di daerah lain.

Contoh lain kampung tematik di Indonesia, antara lain: Kota Semarang memiliki Kampung Hidroponik, Kota Yogyakarta memiliki Kampung Batik, dan Kota Manado memiliki Kampung Nelayan. Pengembangan kampung tematik di Indonesia kerap menemui kendala sepanjang perjalanan waktu. Beberapa kendala dalam pelaksanaan konsep kampung tematik (Tamara & Rahdriawan, 2018), yaitu: kurangnya perencanaan konsep kampung, teknis proses pelaksanaan, ketidaksesuaian tema dengan potensi kampung, dan minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat.

Pelaksanaan konsep kampung tematik berdasarkan skema inovasi sosial memiliki tiga tahapan.**Tahap pertama** merupakan pemetaan problematika yaitu: masyarakat bersama mencari ide/gagasan dalam mengembangkan kampungnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. **Tahap kedua** adalah menentukan tema kampung dengan menemukan sekelompok orang yang tertarik untuk dapat bekerja sama dalam menerapkan gagasan atau tema pada kampungnya. Selanjutnya **tahap ketiga** adalah delineasi dan koordinasi melalui gagasan atau tema yang kemudian dimodifikasi oleh berbagai aktor yang terlibat hingga akhirnya diimplementasikan secara nyata pada wilayahnya. Berdasarkan tiga tahap pelaksanaan konsep kampung tematik dijelaskan pula bahwa kampung tematik dapat berkembang atas kelayakan ide atau tema.

Konsep pengembangan kampung tematik merupakan upaya positif yang mendorong untuk masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian dari tempat tersebut dapat memberikan pendapatan selain menjadi nelayan. Kampung tematik yang berhasil merupakan kampung yang melibatkan kelompok masyarakat

untuk dapat mengimplementasikan tema yang sesuai dengan kampungnya. Sebaliknya, kampung tematik dikatakan tidak berhasil apabila dilihat dari ketidakikutsertaan masyarakat dalam implementasi tema sehingga tema tidak dapat berjalan hingga ditinggalkan.

Pengembangan kampung tematik tidak hanya dari sisi fisiknya saja namun juga memperhatikan aspek nonfisik. Dalam hal ini adalah sumberdaya manusianya yaitu masyarakat sekitar sebagai penyelenggara kampung tematik. Pengembangan komunitas lokal juga memberikan pengaruh terhadap masa depan pengembangan pariwisata (Hanafiah, Jamaluddin, & Zulkifly, 2013). Berdasarkan masalah pelaksanaan konsep kampung tematik di atas, maka diperlukan pemberdayaan yang intensif .Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ternyata dibutuhkan sosok pendamping dengan pendekatan sosio ekonomis yang berarti keberpihakan terhadap masyarakat lemah dan miskin, khususnya kelompok nelayan (Djata, 2018). Ada korelasi positif antara kehadiran pendamping dengan keberlanjutan pengembangan kampung tematik.

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan. Menurut Adimihardja dalam Sunaryo (2013) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power*(daya) atau *empowering* kepada golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yangmenggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam pariwisata (Sunaryo,2013:217):

Gambar 25. Ilustrasi Pemangku Kepentingan
Sumber :Sunaryo (2013:217)

Berdasarkan bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pola rantai hubungan yang saling berkaitan dalam mewujudkan pelaksanaan pariwisata. Perlu adanya keseimbangan antara peran pemerintah maupun swasta dalam mendukung peran partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan pariwisata. Sunaryo (2013) mengemukakan bahwa prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/ industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait. Selanjutnya Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya *good tourism governance* akan dapat mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait.

   Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi,misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan

pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan.

   Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan, meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Mayarakat) bidang pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal.

   Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta hotel, restoran, cindera mata, transportasi wisata. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang strategis.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut.

   Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

5. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat.

   Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat di akomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung Lingkungan.

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada

7. Monitor dan Evaluasi Program

   Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

8. Akuntabilitas Lingkungan

   Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

   Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan profesional.

10. Promosi dan Advokasi

    Nilai Budaya Kelokalan Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap (sense of place)* dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatandan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan

Pariwisata yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan memiliki daya tarik sendiri dalam mengembangkannya. Daya tarik wisata

menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan demikian, diperlukan inovasi dalam perencanaan pembangunan pariwisata terkait penyelenggaraan Obyek Daya Tarik Wisata.

Daya tarik wisata itu harus dikelola sedemikian rupa agar keberlangsungannya dan kesinambungannya terjamin. Adapun daya tarik wisata sebagai berikut:

a. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
b. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, dan tempat hiburan (Ismayanti, 2010).

Dalam tercapainya pariwisata yang memiliki potensi dalam sektor pariisata bahari, dengan menonjolkan keanekaragaman masing-masing daerah. Maka wisata Kampung Tematik berbentuk Kampung Nelayan sangat cocok untuk diterapkan. Menurut Raharjo (2014), beberapa jenis kampung terdapat di Indonesia salah satu jenis kampung tersebut adalah kampung nelayan. Kampung nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman yang dihuni oleh masyarakat dengan pola kerja yang homogen, yaitu bermata pencaharian di bidang usaha perikanan laut.

Keadaan perumahan dan permukiman masyarakat nelayan kurang memadai. Struktur masyarakat nelayan secara umum merupakan struktur dua kelas atau dua lapisan, yaitu juragan dan nelayan kecil. Kehidupan masyarakat nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam (musim) dan faktor ekonomi. Kampung nelayan adalah sarana tempat tinggal bagi nelayan untuk menjalani masa hidupnya yang berfungsi sebagai kebutuhan dasar.

Pada umumnya rumah tempat tinggal nelayan berdekatan dengan tempat mata pencaharian yaitu pantai/sungai. Lokasi rumah nelayan dekat sekali dengan mata pencaharian pokok tempat berusaha yaitu sungai atau pantai. Kampung nelayan adalah bagian permukiman yang kurang terencana, karakteristik dan stratifikasi nelayan yang terpetakan secara sosiologis terdiri dari kelompok atas (punggawa), menengah (pemilik) dan

bawah (sawi), kelompok buruh merupakan mayoritas kurang mampu (Abdullah dalam Rusli 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaanya. Bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat (Dahuri R. 2001). Permukiman yang baik dan tertata akan tercipta apabila memenuhi kriteria ideal aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik meliputi letak geografis, lingkungan alam dan binaan, serta sarana dan infrastruktur. Sedangkan aspek nonfisik meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya (Silas, 1985).

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir demi kesejahteraan sosial masyarakat. Pengembangan kepariwisataan memerlukan peran semua pihak dalam hal ini untuk mensejahterakan masyarakat. mendorong pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif mengelola sumber daya untuk dijadikan obyek wisata dan pelestarian budaya lokal.

Secara *das sollen,* daya tarik wisata merupakan istilah lain atraksi wisata. Dengan demikian, diperlukan inovasi dalam perencanaan pengembangan pariwisata terkait penyelenggaraan daya tarik wisata. Menurut Sugianto dan Sulastiningrum dalam Gunardi (2010) komponen pariwisata meliputi:

1) Objek dan daya tarik wisata objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya atau tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi atau yang menjadi sasaran bagi wisatawan.
2) Sarana dan fasilitas meliputi:
   a) Akomodasi

Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Akomodasi ini bisa berupa: hotel, losmen, *guest house*, pondok, *cottage, inn*, perkemahan, dan sebagainya.

b) Restoran

Restoran adalah industri jasa yang bergerak di bidang penyediaan makan dan minum, yang dikelola secara komersil, baik secara mandiri ataupun terkait dengan usaha lain.

c) Biro perjalanan

Biro perjalanan adalah suatu badan usaha dimana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali.

d) Transportasi atau Jasa angkutan

Transportasi adalah bidang usaha jasa angkutan yang dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara.

e) Tempat penukaran uang yaitu suatu tempat/usaha yang bergerak dalam bidang penukaran mata uang asing.

f) Atraksi wisata

Atraksi wisata adalah suatu kegiatan yang dapat menghibur seseorang ketika menyaksikan kegiatan tersebut. Atraksi wisata ini berupa pertunjukan tari-tarian, musik dan upacara adat yang sesuai dengan kebudayaan setempat.

Mengembangkan asumsi dari Pendit (1994) bahwa produk pariwisata meliputi atraksi (daya tarik wisata), aksesibilitas (sarana transportasi), dan amenitas (akomodasi, restoran, toko cinderamata). Produk pariwisata 3A menjadi panduan dalam membangun dan mengembangkan obyek wisata di Indonesia (Djou, 2013 & Mita, 2016). Menurut riset yang dilakukan oleh Abdulhaji & Yusuf (2016), atraksi, aksesibilitas, dan amenitas dapat berpengaruh signifikan terhadap citra obyek wisata. Akan tetapi, pendapat dari Pendit (1994) menurut penulis masih dirasa kurang sehingga penulis lebih memilih pendapat dari Cooper, et al (1995). Menurut Cooper, et al (1995: 81) mengemukakan bahwa terdapat 4A komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction, accessibility, amenity*, dan *ancilliary*.

1) *Attraction* (Atraksi)

Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu:

Gambar 26. Modal Atraksi
Sumber : Cooper, et al (1995: 81)

Modal kepariwisataan itu dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga dapat menahan wisatawan selama berhari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).

Menurut Pitana dan Diarta (2009) Atraksi pada destinasi merupakan elemen-elemen yang terkandung dalam destinasi dan lingkungan didalamnya yang secara individual atau kombinasinya memegang peranan penting dalam memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Atraksi destinasi bisa berupa atraksi alam seperti *landscape*, pantai, pegunungan, iklim, lembah; atraksi

buatan seperti kota bersejarah, taman dan resor; atraksi budaya seperti atraksi teatrikal, drama, festival, museum dan galeri, dan; atraksi sosial seperti kesempatan berbaur dengan masyarakat di daerah tujuan wisata dan ikut mengalami cara hidupnya bersama.

Atraksi menurut Hadinoto (1996) adalah sesuatu yang akan ditampilkan di area tujuan wisata dan yang dihasilkan atau diciptakan untuk wisatawan. Dapat disimpulkan bahwa atraksi adalah sesuatu yang terdapat di suatu destinasi wisata atau objek wisata yang akan menarik minat dan kepuasan wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat.

Daya tarik minat wisatawan sangat dipengaruhi oleh keunikan dan kekhasan suatu daerah dan menjadi faktor penting untuk menarik pengunjung datang ke tempat wisata tersebut. Keunikan dan kekhasan suatu daerah dapat digali melalui budaya kearifan lokal setempat. Hal ini juga menjadi sarana dalam melestarikan budaya lokal sekaligus menjadi objek wisata yang diminati banyak pengunjung.

"Daya tarik minat wisatawan sangat dipengaruhi oleh keunikan dan kekhasan suatu daerah dan menjadi faktor penting untuk menarik pengunjung datang ke tempat wisata tersebut."

2) *Amenity* (Fasilitas)

Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, dan agen perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang banyak diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain. Mengingat hubungan antar sarana dan

prasarana, sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana.

Ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata. Suatu tempat atau daerah dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata apabila aksesibilitasnya baik. Ada hubungan timbal balik antara sarana dan prasarana. Prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

Menurut Yoeti dalam Astuti dan Noor (2016) berpendapat bahwa sarana kepariwisataan adalah semua aspek fasilitas agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang beranekaragam terhadap pelayanan yang diberikan. Contoh prasarana wisata seperti: prasarana umum, meliputi: air, jalan, terminal, benih, listrik, komunikasi dan lapangan udara dan prasarana yang bersangkutan dengan keamanan dan ketertiban supaya dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dengan baik seperti kantor pos, apotik, bank, polisi, rumah sakit, dan lain-lain.

Sarana kepariwisataan adalah sesuatu yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara tidak langsung ataupun langsung dan banyak pemakaiannya itu tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana kepariwisataan sama seperti: *pertama*, sarana pokok meliputi perusahaan banyak penggunanya sangat tergantung kepada arus kedatangan wisatawan. Termasuk didalamnya transportasi, *travel agent*, restoran, dan akomodasi. *Kedua*, sarana pelengkap adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi fungsinya agar membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah wisata. *Ketiga*, sarana penunjang adalah perusahaan yang dapat menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap serta berfungsi untuk tempat wisatawan lebih banyak membelanjakan atau mengeluarkan uangnya di tempat yang dikunjungi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa amenitas adalah sesuatu yang menunjang seseorang atau sekelompok orang saat melakukan aktifitas wisata baik itu sebelum, sedang dan juga sesudah melakukan aktifitas wisata. Amenitas menjadi hal terpenting yang harus tersedia disuatu objek wisata, seperti di Kampoeng Bali

yang memiliki beberapa amenitas sebagai penunjang wisatawan saat berkunjung ke Kampoeng Bali. Amenitas yang dimaksud antara lain: tersedianya toilet, mushola, dan kantin termasuk kategori memiliki komponen amenitas.

3) *Accessibility* (Aksesibilitas)

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

Menurut March dalam Wahdiniwaty (2013) menyatakan aksesibilitas: mencakup waktu/jarak terbang, akses keseluruhan, kapasitas/frekuensi, penerbangan tidak langsung/langsung, akses masuk, persyaratan visa, informasi destinasi wisata, kemudahan memperoleh sesuatu, kemudahan berjalan-jalan, kemudahan menggabungkan destinasi wisata dengan perjalanan, dan kemudahan komunikasi.

Menurut Cakici, Harman dalam Wahdiniwaty (2013) aksesibilitas: fasilitas parkir, akses mudah, waktu mengemudi, dan kualitas perjalanan. Dari pengertian teori di atas tentang aksesibilitas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu yang dapat mempermudah wisatawan menuju destinasi wisata atau objek wisata. Didalamnya mencakup: transportasi, petunjuk arah, bandara, kondisi jalan, dan terminal. Hal itu semua sangat penting peranannya untuk mempermudah wisatawan berkunjung objek wisata, Kampoeng Bali termasuk objek wisata, maka dari itu harus memperhatikan aksesibilitas untuk wisatawan yang akan berkunjung.

4) *Ancilliary* (Pelayanan Tambahan)

Pelayanan tambahan harus di sedikan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan maupun untuk

pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dan lain-lain) serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. *Ancilliary* juga merupakan hal–hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, *tourist information, travel agent*, dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas tentang *ancillary* atau kelembagaan adalah suatu lembaga yang mengelola atas suatu destinasi wisata untuk berjalan dengan baik suatu kegiatan wisata sehingga wisatawan merasakan kepuasan atas kegiatan wisata yang dilakukan wisatawan. *Ancillary* atau kelembagaan dari suatu objek wisata itu bisa dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, seperti Kampoeng Bali yang kelembagaannya dikelola oleh pihak swasta dan modal pribadi pihak swasta atas pembangunan objek wisata tersebut.

Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna dan berguna (Suwantoro, dalam riswandi, 2013). Suwantoro menyebutkan beberapa bentuk produk pariwisata alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu: pariwisata budaya (*culure tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (adventure tourism), pariwisata agro (agrotourism), pariwisata pedesaan (*village tourism*), gastronomi (*culinary tourim*), pariwisata spiritual (*spiritual tourism*), dan lainnya.

Produk wisata yang berpotensi untuk maju di daerah pesisir yaitu Ekowisata sebagai kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan. Sebagai suatu sektor/usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan (Nugroho, dalam Reydi, Leonardus, Yolanda & Jean, 2015).

Peran ekowisata bertanggungjawab untuk mendukung kelestarian lingkungan alam dan budaya serta kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan berkunjung menikmati budaya dan alam daerah tersebut secara

tidak langsung membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Hal sesuai dengan pendapat Mahdayani (2009) bahwa untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan diperlukan rasa tanggungjawab dan tidak mengakibatkan kerusakan alam dan budaya serta menghormati adat istiadat destinasi wisata.

Sebagai pariwisata berkelanjutan tentunya ekowisata mempunyai tujuan sebagai berikut (Mahdayani, 2009):

a) Tercipta kemandirian ekonomi yaitu daya kompetisi dan kemandirian dari tempat pariwisata tersebut, sehingga akan tercipta keuntungan dan kemakmuran dalam jangka panjang
b) Tercipta kemakmuran masyarakat lokal yaitu kegiatan pariwisata menyumbangkan keuntungan secara finansial dan kemakmuran bagi masyarakat setempat
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga-tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata tanpa diskriminasi ras, jenis kelamin, dan lain-lain
d) Memberikan keamanan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung tanpa ada diskriminasi
e) Memberikan masyarakat lokal suara/kuasa untuk menentukan sebuah keputusan dalam hal managemendan pembangunan pariwisata di area tersebut
f) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal seperti membangun akses jalan, mendirikan fasilitas kesehatan dan lain-lain
g) Melestarikan kekayaan budidaya lokal, kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak boleh membahayakan kelestarian budaya lokal
h) Tidak merusak dan mengubah bentang alam yang sudah ada, serta menghindari kerusakan fisik dan visual dari lingkungan. Mendukung usaha konservasi lingkungan alami, habitat, populasi hewan liar dan memini-malisasi kerusakannya
i) Menggunakan sumber daya alam, secara efisien untuk penyediaan fasilitas tersebut,seperti: penggunaan listrik tenaga surya dan lain-lain.
j) Meminimalisasi polusi udara, air, dan tanah yang dihasilkan dari perusahaan dan pengunjung.

Pariwisata pesisir berkelanjutan *(Sustainable Coastal Tourism)* adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana

perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pembangunan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan *sustainable tourism* sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber–sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

Prinsip-prinsip pembangunan pariwisata pesisir yang berkelanjutan meliputi**:**

1. **Prinsip Keseimbangan**

   Pengelolaan pariwisata harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.

2. **Prinsip partisipasi Masyarakat**

   Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata baik individu maupun dalam bentuk kelompok.

3. **Prinsip Konservasi**

   Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggungjawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.

4. **Prinsip keterpaduan**

   Pengelolaan memperhatikan kondisi ekosistem dan disinergikan dengan pembangunan berbagai sektor.

5. **Prinsip penegakan Hukum**

   Pengelolaan pariwisata harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, serta dilaksanakan dengan penegakan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata.

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh

segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah-industri masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance)*.

Upaya mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan obyek maupun kawasan-kawasan wisata perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mengantisipasi berbagai pengembangan dilingkungan internal maupun eksternal yang ada, termasuk didalamnya kecenderungan maupun tren pariwisata dalam konteks global (Suryono dalam Kholilurrohman, 2016).

Kampung tematik sebagai bagian dari upaya strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang terpadu. Pelaksanaan kampung tematik mengubah skema penanggulangan permasalahan kemiskinan maupu lingkungan permukiman yang pada awalnya lebih menitikberatkan pada pemberian bantuan hingga pada pelibatan aktif dari berbagai kepentingan serta masyaraka. Keterlibatan berbagai aktor dalam penentuan tema kampung dilakukan dalam suatu forum sehingga usulan tema kampung dapat dibahas dan disepakati secara bersama-sama. Penentuan tema kampung yang tepat sesuai karaktersitik wilayah merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan inovasi kampung tematik.

Pentingnya penentuan tema yang melibatkan berbagai aktor khususnya masyarakat bertujuan untuk dapat menjaring potensi lokal dari suatu wilayah baik dari aspek sosial maupun ekonomi sehingga potensi tersebut dapat menjadi tema kampung yang nantinya dapat memberikan pengaruh pada pengembangan ekonomi lokal serta upaya penyelesaian yang dapat menghasilkan solusi permasalahan lingkungan permukiman (Kloczko-Gajewska, 2014). Dalam hal ini kampung tematik didesain untuk menentukan ciri khas tertentu dari suatu daerah tersebut dengan berfokus mengembangkan potensi dari masing-masing daerah.

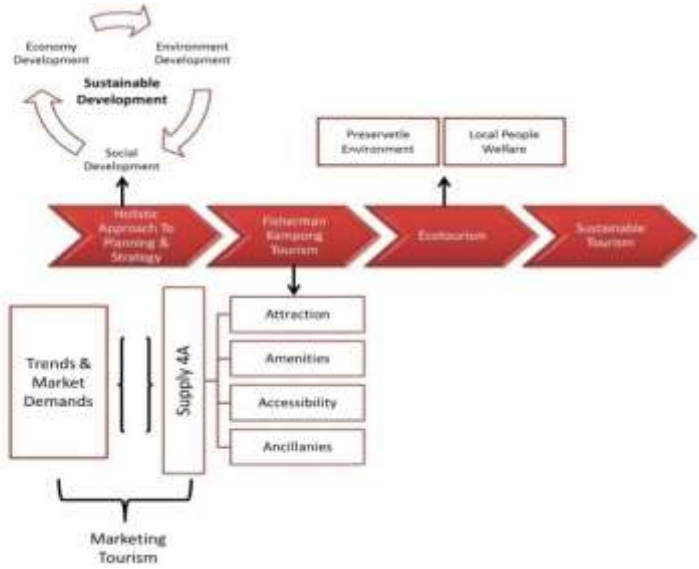

Gambar 27. Konsep Pengembangan Wisata Kampung Tematik
Sumber: hasil pengolahan, 2019

Pengembangan wisata kampung nelayan harus melihat dari *trends & market demands.* Hal ini dikarenakan sasaran dari pengembangan obyek wisata adalah wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian, diperlukan motivasi wisatawan berkunjung ke Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.

Berdasarkan data dari Kabupaten Ende motivasi faktor penarik pengunjung datang ke Kecamatan Ende Selatan adalah bersantai dan mengetahui budaya, adat, dan tradisi dari masyarakat lokal. Sementara itu, faktor pendorongnya adalah (1) *educational opportunity* yaitu keinginan mempelajari masyarakat di Kecamatan Ende Selatan; dan (2) *escape* yaitu merasakan lingkungan baru untuk rekreasi karena melepaskan kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari. Tentu kebutuhan rekreasi ini juga didorong karena ingin aktualisasi diri yaitu eksis di media sosial. Oleh sebab itu, diperlukan fasilitas *spot selfie* untuk menarik wisatawan berkunjung dengan menawarkan panorama alam berupa laut dan gunung. Untuk lama wisatawan tinggal di Kecamatan Ende Selatan hanya berkisar 1-1,5 hari saja. Hal ini memberikan kesan bahwa perlu ada *trigger* memperlama

wisatawan untuk tinggal di daerah obyek wisata. Seperti halnya di Bali, rata-rata wisatawan tinggal di sana selama 2-3 hari. Lama tinggalnya wisatawan akan mempengaruhi pada peningkatan roda perekonomian di kawasan tersebut. Tantangan nya adalah perencanaan pariwisata yang mampu membuat nyaman dan singgah lama bagi wisatawan ke Kecamatan Ende Selatan. Langkah strategisnya adalah pembangunan 4A harus mampu sesuai dengan ekspetasi dari permintaan pasar.

> "Pengembangan wisata kampung nelayan harus melihat dari *trends & market demands.* Hal ini dikarenakan sasaran dari pengembangan obyek wisata adalah wisatawan yang berkunjung."

C. STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG NELAYAN

Pembangunan di Kabupaten Ende mengacu pada visi daerah tersebut yang tidak lain adalah visi kepala daerah. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 adalah "**Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.**" Untuk mewujudkan visi tersebut telah dijabarkan menjadi 5 misi, antara lain:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
3. Percepatan pembangunan perekonomian dan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan;
4. Membangun, menata, dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai potensi dan kebutuhan daerah yang ramah lingkungan;

5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkualitas serta rasa aman, tertib, dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan masyarakat.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tupoksi terhadap misi di atas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Dinas ini mengemban pada misi ketiga, yaitu "Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan." Untuk visi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende adalah "**Terwujudnya Kabupaten Ende sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Demi Tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.**" Dari visi inilah kemudian Dinas Pariwisata menyusun misi di lingkungannya, antara lain:

a. Mengembangkan daya tarik wisata berbasis alam, sejarah, dan budaya;
b. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
c. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
d. Mengembangkan organisasi kelembagaan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat;
e. Mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien guna mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan; dan
f. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat di bidang pariwisata.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Nomor PAR.754.4/12.b/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende Nomor: BUDPAR.754.4/574/X/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 bahwa terdapat tiga program strategis dalam sektor pariwisata, antara lain:

1) Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3) Program Pengembangan Kemitraan/Kelembagaan.

Berdasarkan keputusan di atas, maka sektor pariwisata di Kecamatan Ende Selatan (termasuk di dalamnya tiga lokasi studi) menjadi prioritas pembangunan yang memicu perubahan. Pembangunan berbasis potensi lokal menjadi garda depan dalam pengembangan sektor pariwisata. Tidak hanya dari sisi 4A saja, tetapi juga dituntut pada pengembangan pemasaran dan kemitraan/kelembagaan.

Dalam buku Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende 2014-2034 disebutkan bahwa Kecamatan Ende Selatan merupakan klaster X dalam rencana pengembangan wilayah sektor pariwisata. Adapun fungsi yang dapat dikembangkan di wilayah ini, antara lain: (1) daya tarik wisata berupa Gunung Meja di Kelurahan Rukun Lima dan Gunung Iya di Kelurahan Paupanda, rekreasi beberapa pantai yang dilengkapi dengan panorama sunset di Pantai Ana Hoo di Kelurahan Tetandara, Pantai Ende di Kelurahan Rukun Lima, dan Pantai Paupanda di Kelurahan Paupanda; (2) daya tarik wisata budaya seperti pertunjukan seni budaya tari ende lio; (3) daya tarik wisata buatan seperti pasar tradisional yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, pasar ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pelabuhan kapal, wisata ziarah sejarah (makam Ibu Amsi), kuliner lokal, khususnya *seafood*, wisata kota; (4) akomodasi hotel; dan (5) perdagangan dan jasa penunjang atraksi wisata.

Gambar 28. Peta Atraksi Wisata di Kecamatan Ende
Sumber: hasil pengolahan, 2019

Potensi alam yang menonjol di Kelurahan Paupanda, Rukun Lima, dan Tetandara secara generalisasi adalah atraksi wisata pantai. Ketiga kelurahan memiliki atraksi alam berupa pantai dengan pesona yang masih natural belum terjamah oleh privatisasi. Di samping itu, potensi usaha perikanan laut yang merupakan peringkat ketiga di Kabupaten Ende menjadi atraksi buatan dengan dikemas dalam kegiatan kenelayanan. Berdasarkan potensi alam yang menonjol di atas dan karakteristik masyarakat lokal, maka konsep pengembangan kawasan di Kecamatan Ende Selatan adalah Wisata Kampung Nelayan atau *Fisherman Kampong Tourism.*

Untuk merealisasikan wisata kampung nelayan maka diperlukan terlebih dahulu pematangan pada perencanaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengembangan *fisherman kampong tourism* adalah *holistic approach to planning and strategy*. Dengan menggunakan pendekatan holistik atau keseluruhan maka dapat menghasilkan perencanaan yang tidak merugikan satu atau dua sektor lainnya dalam pembangunan. Pendekatan ini ditujukan untuk menghasilkan keseimbangan dalam perencanaan yang terbalut pada aspek-aspek*sustainable development,* antara lain: *economy development, environment development,* dan *social development.* Tiap-tiap aspek harus terencana secara matang dan saling terintegrasi. Harapannya tidak ada satu aspek yang diutamakan atau diprioritaskan yang berpotensi mengancam aspek lainnya. Terutama di era globalisasi ini khususnya negara negara yang sedang berkembang masih hanya mengedepankan aspek pembangunan ekonomi saja karena lebih tampak dirasanya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pendapatan yang masih rendah sehingga mengorbankan aspek pemerataan (*trade off*). Implikasinya pemusatan pada sektor-sektor yang berpotensi besar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi bukan pada keberlanjutan lingkungan yang justru kian tahun semakin miris kondisinya.

Aspek pembangunan lingkungan (*environment development*) lebih mengutamakan pada perlindungan lingkungan dan benda-benda sejarah buatan manusia di masa lampau. Dalam hal ini, wisata kampung nelayan di Kecamatan Ende Selatan terdapat lingkungan pantai dengan aktivitas kenelayanannya sebagai gantungan hidup masyarakat lokal, penambahan daerah konservasi, revitalisasi hutan mangrove, rumah adat yang mulai

tergantikan dengan rumah tapak yang tampak tidak layak huni, seni budaya tari, industri tenun, dan alat-alat musik tradisional yang telah terindikasi ditinggalkan oleh generasi muda, dan dua gunung yang menawarkan pesona naturalnya. Dalam konsep pengembangan wisata kampung nelayan diperlukan upaya untuk meningkatkan produktifitas yang tidak hanya berlaku di saat ini tetapi diperlukan perencanaan masa depan berjangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan keberlangsungan ekosistem wilayah pesisir dan kesejahteraan masyarakat (*common welfare*) karena lingkungan yang sehat tentu menjadi investasi ke depan bagi generasi selanjutnya.

Isu penting pengembangan kampung pesisir lebih pada meminimalisirkan adanya polusi yang timbul sebagai dampak pembangunan. Hal ini tentu dikarenakan pesisir berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan dan ikan ini juga menjadi sumber penghasilan bagi nelayan. Polusi merupakan salah satu dari dampak pembangunan yang berakibat pada perubahan kawasan pesisir. Perlu diingat bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu daerah yang memiliki kerentanan perubahan secara ekologis secara signifikan terhadap usaha atau roda perekonomian di wilayah tersebut. Strategi yang bisa digunakan dalam pengembangan kawasan pesisir adalah menggali potensi alam pesisir dan mengurangi kegiatan eksploitasi sumber daya laut dan pesisir.

Langkah strategis dalam pembangunan lingkungan melalui perencanaan wilayah yang holistik (menyeluruh) dan terpadu. Semua produk perencanaan terkait dengan Kecamatan Ende Selatan harus memiliki garis merah sehingga tidak ada saling tumpang tindih dalam sebuah dokumen perencanaan tata ruang.Di sisi lain, pemerintah daerah harus tegas dalam menyikapi pembangunan yang sangat masif di kawasan pesisir Kecamatan Ende Selatan. Hal ini untuk mencegah pembangunan yang dilakukan secara cepat dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti reklamasi pesisir seperti di Kabupaten Tangerang dan Kota Jakarta Utara, pertambangan, dan aktivitas pariwisata yang tidak terkendali.

Kegiatan ekspansi usaha di Kecamatan Ende Selatan harus sesuai dengan acuan perencanaan kawasan pesisir, baik secara makro maupun mikro. Acuan yang dimaksud di sini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah

Daerah (RPJP/M) provinsi maupun kabupaten, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional/Daerah (Ripparnas/da), Master Plan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, dan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kabupaten Ende.

Pembangunan lingkungan juga tidak menutup pada peningkatan kualitas permukiman di Kelurahan Rukun Lima, Paupanda, dan Tetandara. Ketiga kelurahan masuk dalam kategori permukiman kumuh sehingga untuk mendukung pengembangan wisata kampung nelayan maka perlu mengubah paradigma kekumuhan permukiman tersebut. Kelurahan Rukun Lima merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan predikat kawasan permukiman prioritas tinggi dengan nilai bobotnya 8,75. Klaster kawasan permukiman yang memiliki tingkat kepentingan untuk ditangani segera dengan range nilai 7,39% sampai dengan 9,35% yang telah tercantum dalam dokumen RP2KP Kabupaten Ende. Hal ini dilihat dari beberapa indikator, antara lain: hunian tidak layak huni (66% merupakan rumah dengan kondisi tidak permanen dan beberapa tergolong berbahaya terutama perumahan nelayan), hanya 53,33% rumah yang memiliki saluran pembuangan air limbah sehat, sebesar 20% rumah belum teraliri lisrik, sebanyak 50% rumah belum terlayani TPS, sebesar 25% rumah belum memiliki jamban pribadi, beberapa titik memerlukan peningkatan kualitas drainase dan jalan lingkungan, terdapat banyak permukiman nelayan di daerah pesisir tumbuh di sempadan pantai, dan seluas 14,11 Ha tergolong permukiman kumuh. Strategi yang bisa dilakukan untuk pembangunan lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Strategi Pembangunan Lingkungan Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Peningkatan kualitas permukiman di Kecamatan Ende Selatan	a) Pembangunan hunian panggung khusus nelayan ramah lingkungan b) Pembangunan hunian vertikal bagi MBR yang ramah lingkungan di area kota c) Peningkatan kualitas jalan lokal d) Fasilitasi sanitasi komunal e) Fasilitasi saluran IPAL komunal f) Fasilitasi jamban komunal g) Perbaikan saluran drainase h) Penyediaan ruang terbuka hijau
Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan pesisir Kecamatan Ende Selatan	a) Sosialisasi sadar perilaku hidup bersih dan sehat b) Fasilitasi pembentukan kelompok sadar lingkungan c) Sosialisasi sadar wisata dan sabta pesona d) Sosialisasi dan fasilitasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan e) Reboisasi hutan mangrove f) Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu	a) Sinkronisasi dan koordinasi antar *stakeholders* dalam perencanaan wisata kampung nelayan b) Sosialisasi perencanaan wisata kampung nelayan c) Monitoring dan evaluasi bangunan tidak ramah lingkungan d) Penyusunan peraturan pemerintah kelurahan tentang perlindungan lingkungan wisata di kawasan pesisir e) Penyusunan program kerja pengelola wisata kampung tematik 30 tahun mendatang

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Pengembangan wisata kampung nelayan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengurangi angka kemiskinan. Lebih utamanya perubahan kondisi masyarakat yang awalnya tidak atau kurang dalam hal pernghasilan menjadi berpenghasilan cukup. Salah satu aspek yang penting dalam pengembangan wisata yaitu pembangunan ekonominya. Dalam pembangunan ekonomi lebih mengutamakan penambahan nilai (*values*). Penambahan nilai yang dimaksud adalah adanya sumber penghasilan baru bagi masyarakat sekitar. Aktivitas yang mendukung dalam penambahan nilai baru antara lain: penyediaan lahan parkir, warung makan, *home stay*/hotel/penginapan, toko souvenir, sewa kamar mandi, sewa perlengkapan wisata, dan sebagainya.

Potensi utama di lokasi studi adalah aktivitas kenelayanan. Dengan demikian, perlu mengakomodir kegiatan tersebut sebagai basis kegiatan ekonomi di Kecamatan Ende Selatan. Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aktivitas kenelayanan dapat dilakukan dengan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan, seperti: pelabuhan, TPI, pasar ikan, tempat budidaya ikan laut dengan skala usaha kecil hingga besar,

pabrik es, *cold storage,* infrastruktur sentra industri pengolahan ikan, kawasan kuliner *seafood,* pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti SPBU Bahan Bakar Minyak), dan instalasi pembuangan air limbah terpadu.

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan kegiatan pula. Dalam artian, perencanaan aspek ekonomi ditujukan tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang. Pembangunan ekonomi lebih pada menciptakan peluang *good employments* bagi masyarakat yang belum bekerja terutama generasi muda. Di sisi lain, menciptakan peluang partisipasi yang tidak hanya bagi kaum lelaki tetapi juga menempatkan partisipasi kaum perempuan. Strategi yang bisa dilakukan untuk pembangunan ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 Strategi Pembangunan Ekonomi Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Peningkatan penghasilan masyarakat sekitar.	a) Penciptaan lapangan kerja b) Fasilitasi pemodalan usaha c) Sosialisasi industri rumah tangga kreatif bagi ibu-ibu dalam lembaga UMKM d) Peningkatan kualitas lingkungan pasar ikan
Para pemangku kepentingan mendukung aktivitas pengembangan wisata kampung nelayan.	a) Menciptakan komitmen bersama bagi Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam balutan *Memorandum of Understanding* (MoU) b) Alokasi dana pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Ende Selatan c) Fasilitasi pengembangan promosi wisata kampung tematik melalui jalur kerjasama sektor publik dan sektor privat d) Sosialisasi peran media sosial sebagai alat promosi pariwisata

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Aspek pembangunan lainnya yang tidak kalah penting karena didasari bahwa subyek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, yaitu pembangunan komunitas sosial. Komunitas sosial ini lebih bersinggungan

pada peningkatan kualitas SDM sebagai pengelola obyek wisata. Pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Ende seharusnya memfasilitasi partisipasi publik. Hal ini sebagai wadah untuk memahami kebutuhan masyarakat. Acap kali, program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga terjadi kemangkrakan atau berhentinya program tersebut.

Di tiap-tiap kelurahan di Kecamatan Ende Selatan memiliki embrio lembaga yang mampu diberdayakan sebagai lembaga pendukung pengelolaan pariwisata. Pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sangat urgent karena sebagai bentuk ejawantah pengelola obyek wisata. Di sisi lain, meningkatkan *sense of belonging* masyarakat terhadap obyek wisata. Kelompok ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pengunjung. Selain itu, tugas kelompok ini adalah membuat keputusan (*decision making*) dalam pengembangan wisata kampung nelayan.

Lembaga Pokdarwis seharusnya berada di bawah lembaga lain ditingkat pemerintahan kelurahan sebagai media pengantar aspirasi kepada pemerintah daerah bahkan level Pemerintah. Lembaga yang dimaksud adalah BUMDesa yang hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan BUMDesa dapat menjadi saluran dana pengembangan wisata kampung nelayan. Selain itu, di dalam tubuh BUMDesa ini terdapat lembaga koperasi yang memberikan pelayanan simpan pinjam permodalan, jual beli keperluan wisata dan aktivitas nelayan sebagaimana dilakukan BUMDesa di Kabupaten Tangerang. BUMDesa yang bekerjasama dengan Pokdarwis dapat melakukan penggalangan dana bantuan pengembangan wisata kampung tematik melalui donor dan sektor privat. Di sini peran pemerintah daerah menyusun peraturan yang memudahkan investor masuk. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menciptakan iklim kondusif terhadap investasi.

Tabel 12 Strategi Pembangunan Komunitas Sosial Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Peningkatan kapasitas SDM lokal	a) Fasilitasi pembentukan Pokdarwis b) Fasilitasi pembentukan BUMDesa c) Fasilitasi pembentukan koperasi d) Fasilitasi FGD sebagai ajang aspirasi masyarakat dalam pengembangan wisata kampung tematik e) Sosialisasi sadar wisata dan sabda pesona f) Fasilitasi pemasaran hasil produksi masyarakat lokal
Penciptaan iklim invetasi yang kondusif	a) Promosi wisata kampung tematik tingkat nasional dan internasional b) Kerjasama antara Pokdarwis, BUMDesa, koperasi dengan sektor swasta c) Fasilitasi kemudahan administrasi bagi investor d) Pemotongan biaya pajak iklan wisata kampung tematik e) Kerjasama Pokdarwis/BUMDesa/koperasi dengan toko-toko modern di sekitar area wisata untuk pemasaran produk lokal

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Pentingnya Pokdarwis nantinya juga akan berperan dalam pemasaran hasil perikanan, termasuk kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar dan pengembangan produk. Untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola wisata kampung nelayan maka diperlukan pembinaan institusi, iklim usaha yang kondusif, pelatihan pengelolaan kawasan wisata melalui Pokdarwis, pengelolaan BUMDesa, dan kepemimpinan.

D. RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN PESISIR

Berdasarkan data dan analisis lokasi studi, ketiga lokasi di Kecamatan Ende Selatan merupakan daerah pesisir dengan ancaman adanya bencana tsunami karena rawan gelombang pasang. Di sisi lain,

daerah yang dekat pula dengan gunung dengan kerawanan longsor. Oleh sebab itu, mitigasi terhadap bencana tersebut merupakan prioritas dalam upaya penataan ruang. Implikasinya setiap kegiatan pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Ende Selatan tidak boleh luput terhadap kebijakan tata ruang dan memperhatikan resiko terhadap lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan sektor pariwisata haruslah ketat demi terciptanya *sustainable tourism.* Pariwisata direncanakan bukan hanya jangka pendek tetapi lebih jangka panjang dengan tujuan akhir dari penyelenggaraannya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tinjauan dari lapangan, pengembangan wisata pesisir merupakan prioritas utama mengingat upaya mitigasinya lebih mudah dibandingkan wisata di gunung. Selain itu, pusat kegiatan lebih terletak di kawasan pesisir.

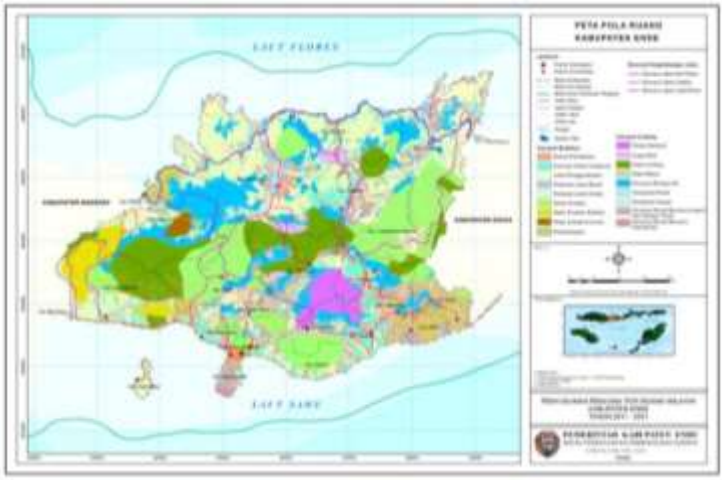

Gambar 29. Rencana Pola Ruang Di Kabupaten Ende
Sumber: Bappeda, 2019

Pada gambar di atas, rencana pola ruang wilayah Kecamatan Ende Selatan diperuntukkan untuk kegiatan yang memperhatikan lingkungan, seperti: kawasan gunung berapi, sempadan pantai, rawan bencana longsor, cagar alam, taman nasional, pertanian, dan kawasan permukiman. Dengan adannya rencana pola ruang tersebut akan tersinkronisasikan pada konsep wisata kampung nelayan karena memperhatikan pengembangan lingkungan, *ecotourism,* dan *sustainable*

tourism. Implikasinya semua penyelenggaraan kegiatan pariwisata mutlak memperhatikan rencana pola ruang sehingga tidak terjadi ketimpangan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Ende.

> "Pariwisata direncanakan bukan hanya jangka pendek tetapi lebih jangka panjang dengan tujuan akhir dari penyelenggaraannya adalah kesejahteraan masyarakat."

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende juga menyebutkan bahwa Kecamatan Ende Selatan merupakan wilayah pengembangan I berdasarkan sistem perwilayahan. Wilayah Pengembangan I dengan fokus pengembangan pada Situs Bung Karno, wisata sejarah, kuliner, dan wisata bahari. Di samping itu, kawasan ini sebagai kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dengan demikian, arahan pengembangan kawasan di lokasi studi harus memperhatikan alam. Hal ini juga diperkuat sebagai status kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan sempadan pantai dengan panjang sempadan pantai 100 m dari pasang tertinggi di Kecamatan Ende Selatan.

Dari sisi prasarana transportasi darat, Kecamatan Ende Selatan akan direncanakan untuk pengembangan terminal tipe B. Terminal ini akan melayani moda transportasi antarkota dalam satu provinsi, angkutan kota, dan perdesaan. Tentu saja ini akan memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan sektor pariwisata. Wisatawan akan lebih mudah mengakses destinasi wisata melalui transportasi darat. Sementara itu, untuk prasarana transportasi laut di Kelurahan Paupanda akan diarahkan sebagai pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung kegiatan agropolitan perikanan tangkap bagian selatan. Oleh sebab itu, pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Ende Selatan diprioritaskan sektor perikanan sebagai kegiatan budidaya perikanan laut (contohnya: rumput laut). Semakin besar pula, bahwa kawasan ini sebagai peruntukkan pengembangan kawasan industri perikanan dengan skala sedang dan kecil. Namun demikian, tidak terkecuali sektor sekunder

lainnya yaitu sektor pertanian karena potensi dari pertanian lahan basahnya.

Gambar 30. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan
Sumber: Bappeda, 2019

Pengembangan sektor pertanian juga harus dipertahankan untuk menciptakan kemandirian atau lebih tinggi lagi swasembada sehingga harus ada kebijakan yang pro terhadap sektor ini. Padahal dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende, untuk memenuhi kebutuhan papan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan permukiman perkotaan termasuk Kecamatan Ende Selatan maka pemerintah kabupaten harus menyediakan peruntukkan lahan perumahan seluas areal berdasarkan kebutuhan dan atau sesuai ketentuan dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan yang berimbang.

Untuk sistem jaringan sumber daya air, Kecamatan Ende Selatan diprioritaskan pembangunan prasarana sumber daya air bersama dengan 20 kecamatan lain di Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ende sedang optimis dalam pengembangan sumber daya air atau dapat dikatakan pengembangan industri air minum kemasan berskala sedang. Akan tetapi, permasalahan dalam perencanaan terkendala karena kawasan ini juga tergolong rawan bencana kekeringan. Oleh sebab itu, diperlukan teknologi untuk menjaga agar kawasan ini tidak lagi menjadi kawasan rawan bencana kekeringan, baik dengan pemanfaatan pengolahan air laut maupun air hujan. Penyediaan sumur

resapan, waduk mini tadah hujan, dan penyulingan air laur maupun air hujan merupakan tantangan dalam kegiatan persediaan air bersih.

Dalam mendukung kegiatan pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Ende berupaya untuk menetapkan Kecamatan Ende Selatan sebagai pengembangan kawasan industri kecil seperti souvenir yang terbuat dari sumber daya laut. Selain itu, pada dasarnya Kecamatan Ende Selatan telah ditetapkan pula sebagai kawasan wisata alam pantai di tiga lokasi studi dan Gunung Meja serta Makam Bu Amsi di Kelurahan Rukun Lima. Di samping itu, disediakan pula ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami atau gelombang pasang ke Kecamatan Ende Utara dan Ende Timur. Dengan demikian dari dokumen perencanaan mendukung terhadap pengembangan konsep wisata kampung nelayan.

Tabel 13 Pengembangan Wisata Kampung Nelayan Berbasis Tata Ruang

Strategi	Program
Pengembangan industri destinasi pariwisata	a) Pelatihan pembuatan kreasi souvenir ramah lingkungan b) Penambahan *signage* kawasan rawan bencana c) Pengembangan budidaya sumber daya laut d) Pengembangan pemanfaatan lahan pertanian e) Pengembangan industri air minum kemasan f) Pengembangan waduk tadah hujan dan sumur resapan g) Penyediaan teknologi penyulingan air laut h) Penyediaan teknologi deteksi dini gempa bumi
Pengembangan industri transportasi	a) Pembangunan terminal tipe B b) Pembangunan terminal bayangan
Peningkatan kapasitas SDM	a) Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona bidang transportasi b) Sosialisasi dokumen perencanaan tata

Strategi	Program
	ruang c) Sosialisasi budidaya sumberdaya laut d) Pembentukan kelompok tanggap bencana
Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu	a) Perencanaan pengembangan sektor pariwisata berbasis tata ruang b) Integrasi pengembangan sektor pariwisata, transportasi, pertanian, perikanan, dan kawasan permukiman c) Pembangunan perumahan nelayan tahan gempa dan tsunami d) Evaluasi pembangunan sektor pariwisata berbasis tata ruang e) *Focus Group Discussion* (FGD) antar*stakeholders* dalam perencanaan pengembangan sektor pariwisata

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Sebagaimana konsep wisata kampung nelayan, perencanaan konsep tersebut tidak hanya memperhatikan pada kebutuhan dan permintaan wisatawan dan masyarakat lokal saja, tetapi memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang. Dokumen tersebut menjelaskan prioritas perencanaan penggunaan lahan di tiap-tiap kawasan. Industri sektor pariwisata hadir tidak boleh menyalahi substansi dokumen perencanaan tata ruang karena berkaitan erat dengan status kawasan rawan bencana. Oleh sebab itu, setiap pengembangan sektor pariwisata wajib meninjau dokumen perencanaan tata ruang yang berlaku di kawasan tersebut.

Modal utama dari sektor pariwisata di Kecamatan Ende Selatan adalah atraksi, baik atraksi alam (*nature*), budaya (*culture*), maupun buatan (*man made*). Dengan adanya ketiga atraksi tersebut diharapkan menjadi paket lengkap bagi wisatawan untuk menikmati destinasi wisata di Kecamatan Ende Selatan. Berikut ulasan pengembangan atraksi wisata di kecamatan tersebut:

a. Atraksi alam

Atraksi alam yang utama di Kelurahan Tetandara, Kelurahan Paupanda, dan Kelurahan Rukun Lima adalah pantai. Hal ini karena obyek wisata pantai terdapat di ketiga kelurahan tersebut. Atraksi alam lainnya sebagai pendukung dari pengembangan wisata kampung nelayan adalah area gunung dan persawahan. Strategi pengembangan dari atraksi alam di Kecamatan Ende Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Strategi Pengembangan Atraksi Alam Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan pesisir Kecamatan Ende Selatan	a) Peningkatan kebersihan area pantai dan gunung b) Revitalisasi kawasan pantai c) Revitalisasi kawasan permukiman di kawasan pesisir
Pengembangan industri destinasi pariwisata	a) Peningkatan promosi wisata alam di Kecamatan Ende Selatan melalui media sosial, media cetak, dan media tempel di simpul-simpul transportasi b) Peningkatan kebersihan area pantai dan gunung c) Penyediaan *spot selfie* dengan latar belakang panorama alam d) Penyediaan *camping ground* di area gunung dan pantai e) Perencanaan paket wisata pantai, gunung, dan sawah f) Fasilitasi kegiatan menyelam (*diving*), *snorkling, fishing,* wisata layar (*sailing*) dengan menggunakan perahu tembus pandang di bawah yang dapat melihat langsung taman laut, dan *wind surfing* g) Fasilitasi kegiatan ayunan langit, *adventure tourism (trekking, hiking,*

	cycling), dan paralayang h) Pengembangan wisata agro sebagai media edukasi anak-anak bercocok tanam i) Pengembangan tanaman pangan lokal yang dibisa dimanfaatkan untuk pasokan rumah makan sekitar dan oleh-oleh bagi wisatawan j) Fasilitasi festival lomba dayung k) Penyelenggaraan lomba foto atraksi alam
Peningkatan sadar wisata dan sapta pesona	a) Sosialisasi kesadaran masyarakat generasi muda terhadap potensi pariwisata lokal b) Fasilitasi generasi muda sebagai pengelola Pokdarwis c) Sosialisasi materi dan aksi sadar wisata dan sapta pesona d) Studi banding ke obyek wisata serupa di daerah lain
Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu	a) Perencanaan wisata berbasis tata ruang b) Evaluasi kawasan wisata dalam perencanaan tata ruang daerah

Sumber: hasil pengolahan, 2019

b. Atraksi budaya

Untuk modal atraksi budaya yang dimiliki oleh Kecamatan Ende Selatan adalah Tari Ende Lio, aktivitas pembuatan tenun ikat, zikir rebana khas pesisir, serta lantunan dari musik suling gendang dan gambus. Potensi budaya lainnya di daerah ini adalah adanya kegiatan nelayan, seperti proses pelelangan ikan, penjualan ikan di pasar ikan, dan aktivitas nelayan di pelabuhan. Hal ini hanya ditemukan di daerah pesisir saja. Tujuan dari pengembangan atraksi budaya adalah mempertahankan kelestarian budaya khas dan memperkenalkan

budaya tersebut ke daerah lain bahkan negara lain. Berikut ini pengembangan dari atraksi buatan yang mendukung wisata kampung nelayan di Kecamatan Ende Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Strategi Pengembangan Atraksi Budaya Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Pengembangan industri destinasi pariwisata	a) Pengadaan festival budaya khas di Kecamatan Ende Selatan b) Pengadaan kompetisi zikir rebana akbar antar daerah di pesisir Kecamatan Ende Selatan c) Pengadaan kompetisi Tari Ende Lio di tiap-tiap instansi daerah d) Fasilitasi alat-alat tangkap ramah lingkungan e) Pengadaan festival lelang ikan terbesar di Kabupaten Ende f) Fasilitasi pembuatan budidaya ikan dan mutiara g) Promosi budaya lokal melalui media sosial, media cetak, dan media tempel di simpul-simpul transportasi h) Penyelenggaraan foto budaya
Peningkatan sadar wisata dan sapta pesona	a) Fasilitasi generasi muda alat-alat pembuatan atraksi budaya b) Sosialisasi budaya lokal sebagai modal utama aktivitas pariwisata c) Peningkatan minat generasi muda menjaga kelestarian budaya lokal d) Fasilitasi generasi muda dalam kelompok-kelompok pelatihan tari Ende Lio dan zikir rebana
Peningkatan kualitas lingkungan di	a) Fasilitasi kelompok pecinta alam di lingkungan Kecamatan Ende Selatan.

kawasan pesisir Kecamatan Ende Selatan	b) Sosialiasi sadar kebersihan kepada kelompok pecinta alam di lingkungan TPI, pasar ikan, dan pelabuhan. c) Penyediaan TPS di lingkungan TPI, pasar ikan, dan pelabuhan. d) Peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan TPI, pasar ikan, dan pelabuhan. e) Pembangunan patung ikan sebagai *landmark* kawasan pesisir Kecamatan Ende Selatan.

Sumber: hasil pengolahan, 2019

c. Atraksi buatan

Pada pengembangan atraksi buatan (*man made*) di pesisir Kecamatan Ende Selatan lebih ditujukan hunian adat yang harus dilestarikan. Hal ini untuk memelihara tradisi dan keunikan permukiman *heritage* di kawasan tersebut. Sebagaimana adicita (ideologi) pengembangan kepariwisataan Kabupaten Ende yaitu "Pariwisata untuk Ende" dalam buku Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende. Ideologi tersebut dipertahankan selama pengembangan pariwisata tahun 2014-2034 agar tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat dengan kebudayaan, tradisi, karakter, keunikan, dan ciri-ciri kejatian dirinya tetap bertahan, dinamis, dan berkelanjutan.

Pembangunan rumah panggung sudah menjadi adat di Kecamatan Ende Selatan, namun demikian untuk menunjang kepariwisataan saat ini, perlu modifikasi. Salah satu upayanya adalah pembangunan rumah panggung dengan diberikan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian wisatawan yang saat ini pengguna media sosial. Rumah panggung ini diaplikasikan untuk meminimalisir adanya bencana tsunami dan banjir akibat gelombang pasang. Rumah panggung ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman masyarakat sebagai bentuk *branding* citra kawasan yang berkualitas.

Pengembangan industri akomodasi yang berbasiskan arsitektur tradisional yang lebih memprioritaskan rumah panggung warna-warni. Bahkan akomodasi ini karena keunikannya bisa menjadi peluang sebagai

tempat kesatuan kegiatan MICE (*meeting, insentif, conference,* dan *exhibition*). Pembangunan rumah panggung warna-warni ini tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hunian warga saja tetapi juga untuk fasilitas akomodasi berupa penginapan bagi wisatawan. Selain itu, bisa dikembangkan pula alternatif sebagai restoran lokal.

Tabel 16 Strategi Pengembangan Atraksi Buatan Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Peningkatan kualitas permukiman di Kecamatan Ende Selatan	a) Pengadaan kompetisi pengecatan rumah panggung b) Fasilitasi pembangunan rumah panggung untuk hunian masyarakat lokal c) Pembangunan sanitasi komunal d) Pembangunan drainase e) Fasilitasi listrik dan air bersih f) Revitalisasi ruang terbuka hijau g) Promosi rumah panggung warna warni melalui media sosial, media cetak, dan media tempel di simpul-simpul transportasi h) Pembangunan patung ikan sebagai *icon* atau *landmak* daerah industri nelayan
Peningkatan sadar wisata dan sapta pesona	a) Fasilitasi generasi muda dalam pengecatan rumah panggung b) Sosialisasi peran rumah panggung warna terhadap pariwisata
Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu	a) Perencanaan rumah panggung berbasis dokumen tata ruang b) Perencanaan sarana prasarana dan utilitas umum permukiman berbasis tata ruang

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Pembangunan rumah panggung sebagai atraksi buatan manusia tidak hanya terletak fokus pada rumah panggungnya saja, tetapi obyeknya harus meluas sebagai pendukungnya. Pembangunan ini harus terintegrasi

dengan maksud memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan permukiman bebas kumuh. Implikasinya, pembangunan juga harus disertai dengan infrastruktur dasar dalam lingkungan permukiman, seperti: kebutuhan listrik, air bersih, drainase, sanitasi, jalan, dan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik. Hal inilah yang juga sebagai penerapan dari *holistic approach to planning & strategy.*

> "Pembangunan rumah panggung sudah menjadi adat di Kecamatan Ende Selatan, namun demikian untuk menunjang kepariwisataan saat ini, perlu modifikasi."

Dari sisi amenitas, kondisi eksisting saat ini masih dibutuhkan penambahan fasilitas. Wisatawan masih merasa mengeluh tentang kebersihan di obyek wisata, terutama di pantai. Di sisi lain, penginapan masih tergolong sedikit dengan kondisi minim. Wisatawan asing masih terkendala bahasa ketika bertanya kepada masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan wisata kampung nelayan dibutuhkan beberapa fasilitas, sepeti: akomodasi, restoran/rumah makan tradisional, gardu pandang, tempat sampah, pusat pelayanan informasi bagi wisatawan. Penyediaan amenitas harus sesuai dengan konsep wisata kampung nelayan. Berikut ini strategi dalam pengembangan amenitas untuk wisata kampung nelayan di Kecamatan Ende Selatan:

Tabel 17 Strategi Pegembangan Amenitas Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Pengembangan industri destinasi pariwisata	a) Pembangunan restoran di tepi pantai nuansa lokalitas b) Pembangunan pusat jajanan kuliner lokal *seafood* di tepi pantai c) Penyelenggaraan lomba desain rumah makan berarsitektur etnis lokal d) Pembangunan rumah makan di area pegunungan

	e) Pembangunan pusat pelayaan informasi wisatawan f) Pelatihan pemuda manajemen pengelolaan amenitas pariwisata g) Pelatihan bahasa asing bagi pemuda h) Pelatihan pemuda sebagai agen *tour leader* i) Fasilitasi tempat sampah di lokasi obyek wisata j) Fasilitasi gardu pandang di kawasan obyek wisata
Pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal	a) Sosialisasi pengolahan makanan kreatif berbahan *seafood* untuk rumah makan b) Sosialisasi pengolahan minuman kreatif berbahan rumput laut c) Fasilitasi pemodalan usaha rakyat
Pengembangan industri akomodasi berbasis arsitektur berbasis arsitektur etnis lokal	a) Pembangunan rumah panggung sebagai penginapan wisatawan b) Pembangunan *home stay* di tepi pantai c) Pembangunan *home stay* di area pegunungan
Peningkatan iklim investasi yang kondusif	a) Penggalangan kerjasama pembangunan *home stay* dengan sektor privat b) Penggalangan kerjasama pembangunan fasilitas pariwisata
Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu	a) Perencanaan fasilitas amenitas di kawasan obyek wisata berbasis tata ruang b) Evaluasi pembangunan fasilitas amenitas berbasis dokumen tata ruang

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Untuk aksesibilitas, kondisi saat ini di lapangan dari sisi jalan beberapa titik tergolong perlu pengerasan dan perbaikan. Kondisi jalan akan mempengaruhi tingkat kenyamanan wisatawan berkunjung. Dari sisi lebar jalan, tiap-tiap jalan bisa dilalui oleh 1 mobil dan 1 motor untuk jalan lingkungan di permukiman menuju obyek wisata. Sementara untuk jalan berstatus jalan kabupaten tergolong baik dan dapat dilalui oleh 2 mobil dan 2 motor. Transportasi lokal yang mengakomodir menuju obyek wisata memang tidak ada tetapi terdapat angkutan yang biasanya digunakan masyarakat beraktivitas. Angkutan ini juga melewati rute obyek wisata. Kondisi angkutan umum ini tergolong layak tetapi perlu ditingkatkan kenyamanannya sehingga mendukung pengembangan konsep wisata kampung nelayan.

Fasilitas lain terkait dengan aksesibilitas adalah penanda jalan (*signage*) yang tergolong hanya sedikit. Beberapa wisatawan mengandalkan *smartphone* sebagai pelacak jalan menuju obyek wisata. Penanda jalan hanya ditemukan di jalan besar saja dengan jumlah yang minimal.

Tabel 18 Strategi Pengembangan Aksesibilitas Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Pengembangan industri transportasi	a) Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata b) Penempelan foto obyek wisata pada transportasi lokal c) Peningkatan kualitas jalan lingkungan d) Penambahan penanda jalan menuju destinasi pariwisata e) Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona bidang transportasi f) Pembangunan simpul-simpul transportasi di kawasan obyek wisata
Peningkatan iklim investasi yang kondusif	a) Penggalangan kerjasama penyediaan transportasi lokal khusus pariwisata b) Penggalangan kerjasama penyediaan penunjuk jalan menuju destinasi pariwisata
Integrasi dokumen perencanaan lingkungan	a) Perencanaan sarana prasarana transportasi berbasis tata ruang

terpadu	b) Evaluasi sarana prasarana transportasi berbasis tata ruang

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Strategi 4A yang terakhir adalah pengembangan *ancillaries* (fasilitas tambahan) yang dibutuhkan untuk mendukung wisata kampung nelayan. Dari sisi ketersediaan toko cinderamata yang menjual produk-produk lokal sudah ada namun demikian belum banyak sehingga diperlukan fasilitas ini. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam memudahkan pembelian oleh-oleh khas di wilayah Kecamatan Ende Selatan. Toko cinderamata dalam kondisi kurang optimal memberikan kesan menarik bagi wisatawan. Sementara itu, fasilitas ATM dan *money charger* tergolong masih kurang tersedia. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan sektor perbankan untuk menambah fasilitas ATM dan kerjasama dengan pihak jasa penukaran uang untuk menambah kantor-kantor *money changer.*

Tabel 19 Strategi Pengembangan *Ancillaries* Wisata Kampung Nelayan

Strategi	Program
Pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal	a) Pelatihan pembuatan kreasi produk lokal bebahan kain tenun b) Pelatihan pembuatan kuliner oleh-oleh khas c) Fasilitasi modal usaha bagi kelompok usaha bersama d) Pemasaran produk lokal di simpul-simpul transportasi dan media sosial
Peningkatan iklim investasi yang kondusif	a) Penggalangan kerjasama penyediaan ATM b) Penggalangan kerjasama penyediaan kantor *money changer*
Peingkatan kapasitas SDM	a) Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona bidang transportasi b) Pelatihan bahasa inggris bagi agen-agen wisata

Integrasi dokumen perencanaan lingkungan terpadu	a) Perencanaan fasilitas kawasan perdagangan produk lokal berbasis tata ruang b) Evaluasi pembangunan sektor perdagangan berbasis tata ruang

Sumber: hasil pengolahan, 2019

Pengembangan pemasaran industri pariwisata yang bekerjasama dengan sektor privat, agen pariwisata, dan media pemasaran. Peletakan baliho atau media promosi wisata di beberapa simpul transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan terminal.

Gambar 31. Contoh Media Promosi Pariwisata
Sumber: https://pbs.twimg.com/, *diakses pada tanggal 10 November 2019*

Pengembangan wisata kampung nelayan juga harus memperhatikan konsep *ecotourism* untuk menjaga keberlajutan wisata. Konsep ini lebih memberikan arti bahwa wisatawan juga bertanggungjawab terhadap obyek wisata. Wisatawan akan menjaga lingkungan pula sehingga tidak terjadi vandalisme. Di sisi lain, kehadiran wisatawan akan memberikan nilai bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dari kegiatan pembelian tiket

masuk, parkir, akomodasi, dan souvenir. Wisata kampung nelayan tidak hanya mementingkan pada sisi masyarakat lokal saja tetapi juga harus memenuhi kebutuhan wisatawannya. Hal ini ditujukan untuk menciptakan *sustainable tourism.*

Secara garis besar, strategi dalam pengembangan wisata kampung tematik berupa wisata kampung nelayan, antara lain:

a) Mengembangkan industri transportasi terutama dalam peningkatan kualitas jalan, peningkatan terminal, dan peningkatan kualitas moda transportasi lokal yang diperuntukkan khusus sebagai angkutan wisata/agen perjalanan. Di samping itu, diperlukan pula upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas akses interdestinasi dan antardestinasi seperti rambu-rambu penunjuk jalan (*signage*).
b) Mengembangkan industri kreatif berbasis potensi lokal yang menunjang industri pariwisata. Beberapa yang bisa dikembangkan adalah produk-produk lokal yang dibentuk secara inovatif dan kreatif seperti usaha kerajinan tenun ikat, gamelan, anyaman. Produk tersebut bisa menjadi souvenir bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende.

> "Pengembangan wisata kampung nelayan juga harus memperhatikan konsep *ecotourism* untuk menjaga keberlajutan wisata. Konsep ini lebih memberikan arti bahwa wisatawan juga bertanggungjawab terhadap obyek wisata."

E. Penguatan Lembaga Lokal Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Nelayan

Salah satu permasalahan pengembangan industri pariwisata di ketiga lokasi studi di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende adalah semua elemen dalam industri pariwisata cenderung bekerja sendiri, belum terorganisasi secara baik dan profesional. Hal ini diakui dan tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Nomor PAR.754.4/12.b/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende Nomor: BUDPAR.754.4/574/X/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Di sisi lain, manajemen/pengelolaan industri pariwisata masih bersifat konvensional atau manajemen keluarga dan apa adanya. Dengan demikian, masyarakat lokal belum memiliki kesadaran tinggi dalam hal sadar wisata dan sapta pesona di setiap industri wisata. Definisi sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. Sementara itu, definisi dari sapta pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.

Peningkatan kerjasama, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antarlembaga publik dan privat, baik secara vertikal maupun horizontal sangat diperlukan. Pemerintah daerah bukan lagi memandang masyarakat sebagai obyek pengembangan, tetapi harus menempatkan masyarakat lokal sebagai subyek pengembangan kawasan wisata. Masyarakat sebagai subyek pengembangan memiliki maksud bahwa masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini masyarakat harus benar tahu mengenai sapta pesona dan sadar wisata. Sadar wisata dalam hal ini memiliki 2 arti, yakni:

(1) Masyarakat benar-benar menyadari peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah sehingga memunculkan kesadaran untuk menciptakan suasana yang kondusif.

(2) Masyarakat secara sadar terkait hak dan kebutuhannya sebagai pelaku wisata dan wisatawan.

Gambar 32. Sapta Pesona
Sumber: hasil pengolahan penulis, 2019

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012) penjabaran tiap-tiap unsur sapta pesona dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 20 Unsur Sapta Pesona

Unsur	Definisi	Aksi
Aman	Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.	➢ Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjungannya; ➢ Menolong dan melindungi wisatawan; ➢ Memelihara rasa bersahabat terhadap wisatawan; ➢ Memelihara keamanan lingkungan; ➢ Membantu memberi informasi kepada

		wisatawan; ➢ Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular; ➢ Meniminalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.
Tertib	Suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap dispilin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.	➢ Mewujudkan budaya antri; ➢ Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku; ➢ Disiplin waktu/tepat waktu; ➢ Serba teratur, rapi, dan lancar.
Bersih	Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang	➢ Tidak membuang sampah/limbah lingkungan; ➢ Menjaga kebersihan lingkungan obyek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana pendukungnya; ➢ Menjaga lingkungan yang

	mencerminkan keadaan yang sehat/higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.	bebas dari polusi udara (akibat asap kendaraan, rokok, dan bau lainnya); ➢ Menyiapkan sajian makanan danminuman yang higienis; ➢ Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih; ➢ Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.
Sejuk	Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan betah bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.	➢ Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon; ➢ Memelihara penghijauan di objek dan daya tarik wisata serta jalur wisata; ➢ Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/fasilitas umum, hotel, penginapan, restoran dan sarana prasarana dan komponen/fasilitas kepariwisataan lainnya.
Indah	Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa	➢ Menjaga obyek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang estetik, alami, dan harmoni; ➢ Menjaga lingkungan dan tempat tinggal secara teratur dan serasi serta menjaga karakter kelokalan; ➢ Menjaga keindahan

	kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas.	vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersifat alami.
Ramah	Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, perasaan diterima dan betah bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.	➢ Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela serta selalu siap membantu wisatawan; ➢ Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan; ➢ Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan; ➢ Menampilkan senyum yang tulus.
Kenangan	Suatu bentuk	➢ Menggali dan mengangkat

	pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.	keunikan budaya lokal; ➢ Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat, dan menarik; ➢ Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/khas serta mudah dibawa.

Sumber: diolah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012

Sadar wisata selanjutnya akan dibentuk wadah yang beranggotakan masyarakat dengan istilah kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Istilah pokdarwis juga disinonimkan dengan kompepar atau kelompok penggerak pariwisata. Pada esensinya, keberadaan pokdarwis berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap potensi pariwisata yang ada di daerahnya. Tujuan dari pembentukan pokdarwis, diantaranya: (1) meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan; (2) membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah; dan (3) memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012:18).

> “Peningkatan kerjasama, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antarlembaga publik dan privat, baik secara vertikal maupun horizontal sangat diperlukan.”

Kelompok sadar wisata dalam kepariwisataan memiliki payung hukum, antara lain:

(1) Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
(2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
(3) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
(4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata; dan
(5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

Dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012:19) menyatakan bahwa kepengurusan pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan seksi-seksi. Adapun syarat-syarat umum keanggotaan pokdarwis adalah sebagai berikut:

a) Bersifat sukarela;
b) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
c) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
d) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung; dan
e) Jumlah anggota setiap pokdarwis minimal 15 orang.

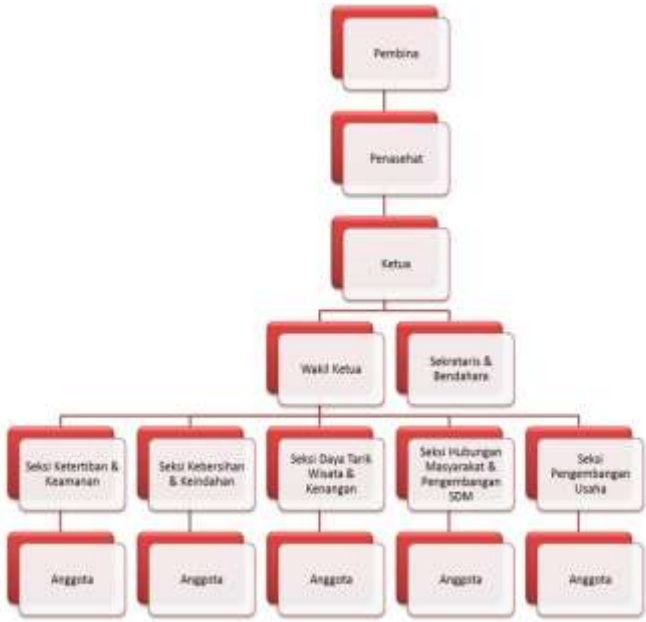

Gambar 33. Struktur Organisasi Pokdarwis
Sumber: diolah dari Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, 2019

Salah satu contoh pokdarwis yang dianggap sukses adalah pokdarwis Sendang Arum di Desa Wisata Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Peran pokdarwis tersebut dalam Suryawan (2016), antara lain: (1) memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi wisata; (2) mengelola pariwisata; (3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota serta masyarakat; dan (4) menjalin kerjasama dengan organisasi lain, seperti: BUMDesa, Kelompok Wanita Tani atau KWT Puspa Melati, Komunitas Pecinta Alam Djogorekso, pemilik *homestay,* kelompok kesenian, pengusaha kopi, dan organisasi pemuda. Keberhasilan pokdarwis Sendang Arum juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berupa dana hibah untuk membangun dan mengembangkan desa wisata. Prestasi yang didapat dari pokdarwis ini adalah desanya dianggap sebagai desa wisata terbaik bahkan menjadi desa percontohan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, meningkatkan pendapatan desa wisata dengan penjualan kurang lebih 100 tiket di hari biasa dan menjadi 2 kali lipat bahkan lebih di akhir pekan, dan meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan, serta membuka lapangan pekerjaan seperti budidaya kopi dan membuka warung kopi.

Pada dasarnya pembentukan pokdawis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang merupakan langkah strategis untuk pengembangan wisata. Salah satu konsep yang bisa digunakan adalah *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dengan tujuan tidak hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi oleh kelompok tertentu tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat. Pendekatan ini juga mengutamakan pemeliharaan daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir dengan cara menjaga kelestarian wilayah pesisir. Hal ini akan sinergi dengan konsep *sustainable tourism.*

Pengembangan berbasis lokalitas akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan meniru daerah lainnya dengan sumber daya berbeda. Hal yang *urgent* saat ini adalah mendorong dan memfasilitasi masyarakat lokal dalam wadah kelembagaan sebagai pengelola destinasi wisata. Pengembangan lembaga lokal sangat diperlukan sebagai pengelola obyek wisata. Dengan demikian, penciptaan Kelompok Sadar Wisata atau disebut dengan Pokdarwis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat lokal. Tantangannya adalah mencari masyarakat yang bersedia dalam kepengurusan Pokdarwis. Pengurus Pokdarwis harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam mengembangkan potensi wisata. Hal yang terberat adalah prinsip adanya Pokdarwis adalah bekerja secara sukarela. Terkadang obyek wisata sedang dilirik oleh wisatawan sehingga jumlah kunjungan banyak dan penghasilan masyarakatpun meningkat. Namun acap kali kegiatan pariwisata sedang lesu sehingga terkadang menyurutkan minat pengurus Pokdarwis, khususnya generasi muda yang sedang berpikir dalam *money oriented.*

Permasalahan Pokdarwis pada umumnya adalah minimnya anggaran padahal fungsi lembaga ini sebagai perintis perkembangan pariwisata di desa. Anggaran yang dimiliki dapat bersumber dari dana desa, retribusi wisatawan, bahkan bisa pula dari hasil iuran anggota Pokdarwis. Hal ini tentu akan menjadi beban bagi masyarakat dan dapat mengurungkan diri untuk membentuk Pokdarwis. Misalkan saja Pokdarwis di Desa Wisata Bakas, Bali dimana anggotanya dihadapkan pada keterbatasan dana

sehingga anggotanya dengan sukarela berinisiatif untuk iuran yang digunakan dalam pembangunan toilet dan fasilitas umum lainnya. Kelemahannya adalah di Kecamatan Ende Selatan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga tidak mudah dalam mengajak masyarakat untuk iuran.

Esensi dari Pokdarwis adalah kelompok masyarakat penggiat wisata yang bergerak secara swadaya. Implikasinya adalah pengembangan obyek wisata bersumber dari kekuatan masyarakat lokal itu sendiri. Anggapan dalam Pokdarwis adalah masyarakat memiliki kuasa dalam pengembangan obyek wisata dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap pembangunan wisata pesisir terkait status rawan bencana maka masyarakat harus dibina dan dibimbing oleh pemerintah tingkat kelurahan maupun pemerintah daerah. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan kegiatan wisata.

Permasalahan yang umum terjadi di lingkup kelembagaan Pokdarwis adalah keterbatasan dana pengelolaan. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menjalin kerjasama lembaga lokal lainnya. Selain Pokdarwis, lembaga lainnya yang dibutuhkan adalah BUMDesa dan koperasi. Kedua lembaga ini digunakan untuk keberlanjutan usaha mikro dan menengah oleh masyarakat.

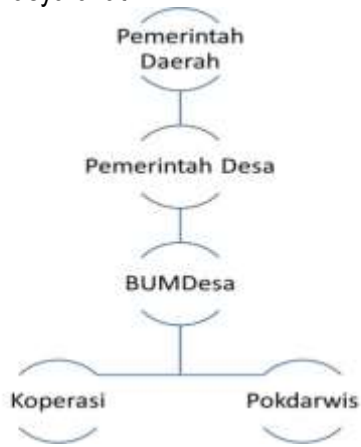

Gambar 34. Hubungan Kelembagaan Pariwisata
Sumber: hasil pengolahan, 2019

> “Esensi dari Pokdarwis adalah kelompok masyarakat penggiat wisata yang bergerak secara swadaya.”

Pokdarwis akan menjadi bagian dari kelembagaan BUMDesa sehingga ketika ada dana desa dari Pemerintah, maka Pokdarwis berhak untuk mendapatkan bantuan dana desa guna mengembangkan usaha pariwisatanya dan berkontribusi dalam pengelolaan internal lembaga tersebut. Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dengan prioritas peruntukkannya adalah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari dana desa, antara lain: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa; (2) mengentaskan kemiskinan; (3) memajukan perekonomian desa; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Lokasi Kecamatan Ende Selatan merupakan salah satu daerah yang seharusnya peruntukkannya mendapatkan dana desa karena berkaitan dengan wujud Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Rakyat Indonesia.”

Gambar 35. Prinsip Penggunaan Dana Desa
Sumber: Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Dengan adanya dana desa yang disalurkan melalui BUMDesa kepada pokdarwis maka akan meningkatkan semangat bagi lembaga tersebut. Penyelenggaraan pariwisata di Kecamatan Ende Selatan tentu menjadi stimulan bagi partisipasi masyarakat dalam bekerja swakelola sebagaimana dimaksudkan dalam prinsip-prinsip penggunaan dana desa. Prinsip-prinsip tersebut telah dijelaskan di dalam gambar di atas.

Lembaga lain yang diperlukan di Kecamatan Ende Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bermitra bersama pokdarwis adalah koperasi. Di beberapa daerah telah ada Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tujuan dasarnya adalah mensejahterakan anggotanya. Bahkan dalam sejarahnya, koperasi merupakan pondasi pembangunan dari sisi ekonomi berbasis kerakyatan.

Kelompok nelayan dan masyarakat lainnya yang tergabung dalam pokdarwis di Kecamatan Ende Selatan nantinya juga diharuskan masuk menjadi anggota koperasi tersebut. Kegiatan koperasi yang bisa dilakukan

antara lain: aktivitas simpan pinjam, jual beli keperluan wisata dan nelayan, layanan jasa, kegiatan konsumsi dan produksi hasil usaha. Permodalan koperasi bisa menggunakan bantuan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dan selanjutnya diharapkan bisa mandiri dengan aktivitasnya, terutama dukungan kepada sektor pariwisata di Kecamatan Ende Selatan.

“Pengembangan berbasis lokalitas akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan meniru daerah lainnya dengan sumber daya berbeda. Hal yang *urgent* saat ini adalah mendorong dan memfasilitasi masyarakat lokal dalam wadah kelembagaan sebagai pengelola destinasi wisata.”

EPILOG

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Tetandara, Rukun Lima, dan Paupanda lebih mengarah pada kurang sejahteranya kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator atau karakteristik permukiman, seperti: hunian yang tergolong tidak layak huni sebanyak 66% rumah, hanya 53,33% rumah yang memiliki saluran pembuangan air limbah sehat, sebesar 20% rumah belum teraliri lisrik, sebanyak 50% rumah belum terlayani TPS, sebesar 25% rumah belum memiliki jamban pribadi, beberapa titik memerlukan peningkatan kualitas drainase dan jalan lingkungan, terdapat banyak permukiman nelayan di daerah pesisir tumbuh di sempadan pantai, dan seluas 14,11 Ha tergolong permukiman kumuh.Implikasinya Kecamatan Ende Selatan termasuk dalam kategori permukiman kumuh dalam agenda kerja Pemerintah Kabupaten Ende. Kondisi tersebut dikarenakan minimnya penghasilan dari masyarakat yang didominasi oleh nelayan, yaitu sekitar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00 per bulan.

Salah satu penanganan permasalahan kurangnya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ende Selatan adalah membangun potensi daerah sebagai modal pengembangan daerah. Dalam hal ini, peneliti merekomendasikan pengembangan sektor pariwisata melalui wisata kampung nelayan. Alasan dasar pemilihan wisata kampung nelayan adalah aktivitas sektor perikanan merupakan sumber utama penghasilan bagi mayoritas masyarakat lokal. Kampung nelayan dinilai mampu mengangkat pesona lokalitas tanpa merusak *image* kampung tersebut. Di sisi lain, letak geografis lokasi studi berada di kawasan pesisir yang tentu memiliki potensi sumber daya laut lebih banyak ditemukan. Hal ini juga upaya menciptakan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan daerahnya sendiri sehingga meningkatkan *sense of belonging.* Di samping itu, sesuai dengan visi Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 dalam dokumen RPJMD dan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

Berdasarkan hasil dari penelitian di Kelurahan Tetandara, Rukun Lima, dan Paupanda, ketiga lokasi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan

obyek wisata. Beberapa potensi wisata yang bisa menjadi andalan di lokasi tersebut terbagi menjadi tiga atraksi, antara lain:

a. Atraksi alam yang terdiri dari panorama Pantai Ende, Pantai Ana Ho'i, dan Pantai Paupanda, area Gunung Meja dan Gunung Iya, serta kegiatan persawahan.
b. Atraksi budaya yang terdiri dari pertunjukan Tari Ende Lio, aktivitas pembuatan tenun ikat, zikir rebana khas pesisir, serta lantunan dari musik suling gendang, dan gambus. Selain itu, terdapat kegiatan nelayan seperti proses pelelangan ikan, penjualan ikan di pasar ikan, dan aktivitas nelayan di pelabuhan yang hanya ditemukan di kawasan pesisir seperti Kecamatan Ende Selatan.
c. Atraksi buatan yaitu rumah panggung sebagai hunian adat dengan dimodifikasi mengikuti tren melalui pengecatan warna warni. Hal ini untuk menjaga tradisi hunian panggung dan meminimalisir ancaman bencana tsunami dan banjir akibat gelombang pasang. Rumah panggung warna-warni ini sebagai bentuk *branding* citra kawasan dan peningkatan kualitas permukiman. Rumah panggung ini bisa digunakan untuk restoran, MICE, dan sebagainya.

Skema pengembangan wisata kampung nelayan di Kecamatan Ende Selatan secara garis besar dimulai dengan menggunakan pendekatan holistik terhadap perencanaan dan strategi. Dalam hal ini strategi telah diulas dalam matrik SWOT yang kemudian diturunkan ke program-program di tiap-tiap bahasan. Pada perencanaan harus melihat keseimbangan dari aspek-aspek *sustainable development*, yaitu: ekonomi, lingkungan, dan komunitas sosial. Tiap-tiap aspek memiliki strategi yang berbeda-beda dalam kontribusi perwujudan wisata kampung nelayan.

Perencanaan wisata kampung nelayan juga harus menyeimbangkan antara *trends & market demands* dengan pasokan yang tergabung dalam 4A, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan *ancillaries.* Pembangunan 4A juga akan berhasil dilirik oleh wisatawan bila pengelola wisata memiliki jiwa kreatif dan inovatif dalam hal *marketing tourism* sehingga informasi obyek wisata

tersebut sampai kepada wisatawan. Keseimbangan antara *demand* dan *supply* tentu akan memberikan kepuasan bagi wisatawan sehingga ada keinginan untuk kembali berwisata di Kecamatan Ende Selatan. Dalam statistik, indikator keseimbangan tersebut akan terlihat dari tren kenaikan angka kunjungan wisatawan ke wisata kampung nelayan. Dengan demikian, pembangunan 4A harus sesuai dengan ekspetasi dari wisatawan.

Pengembangan wisata kampung nelayan di Kecamatann Ende Selatan juga memperhatikan konsep *ecotourism* untuk menjaga keberlanjutan aktivitas wisata tersebut. Wisata kampung nelayan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola dan masyarakat sekitarnya saja dalam mengelola sektor pariwisata. Akan tetapi, juga melibatkan wisatawan untuk bertanggungjawab (*responsible travel*) dalam pengelolaan obyek wisata, terutama aspek lingkungan. Implikasinya,bentuk tanggung jawab wisatawan terhadap obyek wisata akan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat lokal karena obyek wisata tersebut menjadi sumber penghidupannya. Apabila terjadi keseimbangan antara aspek *sustainable development, trends* &*market demands* dengan 4A, dan tanggung jawab pengelolaan obyek wisata baik dari pengelola maupun wisatawan maka akan menciptakan *sustainable tourism.*

Akhir kata, pada kenyataannya sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dari beberapa lokasi obyek wisata di Indonesia. Melalui konsep wisata kampung nelayan di Kecamatan Ende Selatan, harapan tersebut juga bisa terealisasikan untuk mengubah kehidupan masyarakat, terutama permukimannya. Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian pembangunan sektor wisata tidak hanya dibangun oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi para pemangku kepentingan lainnya, seperti tingkat Pemerintah, pemerintah daerah (Bappeda Kabupaten Ende, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende, dan sebagainya), pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat.

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan harus mampu mendekatkan diri kepada masyarakat di Kecamatan Ende Selatan. Sebagai lembaga *public service* tentu upaya mengakomodir kebutuhan masyarakat merupakan tugas pokok. Kesejahteraan masyarakat menjadi utama dan diutamakan dibanding kinerja lainnya sebagaimana tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu menciptakan kesejahteraan bersama. Pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, tetapi keseimbangan antara aspek-aspek *sustainable development.* Belajar dari negara maju dalam teori modernisasi yang saat ini telah berupa pada pembangunan aspek lingkungan karena sadar bahwa apa yang dilakukan akan berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhaji, S & Yusuf, I, S. (2016). Pengaruh Atraksi, Aksesibilitas, dan Fasilitas Terhadap Citra Objek Wisata Danau Tolire Besar Di Kota Ternate. *Jurnal Penelitian Humano,* Vol. 7, No. 2. Ternate: Universitas Khairun.

Astuti, Marhanani T. & Noor, Any A. (2016). Daya Tarik Morotai Sebagai Destinasi Wisata Sejarah dan Bahari. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*.

Bachri, A, A, Stiadi, D, & Kadir, A. (2015). Kajian Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.* Vol. 1, No. 1. Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

Bambang, Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Bengen, D.G. (2004). *Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS)*, dalam *Interaksi daratan dan Lautan : Pengaruhnya terhadap Sumber Daya dan Lingkungan, Prosiding Simposium Interaksi Daratan dan Lautan*. Diedit oleh W.B. Setyawan, dkk.Jakarta : Kedeputian Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Cooper et. al. (1993).*Tourism Principles &Practice.England : Longman Group Limited.*

Dahles, H. (1998). Tourism, government policy, and petty entrepreneurs in Indonesia. *South East Asia Research*, Vol. 6: 73-98.

Dahuri, R. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Peisisir dan Lautan Secara Terpadu.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Djata, B, T. (2018). Peran Pendamping Serta Dampak Anggaran Di Bidang Kelautan dan Perikanan Terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Ende.*Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis,* Vol. 6, No. 1. Yogyakarta: Mercu Buana.

DjokoTribawono. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Djou, J, A, G. (2013). Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende. *Jurnal Kawistara,* Vol. 3, No. 1. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Dwi Rahmayanti , Yunita dan Sri Pinasti, Indah. (2013). Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sremo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Universitas Negeri Yogyakarta

Ekanayake, E, M & Long, A, E. (2012). Tourism Development And Economic Growth In Developing Countries. *The International Journal of Business and Finance Research,* Vol. 6, No. 1. Hawaii: The Institute for Business and Finance Research.

Filion, F. L., et al. (1994). The Economics of global ecotourism. In M. Munasinghe and J. McNeely (Eds.). *Protected Area Economics and Policy: Linking Conservation and Sustainable Development*. Washington DC: The World Bank.

Freddy Rangkuti. (2013). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunardi, Gugun. (2010). Identifikasi Poteni Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang. *Jurnal PLANESA*. Vol.1 No.1.*Jurusan Teknik Planologi*. Universitas Esa Unggul.

H. Abrar Saleng, (2004). *Hukum Pertambangan*, Penerbit UUI Press, Yogyakarta,

Hadinoto, K. (1996). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Hanafiah, M, H, Jamaluddin, M, R, & Zulkifly, M, I. (2013). Local Community Attitude and Support Towards Tourism Development In Tioman Island, Malasia. *Procedia Social and Behavioral Sciences 105.*Malaysia: Elsevier Ltd.

Haryani. (2014). Potensi Pengembangan Atraksi Wisata Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo Padang d Tengah Ancaman Bencana Abrasi. *Journal MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan.* Bandung: Universitas Islam Bandung.

Hidayat, Marceilla. (2011). *Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*. Politeknik Negeri Bandung

Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.

Iswandi. (2015). *Perencanaan dan Pengembangan Kota Pesisir Berwawasan Lingkungan*. Kendari: Unhalu Press.

Junaidi & Zulgani. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. Edisi III.

Kerr, W. R. (2003). *Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure*. London: Pergamon.

Kholilurrohman, M. (2016). *Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Religi di Kabupaten Rembang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Wali songo semarang

Leijzer, M & Denman, R. (2013).*Tourism Development In Coastal Areas In Africa: Promoting Sustainability Through Governance and Management Mechanisms.* Madrid: *World Tourism Organization* (UNWTO).

Mahdayani. W. (2009). *Buku Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan.

Manahampi, Reydi, M. Rengkung, Leonardus R, Rori, Yolanda P.I. & Timban, Jean FJ. (2015). *Peranan Ekowisata Bagi Kesejahteraan Masyarakat Bahoi Kecamatan Likupang Barat*.

Maneewit, Adul. (2017). *Analisis Potensi Obyek Wisata Pantaidi Kawasan Pattaya, Thailand*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mubyarto. (1984). *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Musanef. (1995). *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*.

Pendit, N, S. (1994). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar.* Jakarta: Perdana.

Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks.

Pramudji. (2002). *Pengelolaan Kawasan Pesisir Dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari.* Volume XXVII, Nomor 1. Bidang Sumberdaya Laut. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Pramudji. (2002). Pengelolaan Kawasan Pesisir Dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari. *Jurnal Oseana,* Vol. XXVII, No. 1. Jakarta: LIPI.

Primadony, S, R & Riyanto, M. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 1, No. 4. Malang: Universitas Brawijaya.

Puppim de Oliveira. (2003). Governmental Responses to Tourism Development: Three Brazilian Case Studies. *Tourism Management*, Vol. 24: 97-110.

Raharjo. (2004). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rogerson, C, M & Rogerson, J, M. (2019). Emergent Planning for South Africa's Blue Economy Evidence From Coastal and Marine Tourism. *Urbani Izziv,* Vol. 30. Slovenije: Urbanisticni Institut Republike Slovenije.

Rusli. (2011). Upaya Peningkatan Hunian Kampung Nelayandi Kota Donggala Studi Kasus Kelurahan Labuan Bajo Dan Kelurahan Boneoge.*Jurnal ruang*.

Saleng, Abrar. (2004), *Hukum Pertambangan*, Penerbit UUI Press, Yogyakarta.

Schafner, J. (2014). *Development Economics: Theory, Empirical Research and Policy Analysis*. John Wiley & Sons, Inc.

Setyaningrum, agustina. Heny B.S. Edy Masduqi. (2017). *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam, Institut Teknologi Yogyakarta.

Sholik, Adabi. (2013). Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Makan Dan Perpustakaan Bung Karno Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha Perdagangan di Sekitarnya. *Jurnal Lib Geo.* UGM.

Silas, Johan. (1985). Perumahan dan Permukiman. *Jurusan Arsitektur*. Surabaya: FTSP-ITS.

Sindhu Yoga, I Made dkk. (2017). Evaluasi *Community-Based Tourism* Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Sudiarta. (2006). Ekowisata Hutan Mangrove: Wahana Pelestarian Alam dan Pendidikan Lingkungan. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, Vol. 5, No 1. Denpasar: Politeknik Negeri Bali.

Suryawan, Agung. (2016). *Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)* Sendang Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung). *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah.* Vol. 5, No. 6. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tamara, A, P & Rahdriawan, M. (2018). Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik Di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.*Jurnal Wilayah dan Lingkungan,* Vol. 6, No. 1. Semarang: Universitas Diponegoro.

Tjiptabudy**,** Jantje. (2013). *Aspek Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat.* Universitas Pattimura.

Wahdiniwaty, Rahma. (2011). *Aksesibilitas Wisata Pada Kota Metropolitan di Negara Berkembang (Suatu Survey di Wilayah Bandung Raya).*Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 11 No.2. Bandung.

Internet:

Pantai Pandawa https://www.simphortour.com/wp-content/uploads/2019/03/pantai-5-ksatria-1024x768.jpg diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

Kondisi kawasan pesisir di Indonesia Timur https://www.mongabay.co.id/2018/09/10/masyarakat-pesisir-semakin-tersisih-karena-tata-ruang-laut-nasional/ diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

Indesx Pembangunan Manusia Tahun 2018. Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html diakses pada tanggal 29 September 2019

Angkasa Pura.*Tourism Information Center* https://pbs.twimg.com/media/DrjZGqnU4AAa4y5.jpg, diakses pada tanggal 10 November 2019

Potret Kawasan Pesisir Timur https://news.kkp.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Pesisir.jpg diakses pada tanggal 20 Oktober 2019

Riwandi.(2013). *Strategi Dan Program Pengembangan Pariwisata Bahari di Kabupaten Natuna.Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bogor.*https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/67914/1/2013ris.pdf diakses pada tanggal 3 September 2019

Mita. (2016). *Menpar:Perlu Atraksi, Akses, dan Amenitas Untuk Bangun Pariwisata.* Dalam https://www.airmagz.com/3347/menpar-perlu-atraksi-akses-dan-amenitas-untuk-bangun-pariwisata.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Kloczko-Gajewska. (2014). Can We Treat Thematic Villages as Social Innovations? *Journal of Central European Green Innovation,* Vol. 2, No. 3. *https://ideas.repec.org/a/ags/hukrgr/188135.html.* diakses pada tanggal 3 September 2019

Peraturan/Undang-Undang:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Nomor PAR.754.4/12.b/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende Nomor: BUDPAR.754.4/574/X/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Tahun 2014-2019.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 33.

Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang Perikanan nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BIOGRAFI PENULIS
(copas saja yang di belakang cover, belakang cover itu untuk intisari bukunya mas)

Kemiskinan dan kesenjangan merupakan problem klasik yang ditemui di wilayah pesisir, khususnya daerah tertinggal. Kualitas permukiman yang belum layak huni, rendahnya pendapatan masyarakat yang umumnya hanya bermata pencaharian sebagai nelayan hingga kualitas sumber daya manusianya yang rendah dari sisi pendidikan formal. Hal ini seakan-akan menggambarkan sebuah kekuatan rantai kemiskinan. Daerah seperti ini kerap dipandang sebelah mata oleh publik, padahal bila ditelisik lebih dalam bak berlian yang tak terasahkan. Tak terkecuali Kecamatan Ende Selatan yang memiliki sejuta potensi wisata alam tetapi belum teroptimalkan pembangunannya. Nelayan yang hanya mengandalkan laut tentu tidak seberapa pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Ironis memang dengan jargon Indonesia sebagai Negara Maritim yang kaya sumber daya laut. Sektor pariwisata selalu digadang-gadang sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat sekitar.

Buku *Skema Inovatif Model Pengembangan Kampung Tematik* ini mencoba untuk memberikan sumbangsih ide dalam menyelesaikan peliknya permasalahan di lapangan. Penerapan kampung tematik dipandang sebagai pembangunan yang mengedepankan sisi kearifan lokal. Tiga aspek penting dalam mengaplikasikan kampung tematik yang disajikan dalam buku ini, antara lain kelembagaan pariwisata, penataan lingkungan, dan komponen pariwisatanya. Ketiga aspek tersebut diulas dan saling tersinkronisasi untuk menjawab tantangan bagaimana sektor pariwisata berperan menjadi generator dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Skema Inovatif

Model Pengembangan

Kampung Tematik

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Pariwisata

ISBN 978-623-02-1130-0

9 786230 211300